



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN  
2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB II

RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:

- a. rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. rencana Kerja Pembangun Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024;
- c. rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara daerah; dan
- d. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2024.

### Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. bab V Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
  - f. bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - g. bab VII Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan
  - h. bab VIII Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR MALUKU,

  
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 307.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

I. UMUM

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2015-2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun RAPBD tahun 2024 dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, RKPD Tahun 2024, Pengendalian dan Evaluasi dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2024



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Dasar Hukum .....	I-6
1.3	Hubungan Antar Dokumen .....	I-10
1.4	Maksud dan Tujuan .....	I-12
1.5	Sistematika.....	I-12
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1	Kondisi Umum.....	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-11
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-19
2.2.2	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial .....	II-34
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-37
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-38
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib .....	II-38
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....	II-74
2.3.3	Fokus Layanan Penunjang Urusan .....	II-81
2.3.4	Pendukung Urusan Pemerintahan .....	II-86
2.4.	Aspek Daya Saing .....	II-87
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-87
2.4.2	Pengeluaran per Kapita Maluku .....	II-88
2.4.3	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan .....	II-88
2.4.4	Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita.....	II-90
2.4.5	Angka Kriminalitas .....	II-91
2.4.6	Fasilitas Wilayah Infrastruktur .....	II-92
2.5	Fokus Iklim Inventasi.....	II-94
2.6	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan....	II-94
2.6.1	Perkembangan Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku Tahun 2022 .....	II-94
2.6.2	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Anggaran OPD Tahun 2022 .....	II-96
2.7	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-113
2.7.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-113

2.7.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	II-114
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1 Perkiraan Kondisi Ekonomi Tahun 2022 .....	III-5
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023 .....	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-15
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-20
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-24
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-30
3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah .....	III-33
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-8
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 .....	IV-8
4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional .....	IV-11
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah .....	IV-27
4.3 Prioritas Pembangunan .....	IV-40
4.4 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024 .....	IV-53
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Arah Kebijakan Dan Fokus Pembangunan Kewilayahan .....	V-1
5.1.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah .....	V-1
5.1.2 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota .....	V-3
5.1.3 Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi .....	V-6
5.2. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2024 .....	V-9
5.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Maluku .....	V-11
<b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 .....	VI-1
6.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju .....	VI-4
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VII-2
7.2. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK) .....	VII-2
7.2.1. Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah (Impact) .....	VII-3
7.2.2. Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (Outcome) .....	VII-5
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- 4) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- 6) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang disusun untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Daerah RPJMD 2019-2024; landasan

penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan RAPBD Provinsi Maluku Tahun 2024; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

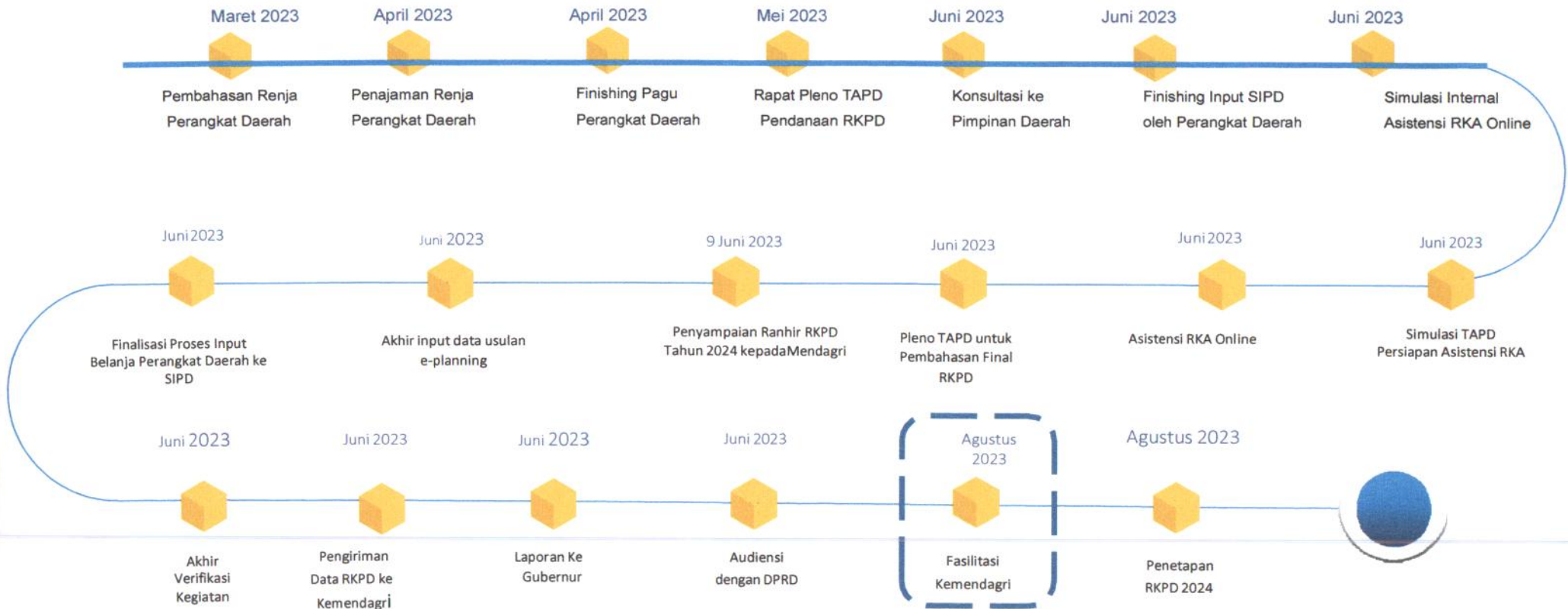
RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Rancangan kerangka ekonomi memuat tentang gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, dan perkiraan untuk tahun 2024, sementara didalam program prioritas pembangunan daerah, memuat rancangan program indikatif tahun 2024 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD 2019 – 2024 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama, dan isu-isu global serta menjawab setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan kondisi terakhir di Maluku. Untuk itu dengan tetap mempertimbangkan urgensi permasalahan yang berbeda tiap tahunnya serta dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka **Arah kebijakan pembangunan Maluku tahun 2024 sebagai tahun terakhir dalam tahapan tahunan Perubahan RPJMD diarahkan pada Pemantapan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas.**

RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

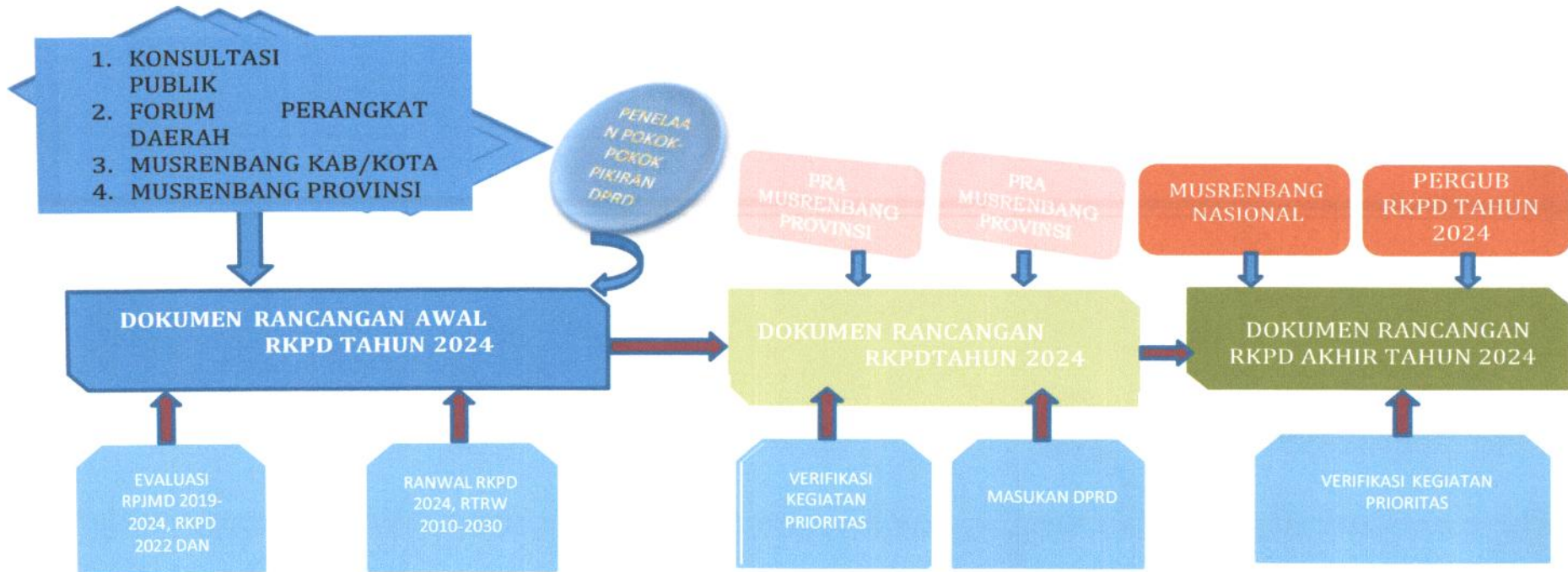
Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Forum Konsultasi Publik, Forum Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi, di dalam tahapan tersebut diatur sebagai berikut :

1. Perencanaan dimulai pada Desember 2022 dalam rangka membuka rangkaian proses penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024. Selanjutnya, pada Februari 2023 diadakan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan stakeholders pembangunan dalam perencanaan, serta menampung pokok-pokok pikiran dari DPRD. Kemudian Maret 2023 dilanjutkan dengan Forum Lintas Perangkat Daerah untuk mempertemukan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dengan stakeholders pembangunan. Hal ini juga dilakukan untuk penajaman program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Provinsi dan secara simultan Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah untuk mempertemukan Bidang Perencana Bappeda Provinsi dengan mitra Perangkat Daerah dalam rangka penajaman kegiatan top down Tahun 2024.
2. Selanjutnya, pada Bulan Maret 2023 dilaksanakan Musrenbang Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan prioritas dari masing- masing Kabupaten/Kota untuk kemudian diusulkan ke tingkat Provinsi dengan diverifikasi oleh Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki kaitan dengan program Kabupaten/Kota tersebut. Rangkaian kegiatan tersebut di atas tidak terlepas dari kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Nasional.
3. Setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dilanjutkan pada April 2023 dilaksanakan Musrenbang Provinsi pada kesempatan ini dimanfaatkan juga untuk penajaman kegiatan belanja perangkat daerah dan Belanja Transfer (Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil). Hasil penajaman pada tersebut juga menjadi bahan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang dibahas pada desk Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2023 di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota. Dalam forum ini juga dilakukan inventarisasi dan klasifikasi usulan kegiatan

**Gambar 1.1**  
**Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024**



**Gambar 1.2**  
**Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Maluku Tahun 2024**



Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Maluku, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak Tahun 2023.

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;
3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow program, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenan;
5. RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai dokumen acuan penyusunan RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

- 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang standart pelayanan Minimal;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
  36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2010, Nomor 22 Seri E)
  37. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

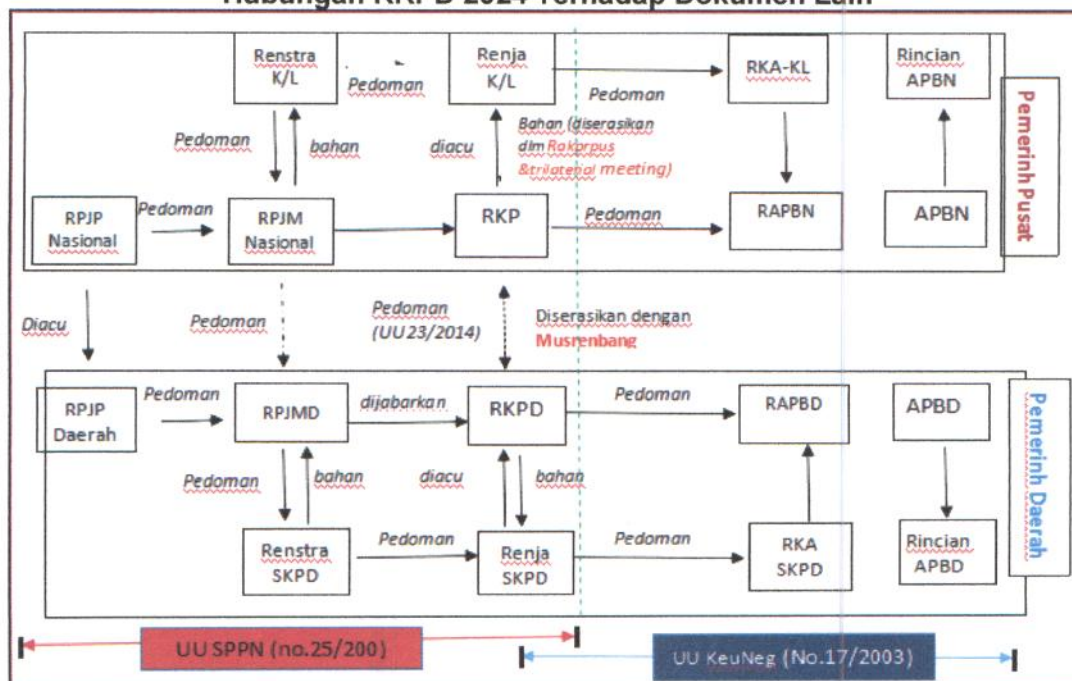
Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 1. 3**  
**Hubungan RKPD 2024 Terhadap Dokumen Lain**



Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2022

Berdasarkan gambar di atas RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan

dan program pembangunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024; dan RTRW Provinsi Maluku Tahun 2010–2030. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2024, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

- 1) Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan
- 2) Menetapkan program prioritas dan kegiatan untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Perubahan RPJMD 2019 - 2024

Tujuannya adalah untuk:

- 1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- 2) Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024; dan
- 3) Menjadi acuan penyalarsan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

#### **1.5 Sistematika**

Dokumen RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2022 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2022; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**  
Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**  
Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**  
Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**  
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang meliputi indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator program prioritas pembangunan daerah.
- BAB VIII PENUTUP**  
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

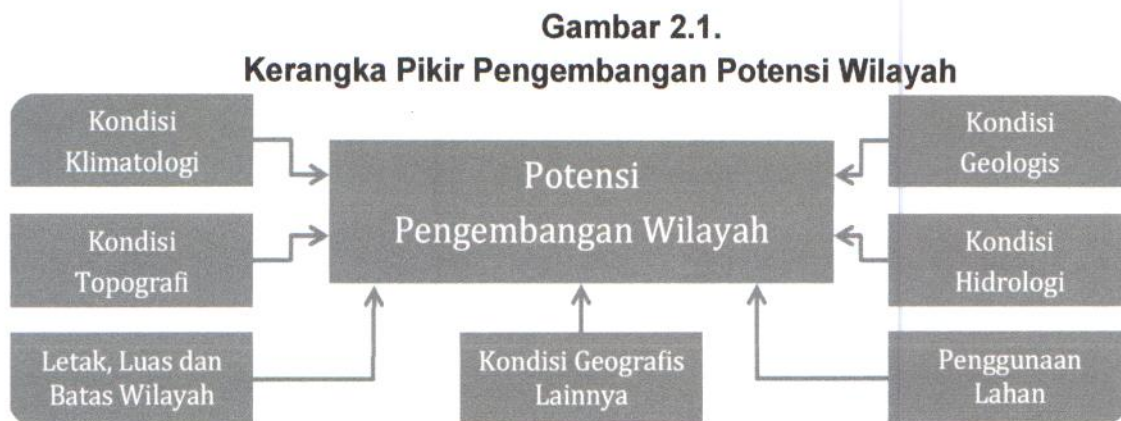
## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 KONDISI UMUM

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi

Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah. Dengan mengetahui aspek geografi dan demografi suatu wilayah, pemangku kebijakan dapat merencanakan dan mengelola pembangunan di masa yang akan datang. Alur pikir potensi pengembangan wilayah dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :



Sumber : Permendagri No .86 Tahun 2017

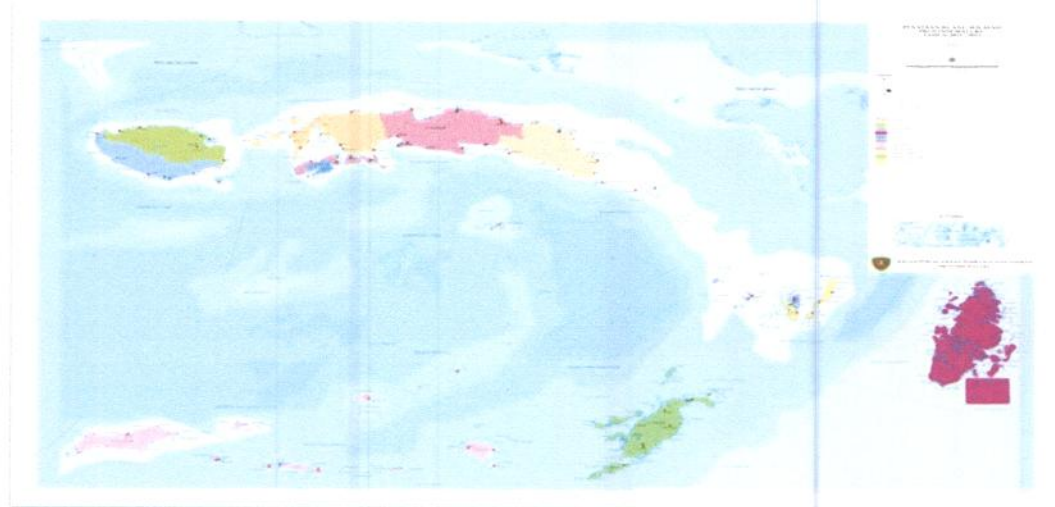
Pada sub bab aspek geografi dan demografi akan dibahas secara rinci mengenai kondisi luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi serta penggunaan lahan sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.1 diatas.

##### 2.1.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294,69 km<sup>2</sup> (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.185 km<sup>2</sup> (7,6%). Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan

jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km.

**Gambar 2.2.**  
**Peta Administrasi Provinsi Maluku**



Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Maluku**

No	Kabupaten / Kota	Luas Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Ibukota Kabupaten	Jumlah		
				Kec.	Desa	Kel.
1	Kab. Maluku Tengah	7.953,81	Masohi	18	186	6
2	Kab. Maluku Tenggara	1.031,81	Langgur	11	190	1
3	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.465,79	Saumlaki	10	80	1
4	Kab. Buru	4.932,32	Namlea	10	82	-
5	Kab. Seram Bagian Timur	6.429,88	Bula	15	198	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	5.033,38	Piru	11	92	-
7	Kab. Kepulauan Aru	8.152,42	Dobo	10	117	2
8	Kab. Maluku Barat Daya	4.581,06	Tiakur	17	117	-
9	Kab. Buru Selatan	3.780,56	Namrole	6	79	-
10	Kota Ambon	298,61	Ambon	5	30	20
11	Kota Tual	254,39	Tual	5	27	3

No	Kabupaten / Kota	Luas Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Ibukota Kabupaten	Jumlah		
				Kec.	Desa	Kel.
	<b>MALUKU</b>	<b>46.914,03</b>	<b>Ambon</b>	<b>118</b>	<b>1198</b>	<b>33</b>

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2022

### 2.1.1.3. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Maluku terletak di antara 2°30'-9° Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur. Secara administrasi, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

Wilayah Maluku memiliki banyak pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 km<sup>2</sup>), Pulau Buru (9.000 km<sup>2</sup>), Pulau Yamdena (5.085 km<sup>2</sup>) dan Pulau Wetar (3.624 km<sup>2</sup>). Selain itu, wilayah Maluku juga terdapat 4 (empat) gunung di Provinsi Maluku dimana gunung tertinggi adalah Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian 1.036 meter di atas permukaan laut.

Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 danau yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dulla, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja

di Pulau Seram, Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau Buru.

#### 2.1.1.4. Topografi Kepulauan Maluku

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan. Pada Tabel 2.2 dapat dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

**Tabel 2.2.**  
**Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku**

No	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seram Selatan	4.000	Pulau Seram
		Pasahari	40.000	Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa	10.000	Pulau Seram
		Eti	600	Pulau Seram
		Kairatu	1.300	Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo	14.000	Pulau Buru
		Wai Kating	1.500	Pulau Buru
		Wai Kumu	1.250	Pulau Buru
		Wai Mala	1.250	Pulau Buru
		Rana	1.250	Pulau Buru
		Samalagi	1.000	Pulau Buru
		Wai Lo	500	Pulau Buru
<b>Jumlah</b>			<b>83.950</b>	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

#### 1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian

di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

**2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)**

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

**3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)**

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

**4. Kepulauan Aru**

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

## **5. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya**

Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

### **2.1.1.5. Demografi**

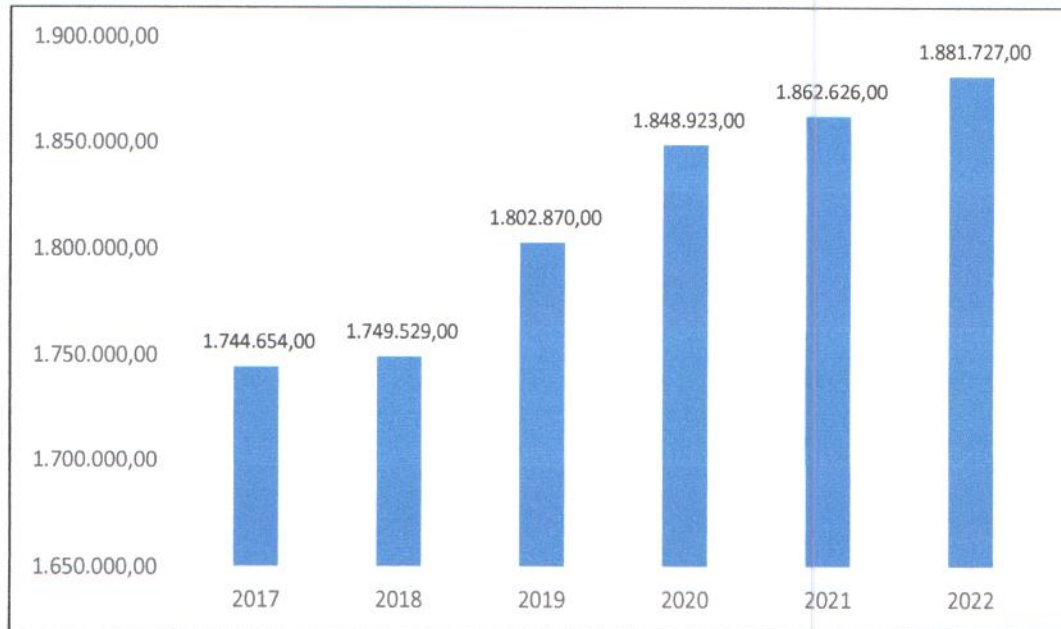
Pembangunan Kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan penduduk sebagai titik sentral dalam melahirkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di setiap wilayah di Maluku. Permasalahan kependudukan di Maluku adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk akan memengaruhi kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

Sebagai Provinsi Kepulauan, wilayah di Provinsi Maluku tentunya memiliki tingkat kepadatan penduduk serta struktur penduduk yang berbeda pula, dimana struktur penduduk tersebut meliputi jumlah, persebaran dan komposisi penduduk. Tingkat kepadatan serta struktur yang berbeda-beda dari waktu ke waktu pada setiap wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena struktur penduduk yang dinamis atau senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu maka perlu sekali untuk mengetahui komposisi penduduk disuatu wilayah, hal ini dikarenakan komposisi penduduk dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan penduduk berdasarkan pegelompokkan kriteria tertentu.

Melalui komposisi penduduk akan diperoleh berbagai data mengenai penduduk menurut jenis kelamin dan pengelompokkan umur. Demikian nantinya akan dapat diketahui kelompok umur produktif dan tidak produktif, sehingga hal ini akan memudahkan pemerintah untuk meramalkan kebijakan apa yang akan diambil ketika melakukan pembangunan. Untuk itu pentingnya data jumlah dan struktur penduduk sehingga akan digunakan untuk menentukan beberapa kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Perkembangan penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tersaji pada grafik perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah berikut.

**Gambar 2.3.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2017-2022**



Sumber: BPS Maluku, 2023

Data BPS Provinsi Maluku tentang jumlah pendudukan per Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa masih tingginya disparitas jumlah penduduk antara wilayah. Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah penduduk tertinggi ditahun 2022 yakni sebesar 427.050 jiwa, kemudian Kota Ambon sebesar 348.225 jiwa. Sementara kabupaten dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Buru Selatan yakni 78.515 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten/Kota tahun 2022 di Maluku dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2017-2022**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Tanimbar	111.825	111.853	113.012	113.490	124.075	124 787
Maluku Tenggara	99.284	100.043	99.790	100.176	122.640	124 199
Maluku Tengah	371.479	373.821	373.378	374.423	424.730	427 050
Buru	135.687	137.478	143.688	147.797	136.393	137 990
Kepulauan Aru	93.780	93.259	96.114	97.187	102.916	103 860
Seram Bagian Barat	170.494	171.846	171.586	171.921	214.733	217 958
Seram Bagian Timur	111.573	111.390	114.677	116.213	140.271	143 438

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maluku Barat Daya	72.673	73.148	73.103	73.398	82.187	82 560
Buru Selatan	61.330	61.304	63.328	64.178	76.715	78 515
A m b o n	444.797	443.055	478.616	495.474	347.644	348 225
T u a l	71.732	72.332	75.578	77.623	90.322	93 145
<b>MALUKU</b>	<b>1.744.654</b>	<b>1.749.529</b>	<b>1.802.870</b>	<b>1.831.880</b>	<b>1.862.626</b>	<b>1 881 727</b>

Sumber : BPS Maluku, 2023

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 menurut kabupaten/kota menunjukkan Kota Tual, Kabupaten Buru Selatan dan Seram Bagian Timur memiliki laju pertumbuhan tercepat yakni masing-masing sebesar 3,11%, 2,33% dan 2,24%. Sementara untuk persentase penduduk tahun 2022 dari total penduduk tertinggi adalah Maluku Tengah sebesar 22,69 %, Kota Ambon sebesar 18,51%, dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 11,58%. Sementara untuk daerah dengan kepadatan tertinggi yakni Kota Ambon dan Kota Tual masing-masing 14.71 per sq km dan Kota Tual 396 per sq km. lebih rinci gambaran laju pertumbuhan, persentase dan kepadatan penduduk tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020 - 2022**

Kab/Kota	KEPENDUDUKAN		
	Laju Pertumbuhan	Persentase	Kepadatan
Kepulauan Tanimbar	0,56	6,63	28
Maluku Tenggara	1,26	6,60	122
Maluku Tengah	0,53	22,69	52
B u r u	1,16	7,33	28
Kepulauan Aru	0,90	5,52	13
Seram Bagian Barat	1,49	11,58	44
Seram Bagian Timur	2,24	7,62	25
Maluku Barat Daya	0,44	4,39	18
Buru Selatan	2,33	4,17	21
A m b o n	0,15	18,51	1471
T u a l	3,11	4,95	396
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>41</b>

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

#### 2.1.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Maluku memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi yakni lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya yang bergerak relatif ke arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun, zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut terbentuklah patahan-patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.
- (2). Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang berbeda di setiap daerah. Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir memiliki pola musim yang sama, dimana musim hujan terjadi pada bulan April sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual, Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola musim yang sama yakni musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari perbedaan pola musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, aberasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan manusia yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku.

- (3). Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease, Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon, Kawasan Pulau Buru dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis ancaman yang berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Aberasi, Epidemik dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut.

**Tabel 2.5.**  
**Jenis Bencana Provinsi Maluku Tahun 2016-2022**

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gempa Bumi	21	580	72	273	8	2
Banjir dan Tanah Longsor	51	49	163	143	37	20
Angin Puting Beliung	4	7	-	-	19	4
Gelombang Pasang	1	8	-	-	5	7
Abrasi Pantai	0	2	-	-	-	-
Kebakaran	7	13	-	-	-	-
Konflik Sosial	3	0	-	-	-	-
Wabah Penyakit	0	0	-	-	-	-
Kekeringan	0	0	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>663</b>	<b>235</b>	<b>416</b>	<b>69</b>	<b>33</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku guna membangun Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian (perkebunan rempah-rempah), pariwisata (pariwisata bahari, sejarah dan budaya) dan pertambangan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak (Multi Gate) yang diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan

perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu :

1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
2. Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat;
3. Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara;
4. Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur;
5. Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan;
6. Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila dan P.Serua;
7. Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
8. Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
9. Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
10. Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
11. Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer;
12. Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi

Maluku. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Provinsi Maluku meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Provinsi Maluku mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

**Tabel 2.6.**  
**Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Maluku**

No	Kabupaten/Kota	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
1	Kepulauan Tanimbar	-	-	Saumlaki
2	Maluku Barat Daya	-	Tiakur dan Wonreli	Ilwaki
3	Maluku Tenggara	-	Langgur	-
4	Maluku Tengah	-	Masohi dan Wahai	-
5	Buru	-	Namlea	-
6	Buru Selatan	-	Kepala Madang dan Namrole	-
7	Kep. Aru	-	-	Dobo
8	Seram Bagian Barat	-	Kairatu dan Dataran Honipopu	-
9	Seram Bagian Timur	-	Werinama, Bula dan Dataran Hunimua	-
10	Ambon	Ambon	-	-
11	Tual	-	Tual	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Yamtel, Namsela, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalele, Kayeli, Teluk Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloro, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhu, Tomalehu Timur, Dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila, Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Weiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira, Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet, Wulur, Tapa, Letwuring, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Koijabi, Longgar, Meror.

**Tabel 2.7.**  
**Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang**  
**Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku**

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1.	Maluku Tengah	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Pulau Ambon-Seram
2.	Maluku Tenggara	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru
3.	Kepulauan Tanimbar	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Nasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Yamdena-Wetar
4.	Buru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategi Nasional Pulau Buru
5.	Seram Bagian Timur	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
6.	Seram Bagian Barat	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
7.	Kepulauan Aru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru
8.	Maluku Barat Daya	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		Strategis Nasional		Yamdena-Wetar
9.	Buru Selatan	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Buru
10.	Ambon	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Kolektor Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Internasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
11.	Tual	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru

Sumber : RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Provinsi Maluku mengemban peran sebagai Provinsi Kepulauan dan Lumbung Ikan Nasional didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan kolektor primer. Dua jaringan transportasi di Provinsi Maluku juga didukung oleh jaringan transportasi laut, pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit serta peningkatan kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.

**Tabel 2.8.**  
**Sistem Arahkan Pola Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku**

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
1	Maluku Tengah	- Cagar Alam Tanjung Sial - Cagar Alam Laut Banda - Taman Nasional Manusela - Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo - Taman Wisata Alam Laut Banda	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata) - Kawasan Andalan Laut Banda (Perikanan, pertambangan, pariwisata)	- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram - Kawasan Laut Banda
2	Maluku Tenggara	- Cagar Alam Daab	- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar- Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	
3	Kepulauan Tanimbar	- Suaka Margasatwa Tanimbar - Cagar Alam Pulau Nuswotar - Cagar Alam Pulau Larat - Cagar Alam Tafermaar	- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar- Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri) - Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya (Perikanan laut, pertambangan, pariwisata)	Kawasan Perbatasan Laut RI
4	Buru	- Cagar Alam Masbait - Cagar Alam Masarete	- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
5	Seram Bagian Timur		- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
6	Seram Bagian Barat	- Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan,	Kawasan Pengembangan

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
		- Cagar Alam Gunung Sahuwai - Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa - Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	perkebunan, perikanan, pariwisata)	Ekonomi Terpadu Seram
7	Kepulauan Aru	- Suaka Margasatwa Pulau Baun - Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara - Suaka Margasatwa Pulau Kobror	- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar- Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
8	Maluku Barat Daya	- Cagar Alam Bekau Huhun	- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar- Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
9	Buru Selatan		- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
10	Ambon	-	-	-
11	Tual		- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar- Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	

Sumber : RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis. Kawasan perikanan dan pertanian yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa

kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian, tanaman pangan, komoditas padi dan sagu, kawasan berpotensi perkebunan cengkeh, pala, kelapa, kakao, pohon kayu putih, jambu mete, kopi, dan vanili. Sektor unggulan pertanian diarahkan pada kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya dan pengembangan kawasan berpotensi perikanan tangkap dan Kawasan Pengembangan Pariwisata diarahkan pada 11 Kabupaten/Kota.

Pengembangan kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan pertanian, kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan pengembangan komoditas perikanan diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energi sehingga peran dan fungsi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dan sebagai Lumbung Ikan Nasional dapat terwujud. Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral Mangan dan Nikel diarahkan pada Kabupaten Maluku Tengah dan pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapatan masyarakat lokal yang diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Provinsi Maluku mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Wilayah ini mengandung berbagai sumber daya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan dan obyek wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Maluku menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

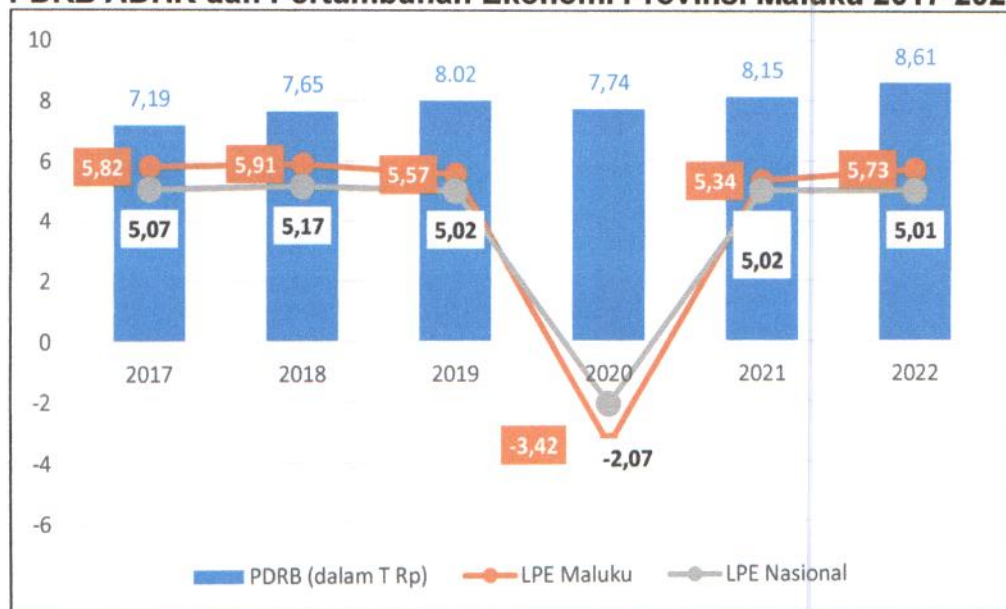
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan

harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana ekonomi yang sempat tumbuh 6,41% pada dan menurun mencapai angka 4,73% pada tahun 2019. dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan sebesar 5,73%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku lebih besar dibanding pertumbuhan nasional yaitu hanya sekitar 5,31%.

Berdasarkan hasil Rilis Badan Pusat (BPS) Statistik Provinsi Maluku Pertumbuhan Ekonomi Maluku triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,73 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 140,75 persen.

**Gambar 2.4**  
**PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku 2017-2022**



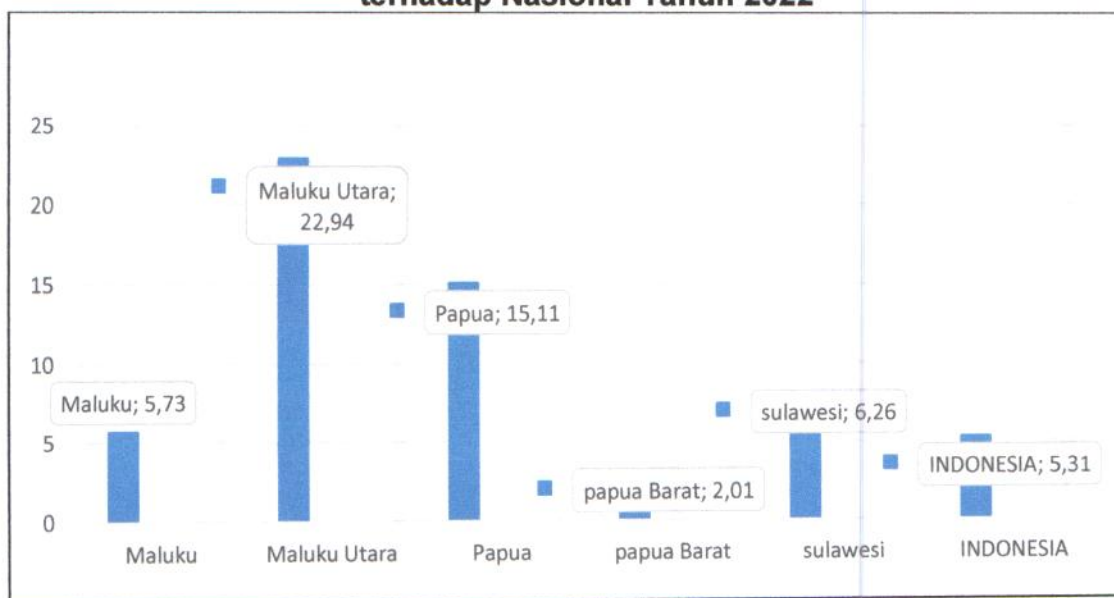
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023 Diolah

Ekonomi Maluku triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 (q-to-q) mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,06 persen. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, hanya lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang mengalami kontraksi pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pengadaan listrik dan gas

sebesar 10,04 persen; selanjutnya konstruksi sebesar 9,87 persen; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,89 persen dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,82 persen. Struktur PDRB Provinsi Maluku menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Maluku masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,61 persen; diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 22,42 persen; perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,41 persen; dan konstruksi sebesar 8,25 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Maluku mencapai 67,70 persen.

ekonomi Provinsi Maluku tumbuh lebih tinggi dari ekonomi nasional yaitu pada tahun 2022 semester IV Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku sebesar 5,73% sedangkan pertumbuhan nasional berada pada angka 5,31%. Gambaran pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 2.5.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua terhadap Nasional Tahun 2022**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Lapangan usaha memberikan peran besar pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha. Dapat kembali membaik pada tahun 2022, membaiknya ekonomi Maluku berjalan seiring dengan

membbaiknya kondisi akibat pandemi covid, dimana lapangan usaha kembali digerakkan sebagai upaya melakukan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 Ekonomi Maluku mengalami pertumbuhan sebesar 5,73 persen dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 140,75 persen.

Berdasarkan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Maluku tahun 2022 oleh BPS mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,04 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 265,81 persen. Sedangkan pada (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 9,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran tertinggi pada komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 62,94 persen. dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 2.9**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017 – 2022 (%)**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.00	1.73	1.03	0.31	0.97	23,56
Pertambangan dan Penggalan	-0.28	-0.11	-0.04	-0.09	0.73	2,63
Industri Pengolahan	0.30	0.27	0.21	-0.27	5.25	5,08
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.01	0.00	0.01	4.38	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.01	0.02	-0.01	8.16	0,40
Konstruksi	0.52	0.51	0.44	-0.35	9.34	7,75
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.01	1.00	0.92	-1.17	5.32	13,41
Transportasi dan Pergudangan	0.16	0.37	0.27	-0.99	16.96	5,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.10	0.11	0.05	-0.13	1.73	1,49
Informasi dan Komunikasi	0.11	0.23	0.10	0.09	8.47	3,15
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.26	0.25	0.17	0.34	-1.95	4,17
Real Estate	0.01	0.01	0.00	0.00	5.63	0,27
Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	-0.04	9.98	0,97

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.39	1.46	0.84	-0.82	7.42	22,27
Jasa Pendidikan	0.33	0.032	0.48	-0.27	6.03	5,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.09	0.09	0.11	0.07	9.14	2,32
Jasa Lainnya	0.05	0.10	0.08	-0.09	5.71	1,61
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>5.11</b>	<b>6.41</b>	<b>4.73</b>	<b>-3.42</b>	<b>5.33</b>	<b>5,73</b>

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

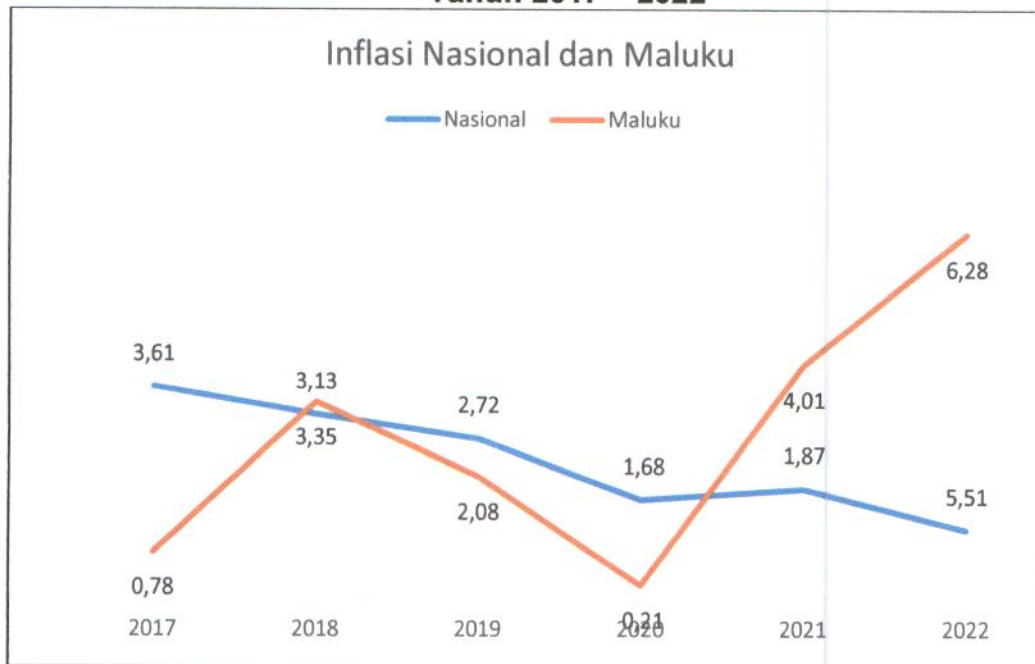
### 2.2.1.2. Laju Inflasi

Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku mengalami fluktuatif dimana secara umumnya menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 4,01. dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 6,28. Pengukuran inflasi di Provinsi di Maluku di hitung hanya 2 (dua) kabupaten kota yaitu kota ambon dan kota tual.

Kota Ambon mengalami inflasi yoy sebesar 6,65 persen dengan IHK 116,17. Inflasi yoy di Kota Ambon terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 10 kelompok pengeluaran yakni tertinggi pada kelompok transportasi sebesar 15,13 persen; dan terendah pada kelompok pendidikan sebesar 0,59 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen.

Kota Tual mengalami inflasi yoy sebesar 5,18 persen dengan IHK 114,40. Inflasi yoy di Kota Tual terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 9 kelompok pengeluaran yakni tertinggi pada kelompok transportasi sebesar 19,99 persen; dan terendah pada kelompok pendidikan sebesar 0,24 persen. Sedangkan 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu tertinggi pada kelompok kesehatan sebesar 2,08 persen dan terendah pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,29 persen.

**Gambar 2.6**  
**Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku**  
**Tahun 2017 – 2022**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

### 2.2.1.3. Indeks Gini

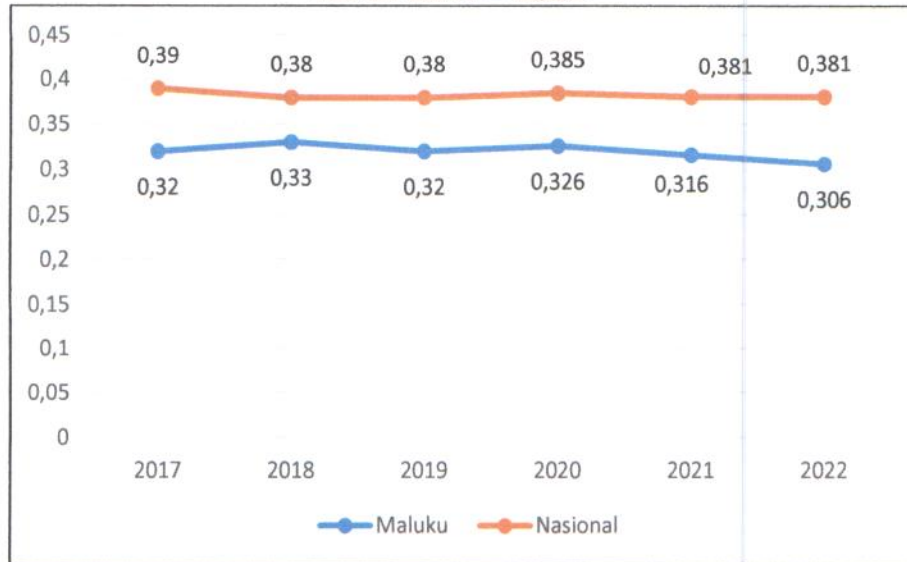
Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,306. dan menurun 0,010 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,316.

Secara umum, pada periode September 2017 - September 2022, Gini Ratio di Maluku mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Maluku.

Capaian Indeks Gini Provinsi Maluku pada tahun 2022 masih lebih baik jika dibandingkan dengan Indeks Gini nasional yang mencapai 0.381.

Semenjak tahun 2017 – 2022 Indeks Gini Provinsi Maluku masih berada dibawah rata-rata nasional. Lebih lanjut terkait gambaran indeks gini Maluku dari tahun 2017 – 2022 tersaji pada grafik berikut :

**Gambar 2.7**  
**Perkembangan Gini Ratio Provinsi Maluku**  
**Tahun 2017 – 2022**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

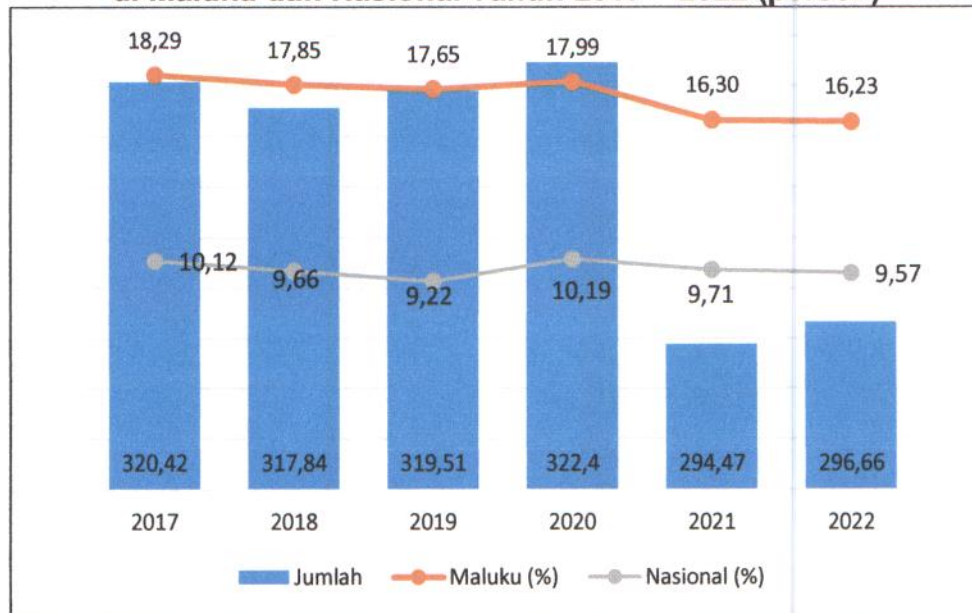
### 2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Maluku ditahun 2022 pada September sebesar 16,23 persen, mengalami penurunan 0,07 persen poin terhadap September 2021. Penurunan persentase kemiskinan yang dialami berjalan searah dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki atau melakukan pemulihan perekonomian daerah dan nasional.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 2,96 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 3,12 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,82 persen menjadi 5,90 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 23,50 persen menjadi 24,54 persen

Secara nasional tingkat kemiskinan Provinsi Maluku tahun 2022 sebesar 16.23% masih lebih tinggi dari nasional yakni 9.57%. Detail perkembangan kemiskinan Provinsi Maluku dibandingkan dengan Nasional dari tahun 2017 – 2022 dapat dilihat gambar berikut :

**Gambar 2.8**  
**Trend Jumlah Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan**  
**di Maluku dan Nasional Tahun 2017 – 2022 (persen)**

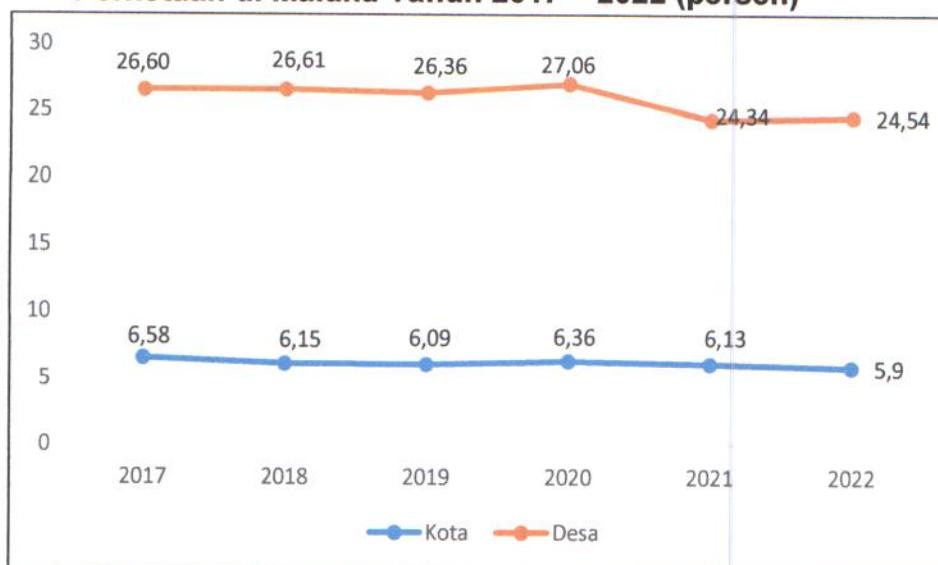


Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Penduduk miskin di perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 248,57 ribu orang. Apabila dibandingkan dengan periode September 2021, jumlah penduduk miskin di perdesaan naik sebesar 2,63 ribu orang dan persentase penduduk miskin di perdesaan juga naik sebesar 0,20 persen poin.

Penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 48,08 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2022 (5,90 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen. Adapun bila dibandingkan dengan periode September 2021, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 0,94 ribu orang dan persentase penduduk miskin di perkotaan juga mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin.

**Gambar 2.9**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan di Maluku Tahun 2017 – 2022 (persen)**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Sebanding dengan persentase kemiskinan jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar proporsinya dibandingkan dengan jumlah di Kota. Tampak bahwa proporsi terbesar yaitu sebesar 245,97 jiwa penduduk miskin bertempat tinggal di daerah perdesaan, sedangkan sisanya yang sekitar 49,02 jiwa penduduk miskin tinggal di perkotaan, seperti terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2021 – 2022**

Daerah/Tahun		Jumlah Penduduk Miskin
<b>Perkotaan</b>		
	September 2021	6,13
	Maret 2022	5,82
	September 2022	5,90
<b>Perdesaan</b>		
	September 2021	24,34
	Maret 2022	23,50
	September 2022	24,54

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Garis Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp 672.456,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,51 persen. Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 10,98 persen.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak

dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2.11 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan September 2022.

**Tabel 2.11**  
**Garis Kemiskinan dan Perkembangannya menurut daerah**  
**September 2021 – September 2022**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<b>Perkotaan</b>			
September 2021	441.674	171.643	613.316
Maret 2022	460.569	178.780	639.349
September 2022	495.440	187.267	682.707
Perubahan Sep'21–Sep'22(%)	12,17	9,10	11,31
Perubahan Mar'22–Sep'22(%)	7,57	4,75	6,78
<b>Perdesaan</b>			
September 2022	457.656	142.688	600.344
Maret 2022	473.778	151.424	625.202
September 2022	497.638	166.468	664.124
Perubahan Sep'21–Sep'22(%)	8,74	16,67	10,62
Perubahan Mar'21–Sep'22(%)	5,04	9,94	6,2
<b>Total</b>			
September 2021	450.442	155.467	605.909
Maret 2022	468.335	162.991	631.326
September 2022	496.691	175.765	672.456
Perubahan Sep'21–Sep'22(%)	10,27	13,06	10,98
Perubahan Mar'22–Sep'22(%)	6,05	7,84	6,51

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode Maret 2022–September 2022, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2022 sebesar 3,08, mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 2,90. Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,80 menjadi 0,84 (lihat Tabel 2.12). Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,86, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 4,86. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,22, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,34.

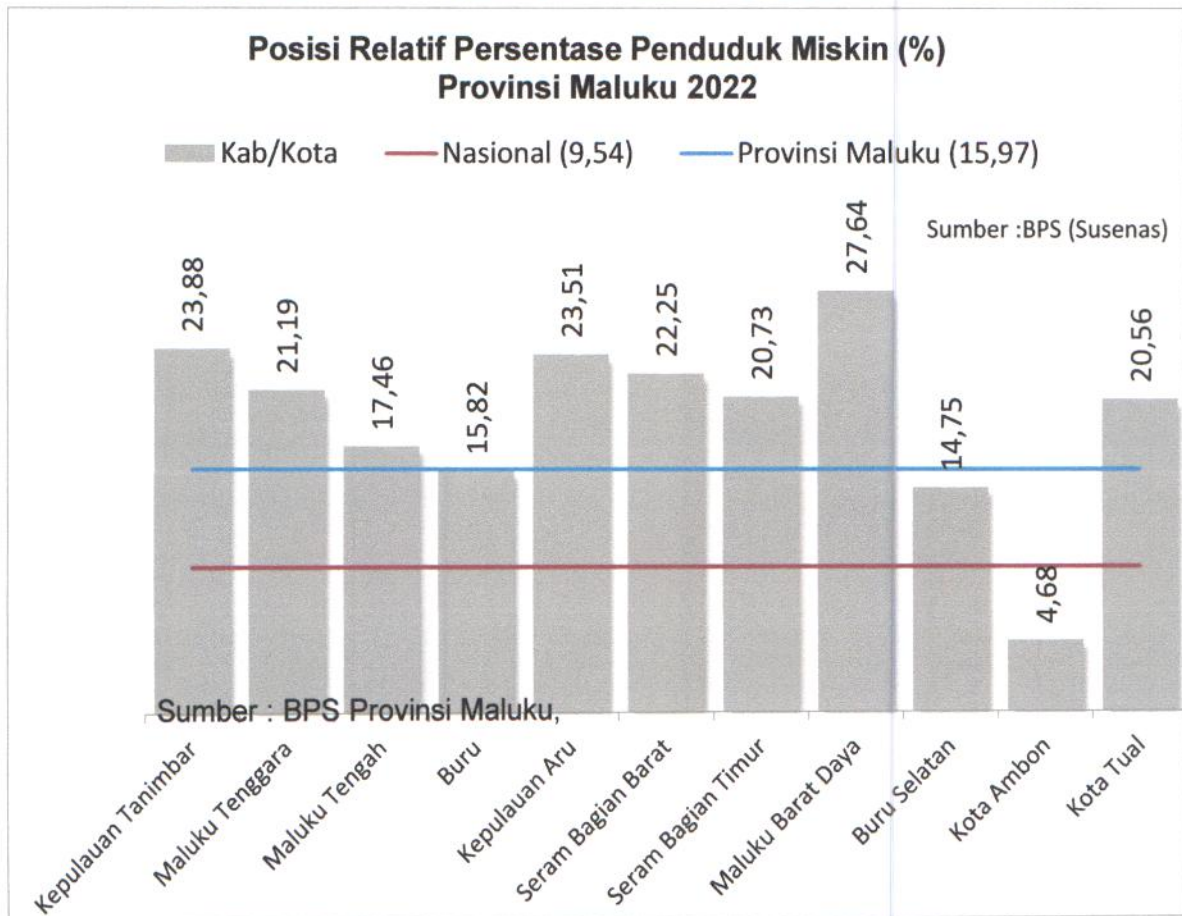
**Tabel 2.12**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Maluku**  
**Menurut Daerah, September 2021 – September 2022**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</b>			
September 2021	0,92	5,52	3,49
Maret 2022	0,79	4,46	2,90
September 2022	0,86	4,86	3,08
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</b>			
September 2021	0,19	1,27	0,80
Maret 2022	0,16	1,71	1,05
September 2022	0,22	1,34	0,84

Sumber : BPS Provinsi Maluku dan Diolah dari Data Survey Social Ekonomi Nasional (Susenas) September 2023

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku menjukan disparitas yang cukup tinggi, hanya kota Ambon yang memiliki capaian kemiskinan dibawah rata-rata nasional, sementara 10 kabupaten/kota lainnya berada diatas capaian nasional. Gambaran terkait capaian kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 2.10**  
**Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2022**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

#### 2.2.1.4. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Provinsi Maluku telah mendorong terciptanya perbaikan angka tingkat pengangguran yang dimiliki, Sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku cenderung menurun dari tahun 2021 pada angka 6,93% turun hingga 6,88% pada tahun 2022. Walaupun angka ini berada di atas rata-rata secara nasional.

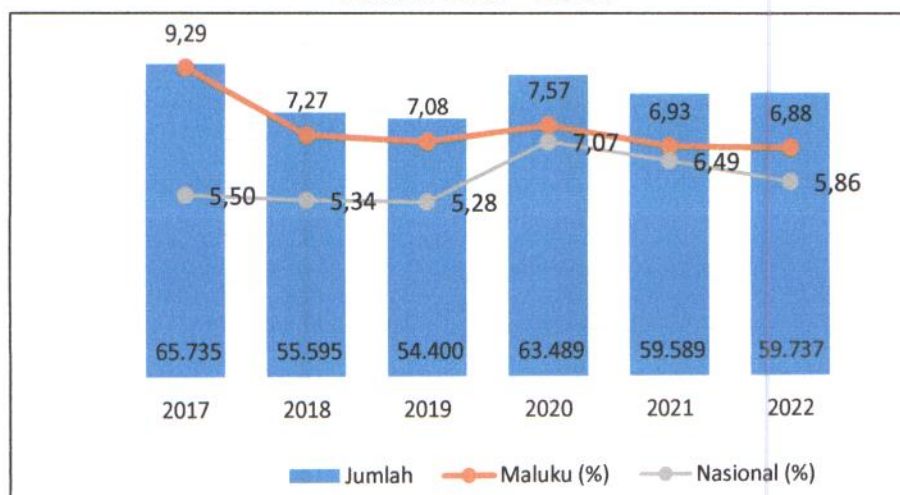
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 868.581 orang, naik 8.237 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,29 persen poin.

Penduduk yang bekerja sebanyak 808.844 orang, naik sebanyak 8.089 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11.864 orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Agustus 2022 sebesar 6,88 persen, turun sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Provinsi Maluku. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja nonformal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi.

**Gambar 2.11**  
**Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017 - 2022**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2022

Jika melihat perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku pada Agustus 2021 mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2020 yang mencapai 7,57%. Sedangkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 mencapai 65,75%, menurun jika dibandingkan angka TPAK Agustus 2020 sebesar 65,07%.

**Tabel. 2.13**  
**Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agustus 2020 – Agustus 2022**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Feb 2021–Ags 2022	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
Penduduk Usia Kerja	1.289.637	1.298.462	1.308.543	18.906	1,47	18,297	1,40
Angkatan Kerja	839.190	836.171	860.344	21.154	2,52	8.237	0,96
- Bekerja	775.701	779.87	800.755	25.054	3,23	8.089	1,01
- Pengangguran	63.489	56.301	59.589	-3.9	-6,14	148	0,25
Bukan Angkatan Kerja	450.447	462.291	448.199	-2.248	-0,50	10.060	2,24
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,57	6,73	6,93	-0,64			
- Perkotaan	12,23	10,07	10,18	-5,18			
- Perdesaan	4,44	4,22	4,63	2,31			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,07	64,40	65,75	0,68			-0,29
- Laki-Laki	76,49	76,43	77,66	1,17			0,67
- Perempuan	53,52	52,23	53,71	0,19			-1,24

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2022

Berdasarkan kabupaten/kota TPT tertinggi di tahun 2022 terjadi di Kota Ambon sebesar 11,67%, Kota Tual sebesar 8,71% dan Maluku Tengah sebesar 6,78%. Sementara yang terendah terjadi pada Kabupaten Kepulauan Buru Selatan sebesar 0,98%. Lebih lanjut lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.14**  
**Persentase Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2022**

Kabupaten/Kota	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021	Perubahan Ags 2021–Ags 2022
Maluku Tenggara Barat	4,51	4,40	4,43	-0,11	-0,07
Maluku Tenggara	4,95	5,06	5,74	0,11	0,68
Maluku Tengah	7,93	8,07	6,78	0,14	-1,3
Buru	6,28	4,85	4,99	-1,42	0,1
Kepulauan Aru	3,83	1,55	2,10	-2,28	0,55
Seram Bagian Barat	5,47	5,65	5,45	0,18	0,20
Seram Bagian Timur	3,61	3,88	3,38	0,27	-0,50
Maluku Barat Daya	3,60	1,80	2,47	-1,80	0,67
Buru Selatan	2,31	1,63	0,98	-0,68	-0,65
Ambon	12,84	11,32	11,67	-1,52	0,35
Tual	8,70	8,71	9,07	0,01	0,36
<b>Total</b>	<b>7,57</b>	<b>6,93</b>	<b>6,88</b>	<b>-0,64</b>	<b>-0,05</b>

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2022

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) pengangguran karena COVID-19; (2) bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; (3) sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja, untuk lebih jelas lihat pada table berikut :

**Tabel. 2.15**  
**Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia kerja**

Komponen	Total		
	2020	2021	2022
Pengangguran Karena Covid-19	7.768	7.492	2.236
BAK Karena Covid-19	2.151	1.654	781
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	14.150	6.530	617
Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja ( <i>shorter hours</i> ) karena Covid-19	172.439	112.002	10.754
<b>TOTAL</b>	<b>196.508</b>	<b>127.678</b>	<b>14.388</b>
<b>Penduduk Usia Kerja (PUK)</b>	<b>1.289.637</b>	<b>1.308.543</b>	<b>1.326.840</b>
<b>Persentase terhadap PUK</b>	<b>15,24</b>	<b>9,76</b>	<b>1,08</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

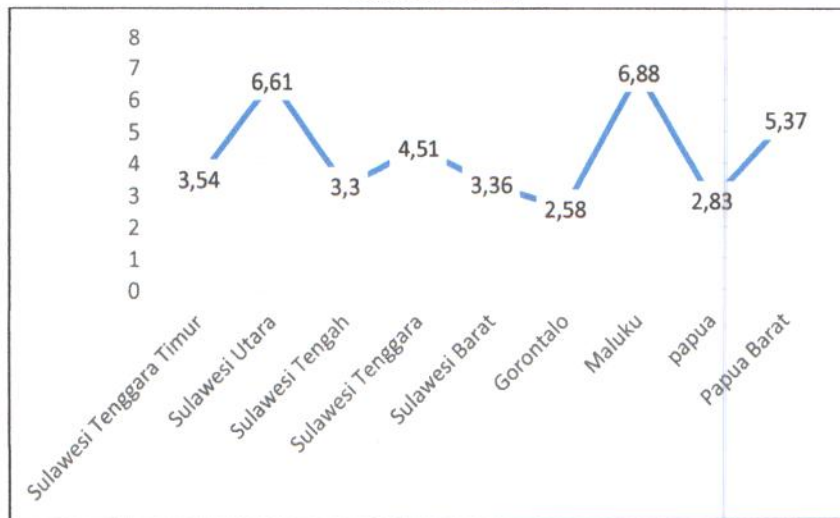
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) pengangguran karena COVID-19; (2) bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; (3) sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.

Dari tabel di atas dapat dilihat Penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 ditahun 2022 yaitu Sebesar 14.388 Sementara pada tahun 2022 penduduk yang bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan yakni dari 6.530 orang, sementara penduduk yang tidak

bekerja karena Covid sebesar 617 orang. Dan Jumlah penganggur karena covid-19 juga menurun sebanyak 2.236.

Bila disandingkan dengan provinsi setara di wilayah timur, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku tertinggi yaitu 6,88 kedua yaitu Sulawesi Utara sebesar 6,61, sementara provinsi dengan TPT terendah yakni Gorontalo dengan capaian sebesar 2,58 %. Gambaran TPT provinsi Maluku dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah timur terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.12**  
**Perbandingan Capaian TPT Maluku dan Provinsi setara Tahun 2022**



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

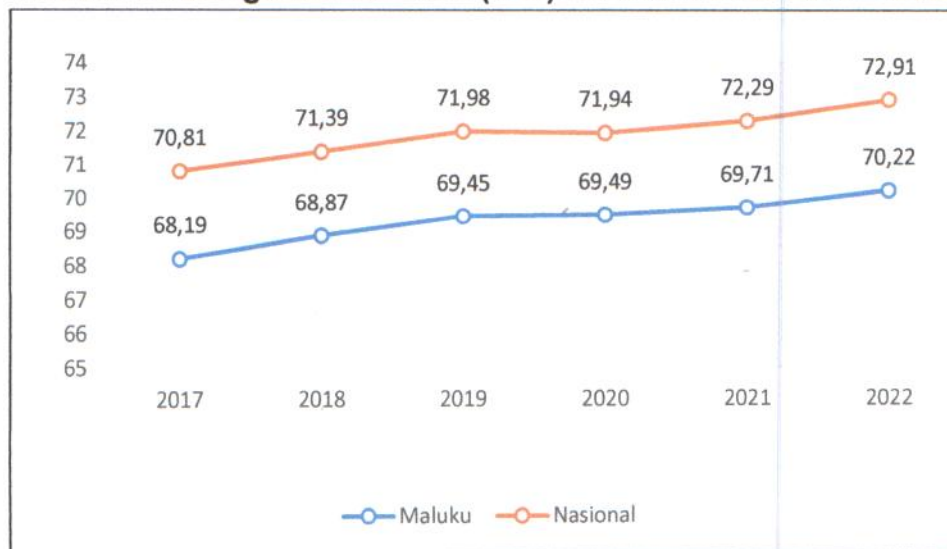
### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia mengalami perbaikan, dimana sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat dari dampak Pandemi covid-19. Seiring dengan upaya-upaya pemerintah melakukan perbaikan atau pemulihan terhadap ekonomi nasional dan daerah, IPM Provinsi Maluku juga bergerak pada arah yang sama.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Maluku tahun 2022 Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Maluku terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2010, status pembangunan manusia Maluku stagnan pada level "sedang". Namun pada tahun 2022, status perkembangan IPM telah naik ke status "tinggi". Selama 2010-2022 IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar

0,74 persen per tahun, dari 64,27 pada tahun 2010 menjadi 70,22 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Maluku sudah kembali membaik dimulai semenjak tahun lalu seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

**Gambar 2.13**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tahun 2017 – 2022**



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Peningkatan pencapaian IPM ditahun 2022 tentunya di kontribusikan dari komponen pendukungnya yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur harapan hidup saat lahir (UHH) tahun 2022 sebesar 66.45 Sementara harapan lama sekolah (HLS) ditahun 2022 sebesar 14,00 meningkat sebesar 0.03 dari tahun 2021, hal yang sama terjadi pada Rata-rata lama sekolah (RLS) dari 10,03 tahun 2021, meningkat menjadi 10.19 di tahun 2022 atau lebih lama 0,16 tahun. Sementara untuk rata-rata pengeluaran riil per kapita mengalami peningkatan sebesar 0,106 persen dari tahun 2021, yakni 8,770 juta pertahun menjadi 8.876 per tahun. Keseleruhan dari kemajuan komponen pada IPM tergambar sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel.16**  
**Perkembangan IPM Maluku menurut Komponen Tahun 2017 – 2022**

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	65,40	65,59	65,82	65,98	66,09	66,45
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,91	13,92	13,94	13,96	13,97	14,00
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,58	9,81	9,93	10,03	10,19
Pengeluaran per kapita	Rp 000	8.433	8.721	8.887	8.732	8.770	8.876
<b>IPM</b>		<b>68,19</b>	<b>68,87</b>	<b>69,45</b>	<b>69,49</b>	<b>69,71</b>	<b>70,22</b>
<b>Pertumbuhan IPM</b>	<b>%</b>	<b>0,81</b>	<b>0,87</b>	<b>0,99</b>	<b>0,84</b>	<b>0,22</b>	<b>0,51</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Hasil perhitungan IPM di Provinsi Maluku dengan menggunakan penghitungan metode baru, pada tahun 2022 70,22 dan termasuk dalam kategori Sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IPM dengan nasional IPM Provinsi Maluku berada dibawah pencapaian IPM Nasional.

Sementara komponen IPM baik dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi standart hidup layak berdasarkan kabupaten/kota di tahun 2022 Kota Ambon memiliki memiliki pencapaian yang tinggi kemudian kabupaten Maluku Tengah serta Kabupaten Buru. Pencapaian terendah oleh Kabupaten Maluku Barat Daya. Gambaran pencapaian komponen IPM Tahun 2020 – 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel.17**  
**Perkembangan IPM menurut Komponen Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022**

Provinsi/Kabupaten /Kota	IPM		Perkembangan Komponen IPM (2022)			
	2021	2022	UHH	HLS	RLS	PENGELUARAN (Ribu Rupiah)
Kepulauan Tanimbar	62.97	63,45	66,73	12,32	9,77	6473
Maluku Tenggara	66.33	66,88	65,46	12,89	9,78	7795
Maluku Tengah	71.32	71,81	63,73	14,28	9,76	10406
Buru	69.33	69,94	66,72	13,22	8,99	10414
Kepulauan Aru	63.83	64,21	62,25	12,33	8,87	7733

Provinsi/Kabupaten /Kota	IPM		Perkembangan Komponen IPM (2022)			
	2021	2022	UHH	HLS	RLS	PENGELUARAN (Ribu Rupiah)
Seram Bagian Barat	65.83	66,67	63,29	13,58	9,24	8890
Seram Bagian Timur	64.30	65,05	60,06	12,9	8,71	9591
Maluku Barat Daya	62.37	63,07	62,98	12,52	8,77	7010
Buru Selatan	64.80	65,37	66,69	12,83	8,06	7716
Kota Ambon	81.23	81,63	71	16,05	12,21	14405
Kota Tual	68.16	68,6	66,16	13,99	10,54	7519
<b>MALUKU</b>	<b>69.71</b>	<b>70,22</b>	<b>66.45</b>	<b>14,00</b>	<b>10.19</b>	<b>8876</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>72.29</b>	<b>72,91</b>	<b>71.57</b>	<b>13,10</b>	<b>8.69</b>	<b>11 479</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Masyarakat Maluku telah berkembang menjadi masyarakat yang heterogen dan multikultur, dimana kondisi ini menciptakan masyarakat Maluku yang lebih terbuka baik, baik dari sisi komunikasi atau bahkan menerima pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah di Maluku, hetrogenitas dan multikultural yang dimiliki menjadi Maluku memiliki banyak keanekaragaman Budaya yang menjadi kekayaan daerah

Sementara itu terkait olahraga upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga terus dilakukan dengan berbagai dukungan baik untuk pembinaan atlet dan bahkan penguatan sarana dan prasana olahraga.

**Tabel. 2.18**  
**Capaian Seni dan Budaya Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			2022	
			2019	2020	2021	Target	Capaian
<b>Kebudayaan</b>							
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Cagar Budaya	63	64	65	65	14
<b>Olahraga</b>							
3	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	24	6	28	35	5
4	Jumlah Cabor yang	Cabor	7	17	19	14	17

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			2022	
			2019	2020	2021	Target	Capaian
	dibina dalam masyarakat						
5	Presentase Tenaga/Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi	Persen	38,7	40,73	42,4	73	67,79
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Memadai	Unit	375	375	298	302	301

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Pemuda Olahraga, 2023

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan, berdasarkan undang-undang layanan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan dan urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, sedangkan untuk layanan urusan pemerintahan pilihan daerah meliputi 8 (delapan) urusan.

#### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2019 - 2022, yang menggambarkan pencapaian RPJMD Provinsi Maluku 2019 – 2024. Gambaran capaian 2019 – 2022 menunjukkan terjadinya kemajuan atau peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

### 2.3.1.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

**Tabel 2.19**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pendidikan</b>							
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat		96.9	97.14	97.58	98.56	79,03
2	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100	100	-
3	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1:18	1:19	1:20	1:20	1:20

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan, 2023

Urusan Wajib Pendidikan diukur menggunakan 3 indikator yakni angka partisipasi sekolah SMA Sederajat, angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, dan rasio guru terhadap murid pendidikan menengah, yang tertera pada tabel di atas.

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah yang bersekolah dengan pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Semakin tinggi APS semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dilihat dari capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2019-2021 mengalami peningkatan tiap tahun sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA tahun 2019-2021 mencapai realisasi target yang sangat baik, namun untuk tahun 2022 belum ada realisasi capaian karena hasil assesment belum dirilis oleh Kemendikbud.

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah telah mencapai target yaitu 1:20, dari rasio tersebut dapat disampaikan bahwa untuk ketersediaan guru terhadap murid pendidikan menengah dengan perbandingan tersebut telah dapat terpenuhi.

#### 2.3.1.1.2. Urusan Wajib Kesehatan

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan layanan dasar kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas tersebut dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Peningkatan

layanan kesehatan yang dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan kepada tindakan promotif dan preventif sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Tahun 2022 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja pada urusan kesehatan dengan berdasar pada RPJMD Perubahan Tahun 2019 – 2024. Adapun indikator kinerja pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.20**  
**Capaian Kineja Urusan Kesehatan Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Kesehatan</b>							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	6	6	6	6	7
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	7	6	1	7	8
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	4	3	5	4	6
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	132	149	63 jumlah kematian ibu	123	62 jumlah kematian ibu
5	Cakupan Penanganan komplikasi kebidanan	%	30,73	25	32	45	3,45
6	Persalina di fasilitas kesehatan (PF)	%	45	38	66,03	54	58,38
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	66,9	42,9	56,8	72,5	66
8	AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	14	> 2	> 2	> 2	> 2
9	Temuan Kasus TB Baru	%	61	11	38,2	80	47,4
10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0,3
12	Jumlah puskesmas pembantu dengan luas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah	554	497	497	530	458
13	Jumlah puskesmas dengan luas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah	225	236	222	275	228
14	Cakupan Pelayanan ANC (6 kali)	%	68,28	72	77,51	79	34,34

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
15	Cakupan pelayanan nifas	%	63,52	57	53,83	75	78,7
16	Cakupan penanganan komplikasi neonatal	%	30,27	23	1,32	35	2,23
17	Cakupan Kunjungan balita	%	37	56	9,36	55	75,36
18	Cakupan puskesmas mampu melaksanakan penjangkauan kesehatan anak usia sekolah	%	70	67	39,74	79	78,14
19	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
20	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes	%	60	58,82	63,74	85	55,44
21	Krisis Kesehatan	%	100	100	100	100	100
22	Cakupan Asi Eksklusif	%	25	76,9	49,9	56	46
23	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	66,9	42,9	56,8	94	66
24	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madya	Jumlah	34	89	89	148	158
25	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	8,5	5,7	4,8	7	4,9
26	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengendalian konsumsi rokok pada penduduk 10 - 18 tahun	Jumlah	NA	NA	NA	7	7
27	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	%	63	57	78,17	69	78,7
28	Prevalensi Balita Stunting	%	23	15	10,2	23	8,3
29	Annual Paracite Incidence (API)	%	1,02	0,47	0,39	1,2	0,64
30	Slide Postivity Rate (SPR)	%	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
31	Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Program ISPA sesuai Standar	%	NA	30,1	27,27	65	18,18
32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional	%	23	26	21	27	19,8

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
33	Persentase ODHA yang Mendapat Pengobatan ARV	%	31	211	40	55	56,55
34	Prevalensi Ibu Hamil Anemia	%	22,27	55,5	34,18	18	14,51
35	Ketersediaan Obat dan Vaksin	%	95	92	93	93	94
36	Sistem Kewaspadaan Dini	%	53,2	87,1	87,2	80	95
37	Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan screening PTM Prioritas	Jumlah	NA	NA	NA	45	5,15
38	Persentase penyandang hipertensi yang Tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Jumlah	NA	NA	NA	43	NA
39	Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Jumlah	NA	NA	NA	36	NA
40	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM di $\geq 80$ % puskesmas	Jumlah	NA	NA	NA	7	2
41	Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	%	55	65	40	70	63,72
42	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak	%	18	22	41,68	24	11,45
43	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	NA	39	18,6	11	9
44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	%	55	18	25,5	80	45,49
45	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,9	0,2	0,7	0,8	0,7
46	Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita	%	61	82	73	82	73,95
47	Cakupan Pelayanan Balita (D/S)	%	55	58	52	69	67,2
48	Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori	%	18,5	26,4	15	16	16,2

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
49	Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium	%	64	76,9	73,62	83	71,41
50	Campak Dosis Kedua	%	45,7	60,2	43	61,9	73,6
51	Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama	Jumlah	0	2	2	5	3
52	Rasio dokter dengan penduduk	per satuan penduduk	15	32,9	25	37	40
53	Rasio Dokter Spesialis dengan Penduduk	per satuan penduduk	5	8,7	11	8	11
54	Rasio Dokter Gigi dengan Penduduk	per satuan penduduk	2,65	4,2	4	13	4
55	Rasio Bidan dengan Penduduk	per satuan penduduk	78	133,6	141	97	141
56	Rasio Perawat dengan Penduduk	per satuan penduduk	217	329,8	345	225	345
57	Rasio Apoteker dengan Penduduk	per satuan penduduk	14,88	12,9	17	17	17
58	Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan Penduduk	per satuan penduduk	24	32,3	45	37	45
59	Penggunaan Obat Generik di Puskesmas	%	95	96	97	97	98
60	Penggunaan Obat Generik di Rumah Sakit	%	67	72	74	74	76
61	Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap	%	32	38	35	40	43
62	Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	%	45	48	50	50	52,5
63	Penggunaan Obat Rasional	%	70	73	69	76	76

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2023

Permasalahan mengenai indikator urusan kesehatan yang belum tercapai dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup  
Target 6 dan realisasi 7 per 1000 kelahiran hidup bayi. Dengan permasalahan karena akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) mampu PONE yang minim dan distribusi tenaga kesehatan tidak

merata sehingga ketika keadaan darurat tenaga kesehatan tidak ada di fasyankes sehingga harus dirujuk ke PKM yang lain.

2. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup,  
Belum tercapainya target hal ini disebabkan akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) mampu PONEC yang minim dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata sehingga ketika keadaan darurat tenaga kesehatan tidak ada di fasyankes sehingga harus dirujuk ke PKM yang lain.
3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup  
Target dari indikator ini belum tercapai karena penguatan terhadap petugas kesehatan baik dokter maupun bidan serta penguatan sarana prasarana pada fasilitas kesehatan belum optimal.
4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup  
Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 tidak dapat dihitung Karena Jumlah Kelahiran Hidup di Maluku belum mencapai 100.000.
5. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan  
Karena kasus komplikasi yang terjadi tidak sebanyak target yang ditetapkan (indikator ini merupakan indikator negatif sehingga apabila capaiannya kecil menandakan kasusnya menurun/positif)
6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization (UCI)  
Pelayanan imunisasi kepada sasaran belum dilakukan secara optimal, kegiatan peningkatan cakupan baik sweeping, DOFU, BLF, SOS tidak dilakukan secara optimal, kurangnya analisis dan tindak lanjut oleh petugas terhadap hasil pelayanan yang telah dicapai, masih ada pemahaman yang keliru dari masyarakat terhadap dampak pemberian vaksiansi dan kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan program imunisasi di Provinsi, Kab/Kota.
7. AFP Rate per 100.000 Penduduk  
Petugas kurang proaktif dalam melakukan surveilans aktif rumah sakit, tidak ada anggaran untuk pengiriman spesimen ke provinsi

8. Temuan Kasus TB Baru  
Data kasus yang belum diinput oleh sebagian faskes dikarenakan jejaring yang tidak stabil atau server yang bermasalah dan ada petugas yang belum terlatih, 88% faskes belum melakukan kontak serumah untuk mencari terduga TB dan melaporkan di SITB, rendahnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan TB di Prov.Kab.Kota, dan jejaring lintas program dan lintas sektor yang belum maksimal.
9. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi  
Maluku belum melakukan survei HIV AIDS di semua Kab/Kota sehingga capaian mengikuti pusat (0,3% tahun 2021)
10. Jumlah puskesmas pembantu dengan luas wilayah administrasi pemerintahan  
Belum tercapainya target disebabkan karena berkurangnya jumlah puskesmas pembantu yaitu terdapat 6 puskesmas pembantu yang ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dan izin operasional daerah yaitu pada Kab. Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Buru Selatan
11. Jumlah puskesmas dengan luas wilayah administrasi pemerintahan  
Adanya puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Pratama dan beberapa puskesmas yang belum registrasi.
12. Cakupan pelayanan nifas  
Masih belum tercapainya target Hal ini disebabkan karena kunjungan nifas pertama (6—42 jam) dan kunjungan neonatus pertama (6-48 jam) masih dijalankan secara terpisah, dengan demikian perlu dipadukan antara kunjungan nifas dan kunjungan neonates
13. Cakupan penanganan komplikasi neonatal  
Karena kasus komplikasi yang terjadi sedikit sehingga penanganannya juga sedikit
14. Cakupan puskesmas mampu melaksanakan penjangkaran kesehatan anak usia sekolah karena puskesmas sibuk dengan pencapaian vaksinasi covid

15. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
16. Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes  
Distribusi SPA ke fasyankes terlambat (dana DAK), pengelola data ASPAK terlambat menginput SPA
17. Cakupan Asi Eksklusif  
Kurangya pemberian edukasi terhadap ibu hamil terkait pemberian ASI Eksklusif, Sebagian besar petugas kesehatan yang menolong persalinan belum melakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini) secara optimal, Pelaksanaan PP 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif belum terlaksana dengan baik, di pelayanan kesehatan masih tersedia susu formula belum adanya perda yang mendukung terkait pemberian ASI Eksklusif.
18. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap  
Pelayanan imunisasi kepada sasaran belum dilakukan secara optimal, kegiatan peningkatan cakupan baik sweeping, DOFU, BLF, SOS tidak dilakukan secara optimal, kurangny analisis dan tindak lanjut oleh petugas terhadap hasil pelayanan yang telah dicapai, masih ada pemahaman yang keliru dari masyarakat terhadap dampak pemberian vaksinansi dan kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan program imunisasi di Provinsi, Kab/Kota
19. Prevalensi Balita Gizi Kurang  
Balita tidak melakukan kunjungan ke posyandu dikarenakan di bawa oleh orang tuanya ke tempat orang tuanya bekerja sehingga tidak terpantau pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut, Sebagian besar balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap tidak datang kembali ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, Kurangya ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, Sebagian besar petugas penginput data aplikasi e-PPGBM adalah pegawai honorer yang belum di latih untuk menggunakan

aplikasi e-PPGBM, Petugas yang sudah dilatih pindah , Penginputan data ke dalam aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang belum maksimal (penginputan data 62,20/ ), Sarana yang tidak mendukung (tidak ada Laptop).

20. Prevalensi Balita Stunting

Kurangnya ketaatan pada pola asuh, pola makan dan sanitasi oleh orang tua, Balita tidak melakukan kunjungan ke posyandu dikarenakan di bawa oleh orang tuanya ke tempat orang tuanya bekerja sehingga tidak terpantau pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut, Sebagian besar balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap tidak datang kembali ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, Kurangnya ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang. Sebagian besar petugas penginput data aplikasi e-PPGBM adalah pegawai honorer yang belum di latih untuk menggunakan aplikasi e-PPGBM, Petugas yang sudah dilatih pindah , Penginputan data ke dalam aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang belum maksimal (penginputan data 62,2%), Sarana yang tidak mendukung (tidak ada Laptop)

21. Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Program ISPA sesuai Standar

Belum semua Puskesmas melaksanakan MTBS

22. Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Tidak ada dana di Puskesmas untuk kegiatan kestrad sehingga kestrad dianggap sebagai program yang kurang di promosikan, nakes terlatih mengalami mutasi

23. Prevalensi Ibu Hamil Anemia

Tidak tersedianya alat ukur Hb di puskesmas sehingga sebagian besar ibu hamil tidak dilakukannya pemeriksaan Hb, Masih banyak ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan atau memeriksakan kehamilannya di puskesmas sehingga

- petugas kesehatan (pemegang program gizi dan bidan) tidak bisa memberikan edukasi terkait konsumsi tablet tambah darah (Fe)
24. Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja  
Karena puskesmas sibuk dengan pencapaian vaksinasi covid
  25. Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak  
Belum adanya penguatan terkait pelayanan KTPA di kabupaten kota oleh kementerian kesehatan
  26. Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa  
Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil dalam melaksanakan layanan jiwa jika dibandingkan dengan luas wilayah prioritas dan besarnya populasi berisiko, masih adanya stigma terkait masalah kesehatan jiwa serta tidak tersedianya anggaran di kab/kota untuk pengendalian terakit masalah kesehatan jiwa dan NAPZA
  27. Petugas kurang memahami DO dan belum semua PKM melaksanakan pelayanan kesehatan usia lanjut
  28. Prevalensi Balita Gizi Buruk  
Balita tidak melakukan kunjungan ke posyandu dikarenakan di bawa oleh orang tuanya ke tempat orang tuanya bekerja sehingga tidak terpantau pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut, Sebagian besar balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap tidak datang kembali ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, Kurangnya ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, Sebagian besar petugas penginput data aplikasi e-PPGBM adalah pegawai honorer yang belum di latih untuk menggunakan aplikasi e-PPGBM, Petugas yang sudah dilatih pindah, Penginputan data ke dalam aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang belum maksimal (penginputan data 62,2%), Sarana yang tidak mendukung (tidak ada Laptop), Adanya pulang paksa oleh keluarga gizi buruk

29. Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita  
kurangnya ketersediaan vitamin A biru (dosis 100.000 IU) untuk usia 6-11 bulan, pada saat dilakukan sweeping tidak semua balita berada di rumah
30. Cakupan Pelayanan Balita (D/S)  
Jika bayi sudah mendapat imunisasi lengkap (11 bulan) orang tua sudah tidak ingin membawa anaknya lagi ke posyandu atau puskesmas untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, Kurangnya dorongan oleh pemdes untuk ibu membawa balitanya ke posyandu sehingga perlu adanya partisipasi dari tokoh masyarakat desa
31. Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori  
Banyak nya ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan atau memeriksakan kehamilannya di puskesmas sehingga petugas kesehatan (pemegang program gizi dan bidan) tidak dapat memberikan edukasi dan tidak dapat memberikan MT (Makanan Tambahan) kepada bumil KEK. tidak semua bumil kek mendapat MT dikarenakan kurangnya ketersediaan MT, MT yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada ibu hamil KEK dikonsumsi juga oleh anggota keluarga lainnya sehingga tidak mencukupi kebutuhan gizi bumil KEK
32. Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium  
Adanya kabupaten yang tidak melakukan pemeriksaan atau survei garam beryodium karena tidak tersedianya iodina tes, iodina tes tidak banyak tersedia di apotek, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan garam beryodium
33. Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama  
Tahun 2022, hanya 3 RS yang melakukan Akreditasi (RSKD, RS Latumeten & RSUP Leimena)
34. Rasio Dokter Gigi dengan Penduduk  
Kurangnya ketersediaan dokter gigi dan kurangnya peminat di Provinsi Maluku

### 2.3.1.1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel 2.21**  
**Capaian Kinerja Urusan PUPR Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	0	10	20	50	75
2	Akses Air Minum Layak	%	0	86.74	87.00	87.26	89,44
3	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	-	0	0%	0%	0%	0%
4	Capaian Sanitasi	Meter	0	11218	1213	923	2044
5	Presentase Kemantapan Jalan	%	46.06	60.58	61.37	62.37	55.88
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	-	70%	70%	70%	70%	71%
7	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Tata Ruang Pusat, provinsi dan kabupaten/kota	%	100	100	73	80.3	100
8	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dapat dilayani jaringan irigasi	%	42.27	42.27	42.27	42,50	42,85

Sumber: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, 2023

Indikator kinerja persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota sampai dengan tahun 2022 mencapai 75 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan yaitu sebesar 50 persen dengan rincian dari total 8750 KK di daerah perbatasan kab/kota yang harus dilayani, sebanyak 6600 KK sudah terlayani dan sisanya 2150 KK yang

belum terlayani.

Akses air minum layak Provinsi Maluku juga mengalami peningkatan untuk tahun 2022 yaitu mencapai 89,44 persen dan melebihi dari target yang ditetapkan. Tercapainya indikator ini tidak lepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik serta dukungan dari layanan kabupaten/kota.

Indikator kinerja rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional tidak ada realisasi karena kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk indikator capaian sanitasi Provinsi Maluku Tahun 2022 telah tercapai sebesar 2.044 meter dari target 923 meter, sedangkan pada indikator persentase kemantapan jalan tahun 2022 belum mencapai dari target sebesar 62,37 persen dengan realisasi 55,88 persen ini disebabkan karena bencana alam yang terjadi ditahun 2022. Sementara untuk indikator Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli, indikator Tingkat Kesesuaian Perencanaan Tata Ruang Pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dapat dilayani jaringan telah mencapai target untuk Tahun 2022, hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Provinsi Maluku melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **2.3.1.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Tahun 2022 untuk urusan Perumahan Rakyat terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai diantaranya cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan target 100 persen dan realisasi sebesar 74,39 persen ini disebabkan karena masih banyaknya rumah tidak layak huni dan naiknya harga material bangunan. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan realisasi 100 persen sampai dengan tahun 2022. Sedangkan indikator Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni belum ada realisasi karena belum ada program pemerintah yang mengharuskan relokasi dan ciri khas masyarakat timur yang susah untuk berpindah dari lokasi asalnya.

Persentase luas kawasan kumuh 10–15 ha yang ditangani realisasi sebesar 68,21 persen dari target 100 persen dengan permasalahan yang muncul pada tahun 2022 terkait dengan kawasan permukiman lebih di fokuskan ke masalah pembebasan lahan dan batas tanah antara warga dengan tanah milik pemerintah. Itulah kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan permukiman khususnya pada dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Maluku. Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan realisasi capaian 13,12 persen. Capaian indikator urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.22**  
**Capaian Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2019 - 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Perumahan Rakyat</b>							
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	100	100	100	100	74.39
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	%	100	100	100	100	-
4	Persentase luas kawasan kumuh 10 – 15 ha yang ditangani	%	100	100	100	100	68.21
5	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	0.41%	0.41%	0.47%	0.53%	13,12%

Sumber: Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku, 2023

#### **2.3.1.1.5. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Indikator Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2022 yaitu persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan. Kehidupan beragama di Provinsi Maluku sangat dinamis, hal ini merupakan salah satu potensi besar dalam keberagaman yang dimiliki.

Persentase penanganan tanggap darurat bencana di Provinsi Maluku Tahun 2022 mencapai target yang diharapkan. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi Maluku merupakan kawasan yang rawan terjadinya bencana diantaranya gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.

Dalam hal penanganan bencana, pencapaiannya yang diukur dengan Indeks risiko bencana di daerah yang mampu dijaga pencapaiannya sampai tahun 2022. Gambaran urusan ini tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.23**  
**Capaian Pembangunan Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	84.23	69.77	100	100	100
3	Indeks risiko bencana di daerah	Indeks	160.35	160.35	160.84	160.15	162.47

Sumber: Kesbang Pol, Satpol PP dan BPBD Provinsi Maluku, 2022

#### 2.3.1.1.6. Bidang Urusan Sosial

Capaian pembangunan dibidang sosial mengalami perkembangan yang baik, terlihat dari pencapaian indikator yang diukur terkait keberhasilan pada bidang sosial sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.24**  
**Capaian Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Sosial</b>							
1	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	100
4	Presentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100	100	100	100	100
5	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100	100	100	100	100
6	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	%	100	100	100	100	100
7	Presentase cakupan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
	NAPZA						
8	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	%	100	100	100	100	100
9	Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial	%	100	100	100	100	100
10	cakupan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 10 indikator pengukur urusan sosial mencapai target yang ditentukan dari tahun 2019-2022. Perkembangan masalah kesejahteraan sosial berjalan seiring dengan lajunya pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan yang mana telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dibidang sosial lebih difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang rentan dan mengalami masalah sosial yang dikenal dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

### 2.3.1.2. Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Gambaran terkait capaian pembangunan urusan tenaga kerja tersaji pada tabel berikut. Pertumbuhan tenaga kerja yang bersertifikat berbasis kompetensi mengalami penurunan pada tahun lalu. Capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup jauh jika dibandingkan dengan target pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya jumlah jenis pelatihan, instruktur dan dukungan anggaran pada Dinas Nakertrans sehingga berdampak pada rendahnya jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

Presentase penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) juga belum mencapai realisasi pada tahun 2022 disebabkan karena Belum Semua Kabupaten/Kota merancang Program/Kegiatan untuk penyusunan RTK, namun sudah dilakukan pembinaan oleh Kemenaker (11 Kab/Kota).

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dari 8,00 menjadi 2,43, dapat ditinjau dari

Lowongan Pekerjaan yang tersedia pada pasar kerja belum semua terpenuhi dikarenakan kualifikasi pencari kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar.

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mengalami kenaikan dari tahun 2021, namun belum mencapai target untuk tahun 2022. Hal ini disebabkan masih banyak perusahaan yang belum pada dinas terkait.

Berdasarkan 5 indikator kinerja daerah bidang tenaga kerja, belum terdapat indikator yang mencapai target pada tahun 2022. Seperti indikator persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Indikator ini juga tidak mencapai target tahun 2022 disebabkan masih kurangnya SDM (Personil ASN) JFT Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan.

**Tabel 2.25**  
**Capaian Urusan Tenaga Kerja Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Tenaga Kerja</b>							
1	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	0	20	20	60	54,54
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,53	0,53	1,53	2,53	0,18
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	6,30	6,30	8,00	8,20	2,43
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,97	0,97	5,7	7,9	7,6
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang- undangan Bidang Ketenagakerjaan	%	36,58	36,58	39,90	45	22,5

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.1.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju

kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DP, partisipasi perempuan dilembaga swasta, persentase ARG pada belanja langsung APBD, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di Sektor Non Pertanian, besarnya rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Sedangkan untuk pembangunan dibidang anak diukur melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan rasio kekerasan terhadap anak.

Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualifikasi kab/kota layak anak mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Jika dilihat pada tahun 2022, dengan target 45,45% hanya tercapai 18,18%. Hal yang menyebabkan capaiannya belum mencapai target yakni kurang SDM, kurangnya anggaran dan kurangnya sarana prasarana.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Maluku mengalami penurunan setiap tahunnya bahkan angka penurunan pada tahun 2022 dibawah target yang ditetapkan. Sedangkan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 17%. Masih banyak kasus yang terjadi tetapi masih sedikit masyarakat yang melapor. Banyak faktor yang memicu kekerasan dalam rumah tangga tetapi faktor yang utama adalah ekonomi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemic covid kemarin masih sangat berpengaruh, kurangnya edukasi terkait KDRT dan cara korban untuk melaporkan hal tersebut.

Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada tahun 2022, hal disebabkan belum adanya tenaga kesehatan terlatih di puskesmas maupun tatalaksana KTP atau PPT/PKT di RS. Daerah yang menangani terkait korban kekerasan terhadap perempuan.

Sementara tingkat partisipasi perempuan baik dibidang politik yang diukur melalui partisipasi perempuan pada legislatif dan juga dilembaga

pemerintahan melebihi target yang ditetapkan. Kenaikan atas pencapaian ini didorong dari makin terbukanya akses-akses bagi perempuan dibidang politik melalui pola-pola rekrutmen partai dan juga kesadaran diri perempuan untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Adapun permasalahan terkait persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR yang tidak mencapai target tahun 2022 disebabkan masih rendahnya minat perempuan untuk terjun diarel publik maupun politik. Selain itu, persentase ARG pada belanja langsung APBD tidak mencapai target pada tahun 2022 disebabkan kurang komitmen Pimpinan OPD terhadap PUG dan masih kurang 14 OPD yang belum dilatih PPRG sehingga sangat sulit untuk menganalisis ARG dengan analisis GAP dan GBS.

Realisasi indikator kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di Sektor Non Pertanian mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021 sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan belum membaiknya sektor industri rumahan.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu, Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, dan Persentase keluarga sejahtera melebihi target diwujudkan melalui upaya-upaya sosialisasi dan pembuka layanan aduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitas Sosial Terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan target. Rehabilitasi sosial yang selama ini dilakukan oleh dinas dengan menggunakan Rumah Aman yang dimiliki oleh Yayasan sosial sehingga

dalam pemantauannya dirasa belum optimal dan belum adanya panti sosial karya wanita yang memiliki program layanan sosial.

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021 dan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2022 dengan layanan pemulangan hanya diberikan kepada perempuan korban kekerasan terhadap TPPI (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Sama halnya dengan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan mengalami penurunan dari target karena kurangnya sinergitas layanan terintegrasi. Sedangkan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan korban kekerasan mengalami penurunan dari target disebabkan belum optimalnya layanan pemulangan terpadu antara stakeholder terkait dan lembaga pemerhati perempuan.

Rasio kekerasan terhadap anak tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan dari target. Naiknya karena terbukanya akses/tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Gambaran terkait pencapaian urusan ini tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak**  
**Di Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	0	0	0	0	7,75
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	30	26,75	26,85	27,05	23,26
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	20	20	30	45	32,52
4	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	0	41	43	45	53,33
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	0	40	42	44	40,63
6	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	%	0	20	21	22	5,7
7	Rasio KDRT	%	0,38	0,38	0,37	0,36	0,01
8	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit	%	0	12	15	18	55

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
	pelayanan terpadu						
9	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	0	50	55	60	39
10	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	0	50	55	60	0,4
11	Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	0	0	0	0	89
12	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	0	30	35	40	45
13	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	0	24	26	28	24
14	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	0	25	25	30	0,4
15	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	0	2%	2%	2%	19
16	Persentase Keluarga Sejahtera	%		50	53	55	63,01
17	Cakupan kab/kota yang mengelola sistem data gender dan anak	%	100	0	82	82	82
18	Presentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100	18,18	27,27	45,45	18,18
19	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	50	30	35	40	55
20	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	50	30	35	40	8,23
21	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	30	45	60	2
22	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	2,73	0	0	0	3,93

Sumber: DP3A Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.1.2.3. Bidang Urusan Pangan

Ketahanan pangan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat khususnya bahan-bahan pokok untuk dikonsumsi karena pangan merupakan kebutuhan pada masyarakat, dengan aspek ketahanan pangan yang terdiri dari ketersediaan, akses, penyerapan pangan dan stabilitas pangan.

**Tabel 2.27**  
**Capaian Urusan Pangan di Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pangan</b>							
1	Cadangan pangan pemerintah daerah	Ton	8.01	9.95	0	11	15
2	Skor pola pangan harapan konsumsi	Angka	0	67,3	70%	70%	70,7
3	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu	%	46	55	57,5	70	70,58
4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	0	0	0	0	48,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, 2023

Urusan pangan di Provinsi Maluku yang berkaitan dengan cadangan pangan pemerintah daerah, pola pangan harapan konsumsi, persentase pengawasan pangan segar yang aman dan bermutu dan persentase daerah rentan rawan pangan. Berdasarkan realisasi tahun 2022, seluruh indikator kinerja daerah bidang pangan sudah mencapai target bahkan melebihi target. Namun masih ada daerah yang termasuk rentan rawan pangan, hal ini dapat berdampak pada tingkat pendidikan menurun, kualitas pangan menurun, meningkatnya gizi buruk, rendahnya pemanfaatan potensi fisik dan kecemburuan sosial.

### 2.3.1.2.4. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan/hutan dan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

**Tabel 2.28**  
**Capaian Urusan Lingkungan Hidup Di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Lingkungan Hidup</b>							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74.34	76.68	78.23	76.59	77,69
2	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	33.33	33.33	33.33	33.33	77,78

Sumber : DLH Provinsi Maluku, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung dengan 3 (tiga) komponen menunjukkan perkembangan yang baik terkhususnya indeks kualitas udara yang melebihi dari target dan semakin membaik. Sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 78,23% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,54%. Namun penurunan itu tidak berarti pada pencapaian yang melebihi target sebesar 77,69%.

Trend persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diharapkan makin menurun berbanding terbalik dengan capaian target yang makin naik. Hal ini disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut:

- Masih kurangnya ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam dokumen lingkungan
- Masih kurangnya ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap penyampaian laporan pelaksanaan dokumen lingkungan
- Masih kurangnya ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap ketentuan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan LB3
- Belum dikenainya sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran dikarenakan PPLHD

yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku merupakan jabatan hasil penyetaraan serta belum memiliki sertifikat kompetensi PPLHD sehingga penjatuhan sanksi belum dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan PPLHD.

### 2.3.1.2.5. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2019-2022 sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini. Perkembangan indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

**Tabel 2.29**  
**Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Administrasi Kependudukan</b>							
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	0,79	0,91	0,93	0,8	0,84
2	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	0,67	0,82	0,73	0,90	0,82
3	Rasio pasangan ber-Akte Nikah	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	3	3	3	3	3
5	Status Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, 2023

Perkembangan pencapaian indikator Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan. Jika dibandingkan pencapaian indikator ini tahun 2022 dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Namun bila ditinjau dari target indikator pada tahun 2022 sudah mencapai target.

Rasio Pasangan ber-Akte Nikah dan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran juga mengalami peningkatan. Kenaikan capaian ini didorong dengan inovasi-inovasi yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab/kota dengan pelayanan secara online.

Data base kependudukan sebagai data utama untuk bagi kebijakan pembangunan kependudukan di Maluku senantiasa diupayakan kelengkapan

dan ketersediaanya. Data kependudukan senantiasa dilakukan updating yang diwujudkan dengan kegiatan strategis seperti Kota Ambon dengan kegiatan satu dapatnya tiga atau mengurus KTP akan langsung mendapatkan kartu keluarga dengan perbaikan data penduduk yang mengurusinya.

#### 2.3.1.2.6. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa yang disebut dengan klasifikasi status desa yakni desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Untuk meninjau pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dilihat dari peningkatan status desa mandiri dan pengentasan desa tertinggal.

**Tabel 2.30**  
**Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	44,55	44,96	20,57	23,52	23,52
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	65,16	78,79	20,24	23,96	24,20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

Persentase desa mandiri mengalami peningkatan semenjak tahun 2019, dan sampai dengan tahun 2020, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 24,39%. Jika dibandingkan antara tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dari semula 20,57% menjadi 23,52%, dimana pencapaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022.

Pengentasan desa tertinggal di Provinsi Maluku dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 pencapaian indikator ini meningkat dibanding tahun 2021

#### 2.3.1.2.7. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mengsucceskan pembangunan di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan. Oleh karena itu pemerintah mengalakkan program KB (Keluarga Berencana) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk melakukan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditinjau dari persentase pemakaian

kontrasepsi modern, total fertility rate, dan persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter.

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate(mCPR) dan total fertility rate dari tahun 2019-2022 mengalami naik turun. Pada tahun 2022 realisasi 2 indikator ini tidak mencapai target yakni sebesar 34,72% dan 2,52%. Sedangkan Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan, tahun 2022 capaian realisasinya masih menunggu rilis data dari BKKBN.

Gambaran terkait capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Maluku tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.31**  
**Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Tahun 2019-2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	46,9	36,6	45,7	45,99	34,72
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	3,3	3,16	2,91	2,89	2,52
3	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter	%	37,68	38,68	39,68	40,68	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.1.2.8. Bidang Urusan Perhubungan

Tingkat keselamatan transportasi di Provinsi Maluku semakin baik. Hal ini dapat ditinjau dari persentase penurunan angka kecelakaan transportasi. Pada indikator ini dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan drastis. Banyak kecelakaan yang terjadi diakibatkan karena kelalaian pengguna jalan, baik pengendara motor maupun pengemudi mobil yang tidak menaati rambu-rambu lalu lintas.

Sebagai provinsi kepulauan yang dipisahkan dengan lautan maka menjadi penting dimilikinya sarana dan prasarana yang mampu menghubungkan antar wilayah. Salah satunya dengan dimilikinya pelabuhan penyeberangan beserta trayek angkutan penyeberangannya. Persentase pelabuhan penyeberangan yang terbangun, pertumbuhan trayek angkutan penyeberangan,

Persentase pelabuhan laut yang terbangun, dan Pertumbuhan trayek angkutan laut perintis melebihi target pada tahun 2022.

Gambaran terkait tingkat ketercapaian urusan perhubungan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.32**  
**Capaian Urusan Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Perhubungan</b>							
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi	%	22.49	-12.30	16.01	9	-34,11
2	Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan, Presentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis	%	49.18	46.60	47.72	48.83	49,83

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, 2023

#### 2.3.1.2.9. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum mencapai target pada tahun 2022 disebabkan kurangnya bukti dukung pada penerapan kebijakan aspek tata Kelola, perencanaan strategis lainnya, TIK, penyelenggaraan, penerapan manajemen, audit TIK, layanan administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis elektronik, Kurangnya aspek penerapan manajemen SPBE menyebabkan kegiatan manajemen risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana, dan Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam proses penerapan dan penyelenggaraan SPBE. Peran Strategis, Taktis dan Oprasional perlu dipetakan dan diorganisir kembali ke masingmasing OPD sehingga tanggung jawab penerapan SPBE tidak hanya diampu Dinas Kominfo.

Persentase penyelesaian sengketa Tahun 2022 juga mencapai target hal ini karena pada tahun 2022 hanya terdaftar 10 perkara sengketa yang terselesaikan 6 perkara sengketa, tidak terealisasi karena kurangnya anggaran untuk sidang. Sedangkan Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK melebihi target yang semula 50% menjadi 88,8%, namun adapun permasalahan terkait indikator ini yakni:

- Penyediaan akses internet di OPD yang berada pada Kantor Gubernur Maluku dengan kekuatan 100 Mbps belum mencukupi kebutuhan karena banyaknya pengguna layanan tersebut.
- Penyediaan layanan akses internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku belum dapat melayani seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku karena keterbatasan anggaran.

Gambaran terkat capaian urusan komunikasi dan informatika Provinsi Maluku tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 - 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
1.	Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	1,91	0	1,93	3	2,23
2.	Persentase Penyelesaian Sengketa	Persen	100	100	100	100	60
3.	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	Persen	-	32	40,8	50	88,8

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Maluku, 2023

#### **2.3.1.2.10. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat khususnya anggota koperasi dari tahun ke tahun. Nilai tambah pendapatan masyarakat dalam bentuk PDRB koperasi tersebut berasal dari pendapatan koperasi yang berasal dari usaha yang dijalankan oleh koperasi, baik dari usaha simpan pinjam maupun usaha sektor riil seperti pengadaan saprodi pada koperasi produsen, waserda pada koperasi konsumen, pemasaran hasil produksi anggotanya pada koperasi pemasaran dan jasa biro pariwisata, travel pada koperasi jasa dan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan jenis koperasi serta jenis usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar masing-masing koperasi. Perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Maluku Tahun 2019-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Lebih lanjut perkembangan terkait koperasi terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.34**  
**Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
1	Persentase koperasi aktif	%	64,99	65,64	66,3	66,97	66,94
2	Jumlah Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi	Unit		10	11	13	-
3	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	16,92	2,84	0	3,34	3,30
4	Persentase Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel	%	-	-	-	70	-
5	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%		91,22	91,50	91,78	86,951
6	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%		1,51%	25%	25%	25%

Sumber : Dinas Koperasi & UKM Promal, 2023

Persentase koperasi aktif belum mencapai target pada tahun 2022. Kenaikan koperasi aktif didorong dari upaya-upaya pendampingan dan juga pelatihan pengelolaan manajemen koperasi bagi para anggota koperasi. Hal yang sama memengaruhi pencapaian indikator persentase koperasi berkualitas yang belum mencukupi target tahun 2022.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Maluku. Keberadaan UMKM diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi masyarakat Provinsi Maluku yang memiliki jiwa berwirausaha. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM. Perkembangan UMKM mengalami penurunan dibandingkan target tahun 2022, dengan jumlah 86,95%.

Jumlah pengukuran tingkat kesehatan koperasi memiliki realisasi 0% pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena tidak ada dukungan dana untuk pembinaan koperasi, sama halnya dengan indikator persentase peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya

koperasi kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel yang memiliki tingkat realisasi 0 persen dikarenakan tidak ada dukungan dana untuk pembinaan koperasi di 11 Kab/Kota.

Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha mencapai target pada tahun 2022 sebesar 25%.

### 2.3.1.2.11. Bidang Urusan Penanaman Modal

Dalam menjalankan usaha tentunya pendiri harus menentukan jenis kegiatan usaha dan juga menentukan siapa saja penanam modal dalam perusahaan tersebut. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha, yang melakukan. Penanam modal dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA).

Gambaran terkat capaian urusan penanaman modal Provinsi Maluku tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**Capaian Urusan Penanaman Modal Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Penanaman Modal</b>							
1	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA	Jumlah	0	0	0	2	3
2	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)	Jumlah	206	17	22	250	35
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	92	90,5	92	90,75
4	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah	39	44	349	50	193
5	Persentase pertumbuhan investasi	%	561,63	616,9	104,47	100%	50,76

Sumber : Dinas BPMPPTS Provinsi Maluku, 2023

Pada indikator jumlah dokumen peluang investasi PMDN dan PMA tahun 2022 melebihi target realisasi. Sedangkan jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA) mengalami penurunan drastis dari target tahun 2022. Terjadi penurunan jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMA dan PMDN) disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global perang dunia Ukraina-Rusia sehingga mengakibatkan minat investasi oleh para penanam modal potensial jadi menurun. Selain itu juga karena terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang belum memadai pada daerah

potensial untuk berinvestasi. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat juga mengalami penurunan dari target tahun 2022 yang ditentukan, disebabkan terjadinya perubahan sistem pelayanan perizinan dari OSS 1.1 (Offline/Tatap Muka) ke OSS RBA (Online/Daring) sehingga terjadi pengurangan bahkan hampir tidak ada jumlah pelaku usaha yang datang melakukan proses perijinan ke Kantor DPMPTSP Provinsi Maluku. Oleh karena itu, petugas SKM sulit mendapatkan responden. Sama halnya dengan persentase pertumbuhan investasi yang tidak mencapai target. Terjadi penurunan persentase pertumbuhan investasi disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global perang dunia Ukraina-Rusia sehingga mengakibatkan minat investasi oleh para penanam modal potensial jadi menurun. Selain itu juga karena terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang belum memadai pada daerah potensial untuk berinvestasi. Jika dilihat dari seluruh indikator pada urusan penanaman modal, indikator jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi merupakan indikator yang melebihi target di tahun 2022 dengan nilai yang sangat signifikan.

#### **2.3.1.2.12. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Keberadaan organisasi pemuda sejatinya memberikan keseimbangan dalam proses pembangunan yang dilakukan terutama peran-peran pengawasan dan kontrol. Sampai tahun 2022 persentase organisasi pemuda yang aktif telah mencapai 83%, Namun jika dibandingkan dengan target maka angka ini belum mencapai target pada tahun 2022. Sedangkan indikator jumlah pemuda yang aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan pemuda melebihi target capaian tahun 2022. Keaktifan organisasi pemuda yang semakin tinggi didorong dari keterbukaan, akses dan kesempatan *check and balances* yang semakin tinggi di daerah.

Sementara itu persentase wirausaha muda yang difasilitasi dan persentase tenaga pelatih olahraga yang bersertifikasi belum mencapai target dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia lebih diprioritaskan untuk pelaksanaan event olahraga provinsi dan hibah untuk pengurus cabang olahraga maka hanya mampu memberikan bantuan kewirausahaan kepada dua organisasi kepemudaan dan memfasilitasi 1 wirausaha muda. Sama halnya, dengan jumlah atlet berprestasi mengalami penurunan drastis dari target capaian

tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya kejurnas yang diselenggarakan Pada Tahun 2022, hanya 1 (satu) Event Olahraga Nasional yang diikuti oleh Provinsi Maluku yaitu Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PRA POPNAS) Wilayah V dengan prestasi Medali 1 Emas,1 perak dan 3 Medali perunggu dalam Cabor Tinju dan Pencak Silat.

Presentase Tenaga/Pelatih Olahraga yang bersertifikasi dan jumlah saran olahraga yang memadai belum mencapai target tahun 2022. Namun jika dilihat trend realisasi capaian untuk indikator presentase tenaga/pelatih olahraga yang bersertifikasi ini mengalami kenaikan dari tahun 2019-2022.

Lebih lanjut gambaran terkait dengan capaian pada urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.36**  
**Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	81,64	81,40	83	84,09	83
2	Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kepeloporan, Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda	Orang	126	114	286	314	327
3	Persentase Wirausaha muda Yang Difasilitasi	Persen	0	1,98	2,10	8	0,344
4	Jumlah Atlit Berprestasi	Orang	24	6	28	35	5
5	Jumlah Cabor yang dibina dalam masyarakat	Cabor	7	17	19	14	17
6	Presentase Tenaga/Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi	Persen	38,7	40,73	42,4	73	67.79
7	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Memadai	Unit	375	375	298	302	301

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.1.2.13. Bidang Urusan Statistik

Statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan disegenap aspek kehidupan masyarakat. Data statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Presentase data statistik sektoral yang tersedia mencapai target pada tahun 2022. Jika dilihat trend realisasinya dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan per tahunnya. Adapun beberapa kendala dalam pemenuhan realisasi indikator ini antara lain:

- Penyediaan Data Statistik Sektoral belum maksimal karena OPD sebagai Produsen Data belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku
- Terbatasnya Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Data Statistik

Lebih lanjut gambaran terkait dengan capaian pada urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.37 Capaian Urusan Statistik Provinsi Maluku  
Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Statistik</b>							
1.	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersedia	Persen	-	11,54	42,31	73,08	73,08

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, 2023

#### 2.3.1.2.14. Bidang Urusan Persandian

Bidang urusan persandian yang diukur dengan dua indikator sesuai tabel berikut menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus dapat memberikan perhatian bagi perkembangan persandian dan kemananan informasi, dimana 2 indikator tersebut merupakan persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi dan indeks keamanan informasi (Indeks KAMI). 2 indikator ini belum mencapai target pada tahun 2022. Hal ini disebabkan Pengujian atau Penetrasian Testing ITSA tidak dilaksanakan pada Tahun 2022 karena keterbatasan personil BSSN untuk melakukan evaluasi dan Belum adanya Regulasi/Pergub tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Infrastruktur yang belum memadai, terbatasnya SDM dalam pengelolaan keamanan informasi.

Gambaran urusan persandian terlihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.38**  
**Capaian Urusan Persandian Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Persandian</b>							
1.	Persentase Aplikasi Yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi	Persen	-	8,14	3,49	13,5	0
2.	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	-	-	164	175	170

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.1.2.15. Bidang Urusan Kebudayaan

Budaya Maluku adalah aspek kehidupan yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, seni dan kebiasaan lainnya yang dijalani dan diberlakukan oleh masyarakat Maluku. Maluku memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Warisan Budaya di Maluku terbagi menjadi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya bukan benda. Cagar budaya yang ada di Maluku relatif meningkat dari Tahun 2019-2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan.

Sementara Pertumbuhan Penyelenggaraan Event Seni Daerah mengalami penurunan dikarenakan pembatasan penyelenggaraan event seni daerah akibat dampak pandemi covid-19. Gambaran capaian urusan kebudayaan dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Kebudayaan</b>							
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Cagar Budaya	63	64	65	65	14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.1.2.16. Bidang Urusan Perpustakaan

Untuk meningkatkan minat baca serta mempermudah akses masyarakat dengan buku-buku bacaan yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, pemerintah Provinsi Maluku selalu berupaya meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan. Peningkatan peran dan fungsi perpustakaan di Provinsi Maluku

diukur melalui nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan capaian realisasi. Namun jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022, nilai pada indikator ini belum mencapai target yang ditentukan.

Indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2019-2020 kemudian terus meningkat sampai tahun 2021-2022. Target tahun 2022 melebihi target capaian realisasi yang ditentukan.

**Tabel 2.40**  
**Capaian Urusan Perpustakaan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Perpustakaan</b>							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	49,86	52,90	54	58	56,88
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	6,58	17,51	18	19	49,77

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.1.2.17. Bidang Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip dinamis maupun statis kewenangan daerah merupakan salah satu urusan kearsipan di daerah. Urusan kearsipan daerah diukur dengan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dan Jumlah tata perizinan dan penggunaan arsip secara baik.

Tabel berikut merupakan rincian data arsip Provinsi Maluku Tahun 2019-2022.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Urusan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Kearsipan</b>							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	0	10%	20%	50%	75%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	25	27	30	32	33
3	Jumlah tata perizinan dan penggunaan arsip secara baik	Jumlah	0	0	0	1	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, 2023

Beberapa permasalahan dalam mewujudkan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku antara lain: masih rendahnya tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas, serta memori kolektif dan jati diri bangsa; pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah; penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan; belum optimalnya penerapan pengelolaan arsip berbasis digital; status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai; belum terpenuhinya jumlah SDM kearsipan (arsiparis dan pengelola kearsipan) di masing-masing OPD Provinsi Maluku masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan yang berbasis digital; serta masih kurangnya program dan kegiatan sosialisasi kearsipan.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

#### 2.3.2.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada bidang urusan kelautan dan perikanan diukur dari 3 indikator yakni jumlah total produksi perikanan tangkap, jumlah total produksi perikanan budidaya dan persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah total produksi perikanan tangkap dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan. Jika dibandingkan antara produksi perikanan tangkap tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.350 ton. Namun jika dibandingkan dengan target realisasi indikator ini tahun 2022 belum mencapai target. Hal ini belum dapat dipastikan datanya karena masih sementara. Data yang masih menunggu hasil validasi dan verifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sedangkan jumlah total produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 capaian realisasi melebihi target yang ditentukan.

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengalami penurunan capaian target yang cukup signifikan disebabkan keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan dan monitoring pelaku usaha KP terhadap ketentuan perundang-undangan terbatas.

Gambaran terkait pencapaian urusan kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dari tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.42**  
**Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Kelautan Perikanan</b>							
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	419.778,2	523,261	533,7262	544,400744	536.112,62
2.	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	620.842,7	200,81	204,8262	208,922724	278,134,47
3.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	-	59,49%	65%	70%	27,27

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.2.2. Bidang Urusan Pariwisata

Jumlah kunjungan Wisatawan ditahun 2021 mengalami penurunan, dimana hal ini telah terjadi semenjak tahun 2020, penurunan kunjungan diakibatkan pandemi covid-19 yang mengakibatkan kebijakan larangan kunjungan wisatawan. Namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 69.240 orang karena aktivitas PSBB yang sudah tidak diberlakukan. Jumlah Kunjungan Wisatawan ini dibagi menjadi 2 yakni wisatawan mancanegara dan nusantara. Sama hal dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan total diatas, penurunan jumlah wisatawan cukup signifikan terjadi pada tahun 2020-2021 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022, capaian realisasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melebihi target yang ditentukan. Sedangkan Jumlah kunjungan wisata nusantara sesuai dengan target capaian realisasi tahun 2022.

Gambaran urusan pariwisata Provinsi Maluku tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.43**  
**Capaian Urusan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pariwisata</b>							
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	237,429	230,637	318,349	387.567	387.589
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	13,153	2,010	1,450	7,400	7.422
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	224,276	228,627	316,899	380,167	380.167
4	Kontribusi ekonomi Kreatif terhadap PDRB Maluku	%	0	0	1,54	1,55	1,49

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.2.3. Bidang Urusan Pertanian

Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2019-2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian sebesar 10.38 dimana kontribusi ini lebih rendah dari capaiannya ditahun 2019 yakni mencapai 10.47%. kontribusi sub sektor tanaman pangan sebesar 5,69% menurun menjadi 5,53% pada tahun 2021. Kontribusi sub sektor perkebunan PDRB mengalami peningkatan, sementara kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,61

poin dari tahun 2021. Namun nilai pada indikator ini merupakan angka sementara sampai dengan triwulan III.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP mencapai 102,5% dari target capaian realisasi yang ditentukan tahun 2022. Kenaikan NTP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas hasil petani terhadap KUR daerah Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 2.44**  
**Capaian Urusan Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pertanian</b>							
1	Nilai Tukar Petani	%	99.01	97.68	102	102.3	102,5
2	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Poin	10.31	10.47	10.38	10.43	9.77

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku, 2023

#### 2.3.2.4. Bidang Urusan Kehutanan

**Tabel 2.45**  
**Capaian Urusan Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Kehutanan</b>							
1	Luas Lahan Yang Direhabilitasi	Hektar	820	176.10	186.13	1,000	
2	Persentase Peningkatan Kualitas Hutan Melalui Tutupan Lahan	%	65	65	66	67	
3	Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)	Kelompok	10	6	16	15	
4	Persentase Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0.52	0.54	0.53	0.53	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 2023

Bidang Urusan Kehutanan diukur dari 4 indikator diantaranya luas lahan yang direhabilitasi, persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan, jumlah kelompok pemanfaatan areal perhutanan sosial (PS) dan persentase kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB.

Luas lahan yang direhabilitasi mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan 643,9 Ha, sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebesar 169,49 Ha, namun belum mencapai target realisasi capaian tahun 2022 yang ditentukan.

Persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2021-2022 indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,16% dan tidak mencapai target realisasi capaian tahun 2022.

Jumlah kelompok pemanfaatan areal perhutanan sosial (PS) dari tahun 2019-2022 mengalami naik-turun. Indikator ini melebihi target capaian realisasi tahun 2022.

Persentase kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB juga mengalami fluktuatif dari tahun 2019-2022. Indikator telah melebihi target capaian realisasi tahun 2022.

#### **2.3.2.5. Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

PETI merupakan usaha pertambahan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasional tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah PETI yang ditertibkan merupakan salah satu indikator pengukur untuk bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral. Berdasarkan data capaian indikator kinerja, indikator ini mencapai target realisasi pada tahun 2022 sebesar 3 lokasi yang sudah ditertibkan.

Energi listrik merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan. Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia. Persentase rumah tangga pengguna listrik merupakan salah satu pengukur penting dalam bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral guna mengukur penyaluran listrik yang diterima masyarakat. Pada tahun 2019-2021 indikator ini mengalami kenaikan realisasi, kemudian tahun 2022 mengalami penurunan namun tetap mencapai target yang ditentukan pada tahun 2022.

Rasio elektrifikasi tahun 2019-2021 mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan ini merupakan bukti sebagian besar wilayah di Provinsi Maluku sudah

teraliri listrik. Pada tahun 2022 indikator ini sudah mencapai target yang diharapkan.

Jumlah rumah tangga sasaran dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka kenaikan di tahun 2022 sebesar 172 RTS, dimana jumlah ini sudah mencapai target tahun 2022.

Gambaran capaian urusan energi dan sumberdaya mineral seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.46**  
**Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Energi Sumber Daya Mineral</b>							
1	Jumlah PETI yang ditertibkan	Lokasi	<5	<4	<5	<5	3
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	0	350	365	274	274
3	Rasio Elektrifikasi	%	92,30	95,58	96,75	97,49	97,49
4	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)	RTS	0	375	420	592	592

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.2.6. Bidang Urusan Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang mengalami penurunan dari tahun 2020-2021 sedangkan dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan di mencapai 9,09% kenaikan ini ditopang melalui upaya-upaya pengalokasian penganggaran terkait pembinaan pedagang yang lebih di tahun 2022.

Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (Bapok) mengalami penurunan target. Hal ini disebabkan Terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis bahan pokok dikarenakan terjadi kenaikan harga ditingkat petani dan kenaikan harga BBM.

Nilai ekspor nonmigas dan persentase barang beredar sesuai ketentuan tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dengan melebihi target capaian yg cukup signifikan.

**Tabel 2.47**  
**Capaian Urusan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Perdagangan</b>							
1.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Persen	4	18,3	7,2	9,09	9,09
2.	Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (Bapok)	Persen	3,5 -	4,19	3,8	3,5 - 4	7,73
3.	Nilai Ekspor Non Migas	US\$ (Juta)	11,8	45,12	14,82	15,7	40,5
4.	Persentase Barang Beredar yang Sesuai Ketentuan	Persen	45	46	70,5	75	79,88

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.2.7. Bidang Urusan Perindustrian

**Tabel 2.48**  
**Capaian urusan Perindustrian Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Perindustrian</b>							
1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	42,74	58,32	58,33	68,5	96,25
2.	Pertumbuhan Industri	Persen	0,65	0,93	1,36	0,65	1,67

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Maluku, 2023

Perkembangan perindustrian di Provinsi Maluku tahun 2019-2022 digambarkan dengan capaian indikator-indikator perindustrian yang diuraikan pada tabel di atas. Terlihat Pertumbuhan industri semakin meningkat dimana pada tahun 2019-2022. Peningkatan ini ditopang melalui kebijakan menciptakan produktivitas dan peningkatan kualitas lapangan kerja, selain itu penyederhanaan birokrasi perizinan, regulasi yang tidak memberakan, situasi daerah yang kondusif, memperluas kesempatan berusaha, ketersediaan sumber daya, iklim investasi dan usaha yang sehat, serta ketersediaan SDM industry, sehingga bisa memberikan perbaikan bagi sektor industri.

Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2022 dan mencapai 96,25% melebihi target yang diharapkan. Kenaikan ini didorong melalui upaya-upaya pengalokasian

penganggaran terkait pembinaan kelompok pengrajin yang lebih di tahun 2022.

### 2.3.2.8. Bidang Urusan Transmigrasi

Perkembangan pencapaian urusan Transmigrasi Provinsi Maluku diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan kawasan transmigrasi, jumlah kawasan/unit permukiman transmigrasi yang siap dibangun, dan jumlah kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing.

Persentase pertumbuhan kawasan transmigrasi dan jumlah kawasan/unit permukiman transmigrasi yang siap dibangun belum ada pencapaian realisasinya untuk tahun 2022 disebabkan belum ada dukungan anggaran dari APBD maupun APBN.

Jumlah kelompok masyarakat kawasan transmigrasi Tahun 2022 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah jika dibandingkan dengan tahun 2021, perkembangan yang ditunjukkan semakin meningkat.

**Tabel 2.49**  
**Capaian Urusan Transmigrasi Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Transmigrasi</b>							
1	Persentase Pertumbuhan kawasan transmigrasi	%	0	0	20	0	0
2	Jumlah Kawasan/Unit Pemukiman Transmigrasi yang siap dibangun	Kawasan	0	0	0	1	0
3	Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing	Kelompok	7	7	0	5	5

Sumber : Dinas Nakertrans Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

#### 2.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan suatu daerah mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Spasial atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5

tahunan disusun sesuai periode pemerintahan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun merupakan dokumen rencana operasional program kegiatan yang diturunkan dari dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang melalui proses perencanaan partisipatif musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) setiap tahun. Dokumen ini harus tersedia dan diacu oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Beberapa permasalahan dalam urusan penunjang pemerintahan (Perencanaan) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku antara lain dokumen perencanaan pembangunan daerah belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah. Dalam hal ini terdapat tiga permasalahan, yaitu: sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan. Selain itu terdapat beberapa permasalahan lainnya yaitu pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal. Terdapat beberapa permasalahan dalam hal ini, antara lain: belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah dan juga ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen perencanaan. Gambaran mengenai capaian urusan perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.50**  
**Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Perencanaan</b>							
1	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100
2	Status Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, RKPDP yang Tepat Waktu	Ya/Tidak	Tidak	0	0	Ya	Tidak
3	Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD	%	91,26%	0	100%	100%	97%
4	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	%	100%	0	100%	100%	89%

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.3.2. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undangundang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dalam hal menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Namun bila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda

Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Kepatuhan akan perundang-undangan di terkait penyusunan dokumen keuangan daerah dan pengelolaan aset terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Capaian Urusan Keuangan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Keuangan</b>							
1	Jumlah Pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	0	2	2	2	2
2	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Daerah sesuai SAP dan peraturan perundang- undangan	%	0	80,00%	80,00%	85,00%	97,73%
3	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	0	50,00%	55,00%	55,00%	74,39%
4	Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	97,73%

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2023

### 2.3.3.3. Kepegawaian

Permasalahan dalam urusan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku antara lain : database kepegawaian yang belum up to date; manajemen ASN belum berjalan secara optimal; tingkat profesionalisme aparatur yang rendah; pelaksanaan tata kelola organisasi yang belum akuntabel; sistim merit belum diterapkan dengan sangat baik; minimnya jumlah jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang spesifik; kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung terhadap perkembangan teknologi terbaru; kompetensi PNS yang masih rendah dan belum merata; terdapatnya kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansinya; serta data base dan sistim informasi ASN kurang lengkap dan tidak mutakhir serta tidak terintegrasi.

**Tabel. 2.52**  
**Capaian Urusan Kepegawaian Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Kepegawaian</b>							
1	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya	%	0	0	100%	100%	100%
2	Persentase PNS yang meningkat Kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar	%	0	0	100%	100%	271%
3	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang Terevaluasi Kinerjanya	%	0	0	100%	100%	100%
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	0	0	100%	100%	100%
5	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	0	0	100%	100%	100%
6	Persentase Pelayanan Kasus Kepegawaian	%	0	0	100%	100%	100%

Sumber : BKD Provinsi Maluku, 2023

#### 2.3.3.4. Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator dalam urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan yang diukur melalui capaian Persentase Proper Yang Ditindaklanjuti dan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 2.53**  
**Capaian Urusan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>							
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	20	66.61	78.80	40	99,91

Sumber : Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Maluku, 2023

#### 2.3.3.5. Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapat beberapa permasalahan antara lain masih rendahnya peran aktif OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan, masih kurangnya pemenuhan dokumen kelengkapan pada area intervensi, diantaranya: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD dan Manajemen ASN. Gambaran terkait capaian urusan pengawasan Provinsi Maluku tahun 2019 – 2022 terlihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.54**  
**Capaian Urusan Pengawasan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Inspektorat Daerah</b>							
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, Itjen dan Inspektorat	%	75	80	85	90	74,9
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Level	C	CC	CC	B	B
3	Persentase Implementasi MCP Korsupgah dan Stranas	%	70	75	78	82	73,49
4	Persentase Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah (EKPPD) kab/kota yang mendapat nilai minimal tinggi		100	100	100	100	-

Sumber : Inspektorat Provinsi Maluku, 2023

#### 2.3.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

Capaian urusan pendukung pemerintahan Provinsi Maluku tahun 2019 – 2022 menunjukan perkembangan yang sangat baik. Dari tabel perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, sedangkan indikator kepuasan masyarakat belum mencapai target disebabkan Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah pelaksana pelayanan publik dalam menyiapkan komponen kebijakan pelayanan publik pada perangkat daerahnya

masing-masing dan indikator Peringkat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang Menunggu rilis data tahun 2022 dari Kemendagri. Sedangkan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Sekretariat DPRD pada Indikator Indeks kepuasan Anggota DPRD hal ini disebabkan karena Belum Optimalnya koordinasi internal dilingkup DPRD dan koordinasi eksternal Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam pembahasan RANPERDA yang diusulkan.

**Tabel. 2.55**  
**Capaian Pendukung Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Sekretariat Daerah</b>							
1	Persentase OPD yang mengumpulkan LAKIP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	59,7	-	60	63	61,03
3	Peringkat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		Tinggi	N/A	N/A	Tinggi	-
4	Persentase kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	100
5	Persentase produk hukum yang disahkan	%	107	108	108	100	100
6	Persentase Penurunan Inflasi Daerah	%	2,87%	0,21%	4,01%	3,0 ±1%	6,28%
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50	69.54	55.39	55	65
8	Maturitas UKPBJ	Level	level 3	level 3	level 3	level 3	Level 3

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan HAM, Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ, Biro Organisasi dan Biro Perekonomian Provinsi Maluku, 2023

**Tabel. 2.56**  
**Capaian Pendukung Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	
			Realisasi			Target	Realisasi
<b>Sekretariat DPRD</b>							
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan		87	87	90	94	92

Sumber: Sekretariat DPRD, 2023

## 2.4. Aspek Daya Saing

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk

menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

#### 2.4.2. Pengeluaran per Kapita Maluku

Pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Provinsi Maluku selama periode 2019 - 2022 berfluktuasi. Pengeluaran riil perkapita Provinsi Maluku tahun 2022 sebesar 8.876 ribu rupiah lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 8.770 ribu rupiah. Sementara itu, menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita Tahun 2022 terbesar berada di Buru, yaitu sebesar 10.414 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu sebesar 6.473 ribu rupiah yang tergambar dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.57**  
**Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)			
	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Tanimbar	6,396.00	6,297.00	6,335.00	6.473
Maluku Tenggara	7,625.00	7,545.00	7,580.00	7.795
Maluku Tengah	10,298.00	10,210.00	10,243.00	10.406
Buru	10,400.00	10,316.00	10,347.00	10.414
Kepulauan Aru	7,678.00	7,586.00	7,623.00	7.733
Seram Bagian Barat	8,704.00	8,690.00	8,720.00	8.890
Seram Bagian Timur	9,452.00	9,453.00	9,480.00	9.591
Maluku Barat Daya	6,888.00	6,890.00	6,918.00	7.010
Buru Selatan	7,627.00	7,566.00	7,600.00	7.716
Ambon	14,233.00	14,116.00	14,148.00	14.405
Tual	7,506.00	7,351.00	7,405.00	7.519
<b>Maluku</b>	<b>8,887.00</b>	<b>8,732.00</b>	<b>8,770.00</b>	<b>8.876</b>

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

#### 2.4.3 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai Tukar Petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu sisi pendapatan

yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya dan sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) > 100 menunjukkan petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya jika NTP < 100 menunjukkan petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. NTP = 100 menunjukkan petani mengalami impas, dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, pendapatan petani sama besar dengan pengeluarannya.

**Tabel 2.58**  
**Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

INDIKATOR	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani (Ntp)	100,27	98,56	97,53	103.88
Nilai Tukar Nelayan	114,75	100,44	102,35	116.5

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 42 kecamatan di Provinsi Maluku pada November 2022, diketahui bahwa NTP Provinsi Maluku secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,07 persen dibanding Oktober 2022, atau turun dari 104,88 pada Oktober 2022 menjadi 104,81 pada November 2022. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (It) yang tercatat turun sebesar 0,21 persen dan penurunan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,14 persen.

Penurunan NTP pada November 2022 disumbangkan oleh turunnya NTP pada empat subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan (-0,49 persen), subsektor Hortikultura (-1,77 persen), subsektor peternakan (-0,25 persen) dan subsektor perikanan (-0,37 persen). Sedangkan subsektor perkebunan rakyat mengalami peningkatan NTP sebesar 0,75 persen.

Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya indeks harga pada kelompok perairan umum (khususnya komoditas kepiting air tawar) sebesar 1,91 persen, dan kelompok penangkapan laut (khususnya pada komoditas ikan tuna, cakalang, tongkol, lobster, kerapu, layang, tenggiri, ekor kuning, kuwe, tembang, dan selar) secara rata-rata naik sebesar 1,94 persen. Sementara itu, peningkatan Ib disebabkan oleh meningkatnya Indeks BPPBM sebesar 0,20 persen sedangkan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) menurun sebesar 0,04 persen.

Pada November 2022, NTN mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Hal ini terjadi karena Ib mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen melampaui peningkatan It yang sebesar 0,07 persen. Peningkatan It disebabkan oleh naiknya harga komoditas pada kelompok penangkapan di perairan laut (khususnya komoditas ikan tuna, ikan ketamba, ikan kerapu, ikan belanak, ikan 7Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku November 2022 BRS No. 59/12/81/Th. XIV, 1 Desember 2022 selar, ikan ekor kuning, kepiting laut, udang laut, ikan kakap, ikan alu-alu dan ikan tenggiri) sebesar 0,07 persen, sementara It pada kelompok penangkapan di perairan umum tidak mengalami perubahan. Peningkatan nilai Ib disebabkan oleh turunnya IKRT sebesar 0,02 persen dan meningkatnya indeks BPPBM sebesar 0,31 persen.

#### **2.4.4 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan guna mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka

semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

**Tabel 2.59**  
**Pengeluaran Per kapita (Rp) dan Persentase Di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Berdasarkan Jenis Pengeluaran	TAHUN							
	2019		2020		2021		2022	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
Makanan (Rp)	601.811	434.336	620.871	562.679	642.907	452.859	678.817	523.227
Rata-rata Makanan Perkotaan + Perdesaan	507.218		532.135		536.327		589.485	
Non Makanan (Rp)	688.359	346.058	755.608	392.249	803.428	398.216	787.907	426.392
Rata-rata Makanan Perkotaan + Perdesaan	495.021		551.786		576.419		580.343	
Total Pengeluaran Perkotaan + Perdesaan	1.002.239		1.083.921		1.112.746		1.169.828	
Persentase Makanan (%)	100		100		100		100	100
Persentase Non Makanan (%)	100		100		100		100	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan Provinsi Maluku dari tahun 2019 – 2022 mengalami peningkatan walaupun dalam kondisi yang realitif masih sama yakni pada kisaran angka satu juta rupiah. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang mencapai Rp.1.169.828 Persentase pengeluaran untuk makanan dan untuk non makanan yang mencapai 100% di tahun 2022.

#### 2.4.5 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, dan lain sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat

keamanan masyarakat. Jumlah tindak pidana kriminalitas dan penyelesaian tindak pidana kriminalitas di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.60**  
**Perkara Tindak Pidana Umum di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan/ <i>Crime Total</i>			
	2019	2020	2021	2022
Res Kepulauan Tanimbar	263	112	137	99
Res Maluku Tenggara	393	291	370	69
Res Maluku Tengah	250	143	258	246
Res Buru	186	162	189	158
Res Kepulauan Aru	162	163	200	164
Res Seram Bagian Barat	247	200	320	147
Res Seram Bagian Timur	102	77	67	110
Res Maluku Barat Daya	129	116	194	183
Resta Ambon	1 903	1 882	1 195	683

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

#### 2.4.6 Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Pembangunan infrastruktur jaringan jalan sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan mempengaruhi unsur strategis suatu tempat dan dengan mudahnya akses akan mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selain itu dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur salah satu contohnya seperti jaringan jalan juga akan memberi manfaat kesejahteraan masyarakat karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Jaringan telekomunikasi pun juga memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya banyak stasiun televisi swasta saat ini menjadi bukti bahwa cukup banyak investasi swasta di di bidang pertelekomunikasian. Selain ini jaraingan telekomunikasi sangat diperlukan sebagai alat penunjang keberhasilan suatu pembangunan.

Sarana air bersih juga mempunyai peran sangat strategis untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat, juga sebagai faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penyediaan baik segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, belum berjalan berkesinambungan. Sisi lain, tuntutan kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan terus mengalami peningkatan dan harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan.

## **2.5 Fokus Iklim Inventasi**

Iklim investasi merupakan salah satu dari isu dari peningkatan daya saing pembangunan di daerah guna sebagai penguat dalam keadaan ekonomi domestik. Investasi dapat mencerminkan daya saing antar daerah. Semakin baik investasi akan memperlihatkan tingkat kepercayaan penanaman modal di suatu daerah. Iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara

produktif dan berkembang. Oleh sebab itu peningkatan iklim investasi dan usaha sangat penting untuk mendorong arus investasi masuk dan berkembangnya usaha di Provinsi Maluku. Dengan investasi yang baik akan mendorong aktivitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya beli masyarakat yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan bidang investasi yang selama ini muncul salah satunya Permasalahan struktural, seperti birokrasi dan kepastian hukum tentunya perlu dilakukan sebuah reformasi perubahan yang mengarah pada kondisi yang efisien bagi peningkatan iklim investasi. Guna meningkatkan iklim dan daya Tarik investasi maka langkah kebijakan difokuskan pada beberapa hal yang menjadi tinjauan penting, dengan tidak mengenyampingkan faktor lain, diantaranya : Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah dan Kemudahan dalam proses pembebasan dan perolehan lahan.

## **2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan**

### **2.6.1 Perkembangan Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku Tahun 2022**

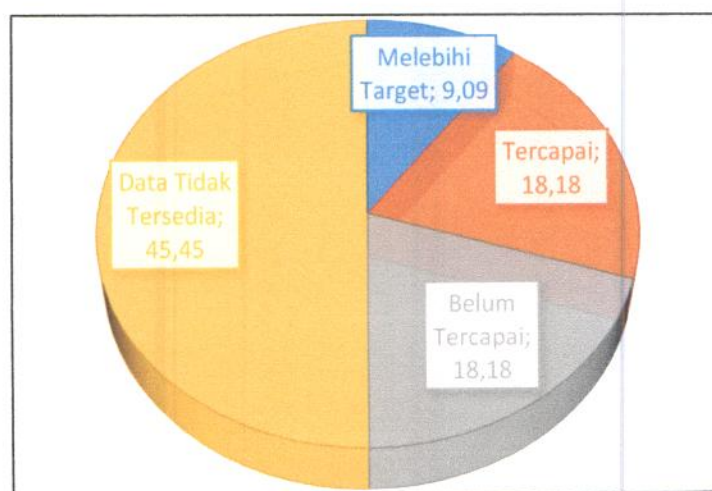
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, maka melalui RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang adalah ukuran dari keberhasilan tujuan dan sasaran strategis.

Secara strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi penilaian kinerja pemerintahan, sebab pencapaian IKU akan sangat bergantung pada kinerja perangkat daerah, Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar penetapan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja.

Kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku yang direfleksikan melalui pencapaian sasaran dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020, sangatlah dipengaruhi akan situasi dari penyebaran covid-19 ditahun 2020. Penyebaran covid-19 menjadikan Pemerintah Daerah mengalihkan perhatian utamanya untuk penanganan covid-19 terutama penanganan Kesehatan dan upaya mempertahankan perekonomian masyarakat akibat dari pandemi ini.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini realisasi sasaran kinerja Pemda Provinsi Maluku tahun 2020 menunjukkan 6 indikator lainnya menunjukkan tingkat pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan, yakni : rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia, indeks desa membangun, indeks kualitas lingkungan hidup, inflasi dan laju pertumbuhan PMA dan PMD dan 2 indikator tercapai atau sesuai dengan target indikator yang ditetapkan yakni harapan lama sekolah dan indeks gini, sedangkan indikator yang belum tercapai dan membutuhkan perhatian lanjut untuk meningkatkan pencapaian tahunan sesuai target akhir Periode RPJMD.

**Gambar. 2.14**  
**Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Maluku**  
**Tahun 2022**



Dampak dari pandemi Covid-19 secara nyata berpengaruh terhadap capaian kinerja, enam indikator yang realisasinya belum sesuai target

tersebut, selanjutnya perlu menjadi fokus Pemda Provinsi Maluku untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Laporan pencapaian IKU dalam dokumen ini sekaligus memberikan gambaran terkait pencapaian target dari setiap sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024. Untuk itu maka pencapaian IKU Provinsi Maluku di Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.61**  
**Pencapaian IKU Provinsi Maluku Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019	2020	2021	2022		Keterangan
			Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	0	CC	CC	B (67,50)	-	Indeks RB Tahun 2022 akan diumumkan oleh Kemenpan RB pada Maret tahun 2023
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69.45	69.49	69.71	70,10	70.22	Melebihi Target
3	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Poin	N/A	N/A	76,30	80,5	-	Belum dirilis
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7.08	7.57	6.93	6,45	6,88	Belum mencapai target / mengalami penurunan dari tahun lalu
5	Tingkat Upaya Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	27.1	24.99	24,2	22,58	-	Data tersedia pada bulan Maret 2023
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.57	-0.92	5.33	5,00 - 5,82	5,73	Mencapai target
7	Indek Wiliamson	Persen	2.72	0.21	4.01	0.319	-	Dirilis bulan Juni 2023
8	Indeks Gini	Poin	0.32	0.326	0.316	0.305	0,306	
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	0	0	54,67	54	-	Belum dirilis oleh Kemenpora
10	Persentase Penduduk Miskin	Persen	17.65	17.99	16.30	16,25	16,23	Mencapai Target
11	Inflasi	Persen	2,87	0,21	4,01	3,0±1	6,28	Belum Mencapai Target

Sumber :

- 1.BPS Provinsi Maluku, 2023
- 2.OPD terkait, 2023

## 2.6.2 Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Anggaran OPD Tahun 2022

**Tabel 2.62**  
**Realisasi Anggaran OPD Provinsi Maluku**

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%
			PAGU	REALISASI	
<b>1</b>		<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>481.046.943.062,00</b>	<b>18.841.993,80</b>	<b>0,00</b>
		1 Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8.685.919.232,00	-	
		2 Pengelolaan pendidikan	453.519.030.030	-	
		3 Pendidik dan tenaga kependidikan	18.841.993.800	18.841.993,80	0,10
<b>2</b>		<b>KESEHATAN</b>	<b>118.406.526.386</b>	<b>112.197.106.514</b>	<b>94,76</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	118.406.526.386	112.197.106.514	94,76
		2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			0
		3 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			0
<b>3</b>		<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>332.741.555.381</b>	<b>204.391.461.229</b>	<b>61,4264909</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12.275.787.892	11.220.274.352	78.11.00
		2 Program pengelolaan sumber daya air (sda)	109.360.294.530	0	97.73
		3 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	16.150.000.000	15.904.588.884	42.95
		4 Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1.000.000.000	0	47.19.00
		5 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	2.850.000.000	2.812.883.400	99.23.00
		6 Program pengembangan permukiman	12.475.000.000	11.862.319.683	98.45.00
		7 Program penataan bangunan gedung	71.449.079.855	58.006.858.945	93.20.00
		8 Program penataan bangunan dan lingkungannya	69.799.916.470	68.745.196.944	94.67

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%	
			PAGU	REALISASI		
		9	Program penyelenggaraan jalan	27.481.477.400	26.890.302.687	99.11.00
		10	Program pengembangan jasa konstruksi	4.400.000.000	4.241.198.031	77.10.00
		11	Program penyelenggaraan penataan ruang	5.499.999.234	4.707.838.303	78.14.00
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>45.424.294.289,00</b>	<b>40.860.258.436,00</b>	<b>89,95</b>	
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10.825.599.035,00	7.782.339.997,00	<b>71,89</b>
		2	Program pembangunan perumahan	2.434.000.000,00	2.381.175.885,00	<b>97,83</b>
		3	Program pembangunan permukiman	992.130.424,00	954.077.700,00	<b>96,16</b>
		4	Program kawasan permukiman	20.577.000.000,00	19.951.893.074,00	<b>96,96</b>
		5	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (psu)	10.333.000.000,00	9.564.024.165,00	<b>92,56</b>
		6	Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	262.564.830,00	226.747.615,00	<b>86,36</b>
<b>5</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		<b>14.085.208.363</b>	<b>13.533.413.539</b>	<b>96,08</b>	
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi maluku	6.621.647.532	6.129.847.327	92,57
		2	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	7.379.497.016	7.326.533.467	99,28
		3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	84.063.815	77.032.745	91,64
<b>6</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>8.943.066.079</b>	<b>8.239.665.486</b>	<b>92,13</b>	
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6.530.908.682	6.086.979.752	93,20
		2	Program penanggulangan bencana	2.412.157.397	2.152.685.734	89,24
<b>7</b>	<b>SOSIAL</b>		<b>33.437.568.433</b>	<b>31.691.931.243</b>	<b>94,78</b>	

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%	
			PAGU	REALISASI		
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi maluku	22.514.187.452	21.631.410.681	96,08
		2	Program pemberdayaan sosial	2.495.982.414	2.101.291.514	84,19
		3	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	167.894.800	147.435.800	87,81
		4	Program rehabilitasi sosial	1.908.239.091	1.731.225.174	90,72
		5	Program perlindungan dan jaminan sosial	4.182.926.160	4.116.657.223	98,42
		6	Program penanganan bencana	1.121.009.332	1.085.447.332	96,83
		7	Program pengelolaan taman makam pahlawan	1.047.329.184	878.463.519	83,88
<b>8</b>	<b>TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		<b>16.232.979.475,00</b>	<b>15.527.275.058,00</b>	<b>95,65</b>	
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	14.493.916.955,00	13.819.814.481	95,35
		2	Program perencanaan tenaga kerja	119.999.900	119.598.900	99,67
		3	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	955.562.492	946.469.847	99,05
		4	Program penempatan tenaga kerja	100.005.007	99.875.800	99,87
		5	Program hubungan industrial	220.008.181	212.259.230	96,48
		6	Program pengawasan ketenagakerjaan	243.486.940	229.256.900	94,16
		7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00
<b>9</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		<b>8.284.607.841</b>	<b>7.639.150.964</b>	<b>92,21</b>	
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6.144.378.060	5.741.644.254	93,45
		2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	370.368.858	353.849.158	95,54
		3	Program perlindungan perempuan	506.592.570	360.356.646	71,13
		4	Program peningkatan kualitas keluarga	156.398.653	154.287.303	98,65
		5	Program pemenuhan hak anak (pha)	985.910.000	932.188.703	94,55

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%
			PAGU	REALISASI	
		6 Program perlindungan khusus anak	120.959.700	96.824.900	80,05
<b>10</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>		<b>17.047.977.024</b>	<b>16.042.049.013</b>	<b>94,10</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10.860.152.991	10.098.914.210	92,99
		2 Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kelautan dan kemandirian pangan	104.008.467	104.002.047	99,99
		3 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	5.352.633.126	5.137.764.000	95,99
		4 Program penanganan kerawanan pangan	410.809.856	383.081.392	93,25
		5 Program pengawasan keamanan pangan	320.372.584	318.287.364	99,35
<b>11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>11.631.381.835</b>	<b>10.662.439.127</b>	<b>91,67</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	7.517.350.098	6.961.362.286	92,60
		2 Program perencanaan lingkungan hidup	800.000.780	723.687.140	90,46
		3 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	749.998.614	623.480.904	83,13
		4 Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan	202.713.328	156.187.294	77,05
		5 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	1.650.122.725	1.561.802.105	94,65
		6 Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh	136.063.240	122.951.423	90,36
		7 Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk	375.133.100	315.770.624	84,18

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%
			PAGU	REALISASI	
		masyarakat			
		8 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	199.999.950	197.197.351	98,60
<b>12</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>8.146.535.236,00</b>	<b>7.348.901.394,00</b>	<b>90,21</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6.698.586.786,00	6.031.725.167,00	90,04
		2 Program pendaftaran penduduk	260.819.800,00	223.299.100,00	85,61
		3 Program pencatatan sipil	203.507.200,00	189.941.600,00	93,33
		4 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	443.422.400,00	388.203.237,00	87,55
		5 Program pengelolaan profil kependudukan	131.830.500,00	131.775.880,00	99,96
		6 Program pengendalian penduduk	87.648.550,00	83.161.550,00	94,88
		7 Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	320.720.000,00	300.794.860,00	93,79
<b>13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		<b>13.015.068.993,00</b>	<b>11.370.352.283,00</b>	<b>87,36</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6.569.473.250,00	6.063.955.676,00	92,31
		2 Program penataan desa	171.803.110,00	96.746.650,00	56,31
		3 Program peningkatan kerjasama desa	349.999.693,00	304.352.700,00	86,96
		4 Program administrasi pemerintahan desa	1.124.707.819,00	950.604.521,00	84,52
		5 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	4.799.085.121,00	3.954.692.736,00	82,41

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%
			PAGU	REALISASI	
<b>14</b>		<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>19.092.032.854</b>	<b>17.036.965.667</b>	<b>89,24</b>
		1 Program pelayanan administrasi perkantoran	13.769.953.786	12.473.502.842	90,58
		2 Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	891.276.069	727.071.696	81,58
		3 Program pengelolaan pelayanan	3.593.522.999	3.294.395.329	91,68
		5 Program pengelolaan keuangan daerah	837.280.000	541.995.800	64,73
<b>15</b>		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>24.927.879.921,00</b>	<b>23.846.487.541</b>	<b>95,66</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	9.401.594.728	8.976.934.494	95,48
		2 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	8.694.999.797	8.421.865.844	96,86
		3 Program pengelolaan aplikasi informatika	6.433.685.642	6.123.399.971	95,18
		4 Program penyelenggaraan statistik sektoral	197.599.754	140.973.782	71,34
		5 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	200.000.000	183.313.450	91,66
<b>16</b>		<b>KOPERASI DAN UMKM</b>	<b>15.671.220.440</b>	<b>14.921.356.814</b>	<b>95,22</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	9.241.331.230	8.668.207.189	93,80
		2 Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	870.000.000	742.352.615	85,33
		3 Program pemberdayaan menengah, usaha kecil dan mikro kecil	3.855.615.910	3.830.256.210	99,34
		4 Program pengembangan UMKM	1.704.273.300	1.680.540.800	98,61
<b>17</b>		<b>PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>	<b>9.450.912.990</b>	<b>8.716.389.596</b>	<b>92,23</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah	4.016.335.345	3.898.567.109	97,07
		2 Program pengembangan iklim penanaman modal	1.080.987.288	1.012.782.750	93,69
		3 Program promosi penanaman modal	3.039.594.669	2.734.736.361	89,97

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%	
			PAGU	REALISASI		
		4	Program pelayanan penanaman modal	603.996.367	570.769.535	94,50
		5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	709.999.321	499.533.841	70,36
<b>18</b>	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>			<b>33.356.788.775</b>	<b>32.444.672.913</b>	<b>97,27</b>
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8.070.737.520	7.502.059.777	92,95
		2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2.833.378.931	2.601.939.270	91,83
		3	Program pengembangan daya saing keolahragaan	20.452.672.324	20.340.673.866	99,45
		4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	2.000.000.000	2.000.000.000	100
<b>19</b>	<b>PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			<b>5.407.787.480</b>	<b>5.057.624.677</b>	<b>93,52</b>
		1	Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	2.554.256.777	2.431.369.397	95,19
		2	Program pembinaan perpustakaan	2.492.082.319	2.283.304.346	91,62
		3	Program pelestarian koelksi nasional naskah kuno	36.460.054	36.372.554	99,76
		4	Program pengelolaan arsip	324.988.330	306.578.380	94,34
<b>20</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>112.045.090.701</b>	<b>110.242.610.781</b>	<b>98,39</b>
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	36.972.133.401	35.508.155.333	96,04
		2	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	8.079.107.500	8.033.693.904	99,44
		3	Program pengelolaan perikanan tangkap	54.103.051.500	53.967.296.280	99,75
		4	Program pengelolaan perikanan budidaya	6.258.741.300	6.150.194.700	98,27
		5	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	6.175.857.000	6.126.507.953	99,20
		6	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	456.200.000	456.762.611	100,12
<b>21</b>	<b>PARIWISATA</b>			<b>30.319.650.370</b>	<b>28.877.859.577</b>	<b>95,24</b>

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%	
			PAGU	REALISASI		
		1	Program penunjang urusan pemerintah daerah	11.710.360.939	10.757.686.872	91,86
		2	Program peningkatan daya tarik wisata provinsi	4.854.446.621	4.707.912.939	96,98
		3	Program pemasaran pariwisata	8.508.803.337	8.272.762.543	97,23
		4	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	5.246.039.473	5.139.497.223	97,97
		5	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3.083.428.179	2.845.049.762	92,27
<b>22</b>	<b>PERTANIAN</b>			<b>53.177.791.662</b>	<b>50.158.483.835</b>	<b>94,32</b>
		1	Program pengelolaan pendidikan	3.277.922.940	3.095.654.793	94,44
		2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	37.954.899.025	35.930.426.042	94,67
		3	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.215.237.154,00	1.166.036.400,00	95,95
		4	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	9.111.868.537	8.425.168.890	92,46
		5	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	299.950.485	281.311.780	93,79
		6	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	99.983.600	98.412.800	98,43
		7	Program perizinan usaha pertanian	39.340.000	32.690.000	83,10
		8	Program penyuluhan pertanian	1.178.589.921	1.128.783.130	95,77
<b>23</b>	<b>KEHUTANAN</b>			<b>68.287.380.804</b>	<b>58.017.863.737</b>	<b>84,96</b>
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6.060.504.975	5.200.610.057	85,81
		2	Program pengelolaan hutan	39.132.731.461	34.107.827.629	87,16
		3	Program konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	424.998.641	348.215.280	81,93

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%	
			PAGU	REALISASI		
		4	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	6.627.986.200	6.266.874.700	94,55
		5	Program pengelolaan daerah aliran sungai (das)	16.041.159.527	12.094.336.071	75,40
<b>24</b>	<b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>		<b>9.669.607.558</b>	<b>8.595.032.690</b>	<b>88,89</b>	
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	2.386.952.595	1.984.253.153	83,13
		2	Program pengelolaan aspek kegeologian	415.451.907	344.242.610	82,86
		3	Program pengelolaan mineral dan batubara	745.972.811	675.389.810	90,54
		4	Program pengelolaan energi terbarukan	2.050.010.056	1.818.318.426	88,70
		5	Program pengelolaan ketenagalistrikan	4.071.220.189	3.772.828.691	92,67
<b>25</b>	<b>PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		<b>16.841.240.195</b>	<b>16.428.698.810</b>	<b>97,55</b>	
		1	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	68.230.000	68.122.000	99,84
		2	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.243.182.000	3.241.722.000	99,95
		3	Program pengembangan ekspor	324.124.000	323.695.000	99,87
		4	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	351.564.000	351.110.800	99,87
		5	Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	3.727.708.195	3.709.107.710	99,50
		5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	9.126.432.000	8.734.941.300	95,71
<b>26</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		<b>90.200.572.231</b>	<b>81.454.286.764</b>	<b>90,30</b>	
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	76.346.879.551	68.715.024.581	90,00
			Program penataan organisasi	3.987.028.909	3.844.561.981	96,43
			Program pemerintahan dan otonomi daerah	2.908.723.000	2.838.217.196	97,58
			Program kesejahteraan rakyat	299.999.650	118.246.348	39,42
			Program fasilitasi dan	3.036.100.490	2.950.747.792	97,19

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%
			PAGU	REALISASI	
		koordinasi hukum			
		Program perekonomian dan pembangunan	2.459.290.416	1.954.196.244	79,46
		Program kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa	946.548.815	853.447.758	90,16
		Program kebijakan administrasi pembangunan	216.001.400	179.844.864	83,26
<b>27</b>	<b>PERBATASAN</b>		<b>2.892.877.411</b>	<b>2.244.583.317</b>	<b>77,59</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	2.482.814.392	1.866.639.550	75,18
		2 Program pengelolaan perbatasan	410.063.019	377.943.767	92,17
<b>28</b>	<b>PENGHUBUNG</b>		<b>20.447.827.683</b>	<b>16.018.841.872</b>	<b>78,34</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	17.401.311.593	13.584.974.940	78,07
		2 Program pelayanan penghubung	3.046.516.090	2.433.866.932	79,89
<b>29</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		<b>22.028.231.403</b>	<b>19.701.425.077</b>	<b>89,44</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	13.961.266.849	12.452.646.080	89,19
		2 Program penyelenggara pengawasan internal	8.066.964.554	7.248.778.997	89,86
<b>30</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>29.103.625.679</b>	<b>74.124.600</b>	<b>0,254691978</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah	12.528.350.117	74.124.600	0,591654921
		2 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	6.504.131.906	-	
		3 Program koordinasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	9.418.013.623	-	
		4 Program penelitian dan pengembangan daerah	653.130.033	-	
<b>31</b>	<b>KEUANGAN</b>		<b>14.977.356.003,00</b>	<b>12.941.975.285,00</b>	<b>86,41</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	12.369.086.722,00	10.715.660.299,00	86,63
		2 Program pengelolaan keuangan daerah	1.199.826.716,00	1.167.688.195,00	97,32
		3 Program pengelolaan barang milik daerah	1.408.442.565,00	1.058.626.791,00	75,16

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%
			PAGU	REALISASI	
<b>32</b>		<b>PENDAPATAN</b>	<b>44.219.279.235,00</b>	<b>41.930.309.918,00</b>	<b>94,82</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	34.000.002.372,00	32.727.713.908,00	96,26
		2 Program pengelolaan keuangan daerah	1.199.826.716,00	1.167.688.195,00	97,32
		3 Program pengelolaan pendapatan daerah	9.019.450.147,00	8.034.907.815,00	89,08
<b>33</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>14.442.467.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8.604.068.840	-	
		2 Program kepegawaian daerah	5.838.398.638	-	
<b>34</b>		<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>22.550.743.600</b>	<b>19.548.557.956</b>	<b>86,69</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	9.277.332.769	8.586.241.841	92,55
		2 Program pengembangan sumber daya manusia	13.273.410.831	10.962.316.115	82,59
<b>35</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>80.930.703.533,00</b>	<b>76.875.371.935,00</b>	<b>94,99</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	30.180.963.021,00	26.785.915.571,00	88,75
		2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	50.749.740.512,00	50.089.456.364,00	98,70
<b>36</b>		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>14.375.265.102</b>	<b>13.351.719.563</b>	<b>92,8798</b>
		1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	7.014.453.213	6.580.368.509	93,8116
		2 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.864.711.591	1.752.743.698	93,9954
		3 Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	4.017.651.207	3.640.823.205	90,6207
		4 Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	488.816.431	476.600.721	97,5010

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021		%	
			PAGU	REALISASI		
		5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	156.038.140	146.509.449	93,8934
		6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	833.594.520	754.673.981	90,5325
<b>TOTAL</b>			<b>1.862.860.045.505,00</b>	<b>1.138.008.089.204,80</b>	<b>61,09</b>	

Sumber : OPD Promal, 2022 Diolah

### 2.6.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dalam hal ini indikator tersebut telah termuat dalam dokumen perencanaan (RPJMD). Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai intervensi program dan kegiatan apakah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu juga IKK merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja mulai dari masing-masing perangkat daerah (OPD).

Keberhasilan pencapaian IKK tentunya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya dari kinerja OPD atau berbagai terobosan yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi dari kondisi lingkungan atau situasi yang terjadi pada saat itu. Pencapaian IKK Provinsi Maluku melalui OPD pada tahun 2021 mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020 dimana sangatlah dipengaruhi oleh situasi akan penyebaran covid-19, terhadap penyebaran covid-19 menjadikan pemerintah daerah tidak efektif dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang mampu mendorong tingkat pencapaian setiap indikator.

Perkembangan capaian di tahun 2021 dapat disimpulkan dari total 225 Indikator kinerja kunci (IKK) yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah 77 atau 34.22 persen indikator melampaui target dan meningkat dari tahun 2020 sebesar 2.81%.. Indikator yang tercapai sebesar 25.78%

meningkat sebanyak 12.62% dari tahun 2020. Indikator yang belum tercapai mengalami perbaikan atau turun dari tahun 2020 yakni sebesar 35.11%, sementara sebanyak 4.89% indikator yang tidak dapat ditampilkan di tahun 2021.

Gambaran mengenai capaian kinerja OPD yang dilihat melalui tingkat ketercapaian indikator kinerja kunci secara rinci tersaji pada gambar berikut :

**Gambar 2.15**  
**Rekap Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Maluku**  
**Tahun 2019 – 2022**



Sumber: OPD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

Selanjutnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan bidang urusan pemerintah Provinsi Maluku tahun 2022 tersaji sebagaimana tebael capaian berikut ini :

**Tabel. 2.63**  
**Capaian Kinerja OPD Provinsi Maluku Tahun 2022**

NO.	Bidang Urusan Pembangunan Daerah	Jumlah IKK	Status Pencapaian			
			Melebihi Target	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada Data
1	Bidang Pendidikan	3	-	1	1	1
2	Bidang Kesehatan	63	25	4	32	2
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	3	3	2	-
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	-	1	2	2

NO.	Bidang Urusan Pembangunan Daerah	Jumlah IKK	Status Pencapaian			
			Melebihi Target	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada Data
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3	1	2	-	-
6	Bidang Sosial	10	-	10	-	-
7	Bidang Tenaga Kerja	5	-	-	5	-
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	22	7	-	15	-
9	Bidang Pangan	4	3	-	1	-
10	Bidang Lingkungan Hidup	2	2	-	-	-
11	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	2	3	-	-
12	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	1	-	-
13	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	-	1	1	1
14	Bidang Perhubungan	2	1	-	1	-
15	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	1	1	2	2
16	Bidang Penanaman Modal	5	2	-	3	-
17	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7	2	1	4	-
18	Bidang Komunikasi dan Informatika	3	1	-	2	-
19	Bidang Statistik	1	-	1	-	-
20	Bidang Persandian	2	-	-	2	-
21	Bidang Kebudayaan	1	-	-	1	-
22	Bidang Perpustakaan	2	1	-	1	-
23	Bidang Kearsipan	3	1	-	1	1
24	Bidang Kelautan dan Perikanan	3	1	-	2	-
25	Bidang Pariwisata	4	1	2	1	-
26	Bidang Pertanian	2	1	-	1	-
27	Bidang Kehutanan	4	2	-	2	-
28	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	4	-	3	1	-
29	Bidang perdagangan	4	2	1	1	-
30	Bidang Perindustrian	2	2	-	-	-
32	Bidang Perencanaan	4	-	1	3	-
33	Bidang Keuangan	4	2	1	1	-
34	Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	6	-	5	1	-
35	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	-	2	-	-
36	Fungsi Lainnya	22	-	11	9	2

NO.	Bidang Urusan Pembangunan Daerah	Jumlah IKK	Status Pencapaian			
			Melebihi Target	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada Data
<b>Total</b>		<b>228</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>98</b>	<b>11</b>

Sumber : OPD Promal, 2022 Diolah

**Tabel 2.64**  
**Evaluasi Capaian SPM Provinsi Maluku Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja/Jenis	Indikator Pencapaian/	Target	Realisasi (2022)		
	Layanan SPM	Output	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
<b>Urusan Pendidikan</b>						
1	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah warga negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Atas	123.736	91.314	32.422	73.91
2	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1.551	851	700	54.87
<b>Urusan Kesehatan</b>						
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	15.224	15.224	0	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai stand	11.947	11.947	0	100
<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>						
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota	8750	8750	0	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten /kota	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100	0	100
<b>Urusan Perumahan dan Permukiman</b>						

No	Indikator Kinerja/Jenis	Indikator Pencapaian/	Target	Realisasi (2022)		
	Layanan SPM	Output	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah rumah korban yang berhak memperoleh rumah layak huni				82,67
2	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Provinsi	49	49	0	100
<b>Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat</b>						
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	4	2	2	50,94
<b>Urusan Sosial</b>						
1	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	151	151	0	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1049	1049	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50	50	0	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	7	7	0	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	5010	4950	60	

## **2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.7.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024. Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah yang menunjukkan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku;
5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
6. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya; dan
7. Belum optimalnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif.

### **2.7.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **2.7.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **2.7.2.1.1 Bidang Pendidikan**

Permasalahan pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan efektifitas birokrasi melalui penguatan tata kelola pelayanan pendidikan;
- b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan program dan kegiatan pelatihan, bimtek dan penilaian kinerja guru yang tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan kompetensi guru;

- c. Perluasan akses melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara merata serta pemenuhan kesejahteraan siswa;
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik /pengajar serta pemerataan pada semua jenjang pendidikan;
- e. Masih terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan; dan
- f. Belum optimalnya tatakelola bidang pendidikan.

#### **2.7.2.1.2 Bidang Kesehatan**

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat capaian indikator kesehatan tahun 2022 didapati Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Maluku meliputi:

- a. Masa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan capaian program pembangunan di Bidang Kesehatan;
- b. Keterbatasan anggaran kesehatan di tingkat Kab/Kota
- c. Dana pajak rokok di setiap kab/kota belum sepenuhnya digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- d. Masalah multidimensional di masyarakat memberikan kontribusi terkait masalah kesehatan seperti mitos, kebiasaan, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lainnya.
- e. Kurangnya SDM terlatih baik di tingkat provinsi, kab/kota maupun puskesmas.

#### **2.7.2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih ditemui di Provinsi Maluku, meliputi:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik;
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan;

- d. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
- e. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya; dan
- f. Masih rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif.

#### **2.7.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi:

- a. Tingginya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal per KK (Kepala Keluarga) mengakibatkan masih tingginya tingkat backlog;
- b. Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan pedesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni;
- c. Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat penduduk;
- d. Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarannya yang belum memadai;
- e. Pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan terkendala proses pengadaan lahan;
- f. Data base perumahan dan permukiman yang belum terupdate;
- g. Terdapat sisa kawasan kumuh seluas 1.283,43 Ha yang harus ditangani;
- h. Belum mantapnya sistem koordinasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman, antar wilayah maupun antar sektor.

#### **2.7.2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan pembangunan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

- a. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota;
- b. Belum optimalnya upaya-upaya penegakan Perda;
- c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Masih rendahnya implementasi daerah terkait dengan penganggaran SPM Bidang Trantibumlinmas dalam APBD.

#### **2.7.2.1.6 Bidang Sosial**

Permasalahan pembangunan Bidang Sosial, meliputi:

- a. Belum semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran;
- b. Masih banyak anak stunting yang juga merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
- c. Data ter[adu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penentu pemberian bantuan masih harus terus diverifikasi dan dimutakhirkan.

#### **2.7.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **2.7.2.2.1 Bidang Tenaga Kerja**

Permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja, meliputi:

- a. Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial dikabupaten/kota belum optimal akibat terbatasnya Pegawai Mediator Hubungan Industrial;
- b. Penerapan Upah Minimum diperusahaan sebagaimana keputusan Gubernur belum optimal, terutama perusahaan-perusahaan kecil yang beroperasi di Maluku, yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja;
- c. Belum tersedianya lembaga sertifikasi tenaga kerja di daerah untuk memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja; dan

- d. Pengembangan permukiman transmigrasi baru (PTB) belum terlaksana karena terkendala aspek clean and clear (2C).

#### **2.7.2.2.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan;
- b. Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung;
- c. Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah;
- d. Kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan instansi terkait, mengenai data terpilah gender dan anak
- e. Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- f. Kota layak anak dengan capaian yang baru terbentuk pada 2 kabupaten;
- g. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi; dan
- h. Proses penanganan masalah kekerasan pada perempuan dan anak belum tertangani secara maksimal.

#### **2.7.2.2.3 Bidang Pangan**

Permasalahan pembangunan Bidang Pangan, meliputi:

- a. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras yang cukup tinggi dan kurangnya konsumsi sayur dan buah;
- b. Belum optimalnya mekanisme distribusi pangan;
- c. Belum optimalnya penanganan pola konsumsi dan penganeekaragaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;

- d. Belum optimalnya pengelolaan pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. Belum stabilnya pasokan pangan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM); dan
- g. Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat.

#### **2.7.2.2.4 Bidang Pertanahan**

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanahan, yakni:

Masih terdapat permasalahan penegasan batas antar daerah (desa, kecamatan maupun kabupaten/kota) yang belum terselesaikan

#### **2.7.2.2.5 Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan;
- b. Sistem basis data dan informasi lingkungan hidup belum optimal;
- c. Lemahnya koordinasi dan fungsi pengawasan dalam penegakan hukum/sanksi;
- d. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana bidang lingkungan hidup;
- e. Terbatasnya regulasi bidang lingkungan; dan
- f. Belum optimalnya upaya penurunan emisi karbon serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya.

#### **2.7.2.2.6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

- a. Belum meratanya sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik;

- b. Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di desa;
- c. Belum berfungsinya Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- d. Belum sinergisnya Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa;
- e. Belum optimalnya pengembangan perekonomian masyarakat desa; dan
- f. Terbatasnya sarana prasarana ekonomi dan pelayanan dasar perdesaan

**2.7.2.2.7 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, meliputi:

- a. Pertambahan penduduk yang cepat disebabkan oleh migrasi dan kelahiran;
- b. Persebaran penduduk yang tidak merata serta tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c. Belum optimalnya pembangunan keluarga di Maluku.

**2.7.2.2.8 Bidang Perhubungan**

Permasalahan pembangunan Bidang Perhubungan, meliputi:

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi;
- b. Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi;
- c. Belum maksimalnya jangkauan pelayanan sarana transportasi dalam membangun konektivitas wilayah; dan
- d. Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi.

#### **2.7.2.2.9 Bidang Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi dan informatika, meliputi:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu komunikasi, kehumasan, desain grafis;
- b. Terbatasnya alat penunjang kegiatan dokumentasi dan publikasi Pemerintah Daerah
- c. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan peningkatan keamanan informasi;
- d. Akses internet yang dikelola DISKOMINFO Provinsi Maluku sudah berjalan namun belum optimal karena belum memenuhi kebutuhan pengguna layanan akses internet karena banyaknya pengguna layanan yang hanya dilayani oleh bandwidth sebesar 222 Mbps yang terbagi di 4 lokasi (30 titik pengguna) dan belum dapat melayani seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku karena keterbatasan anggaran.

#### **2.7.2.2.10 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

- a. Keterbatasan akses pemasaran dalam mengakses pasar atas komoditas;
- b. Keterbatasan daya saing koperasi; dan
- c. Keterbatasan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.

#### **2.7.2.2.11 Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan pembangunan Bidang Penanaman Modal  
Permasalahan Pembangunan meliputi:

- a. Terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat khususnya pelaku usaha sebagai penggunaan layanan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku;

- b. Terjadi penurunan nilai realisasi investasi yang disebabkan karena dampak pandemi covid19 dan krisis ekonomi global perang dunia Ukraina-Rusia sehingga mengakibatkan minat investasi oleh para penanam modal potensial jadi menurun; dan
- c. Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang belum memadai pada daerah potensial untuk berinvestasi.

#### **2.7.2.2.12 Bidang Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan:**

Permasalahan pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:

- a. Pembinaan olahraga yang belum terarah;
- b. Tenaga/pelatih olahraga yang bersertifikasi sesuai standar nasional;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Kurangnya koordinasi antar para pemangku kepentingan;
- e. Minimnya dukungan anggaran dalam kegiatan olahraga.

#### **2.7.2.2.13 Bidang Statistik**

Permasalahan pembangunan Bidang Statistik, yakni:

Penyediaan data statistik sektoral dalam penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku sudah berjalan namun ada kekurangan yang perlu diperbaiki seperti belum maksimal karena OPD sebagai Produsen Data belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pergub 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku serta terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan data statistik.

#### **2.7.2.2.14 Bidang Persandian**

Permasalahan pembangunan Bidang Persandian, meliputi:

- a. Sistem keamanan informasi masih lemah;
- b. Kesadaran keamanan informasi masih rendah; dan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi.

#### **2.7.2.2.15 Bidang Kebudayaan**

Permasalahan pembangunan Bidang Kebudayaan, meliputi:

- a. Belum optimalnya nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya;
- b. Keterbatasan kewenangan pengelolaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi, berdampak terhadap optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya di wilayahnya; dan
- c. Masih kurangnya tempat kesenian sebagai area untuk mengekspresikan dan pementasan seni budaya daerah.

#### **2.7.2.2.16 Bidang Perpustakaan**

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan, meliputi:

- a. Rendahnya kesadaran dan minat baca masyarakat dalam melakukan aktivitas;
- b. Rendah kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan.

#### **2.7.2.2.17 Bidang Kearsipan**

Permasalahan pembangunan Bidang Kearsipan, meliputi:

- a. Rendahnya komitmen Perangkat Daerah, pencipta kearsipan dan daerah binaan untuk mengelola kearsipan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang baku.
- b. Lemahnya penyelenggaraan manajemen kearsipan berbasis TIK
- c. Minimnya tenaga arsiparis/kearsipan yang handal

### **2.7.2.3 Urusan Pilihan**

#### **2.7.2.3.1 Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Masih terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terampil;
- b. Belum optimalnya Produksi Perikanan Budidaya di Maluku (ikan dan rumput laut);

- c. Belum optimalnya penyediaan sarana pendukung dan infrastruktur perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan dan alat tangkap modern dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap;
- e. Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi dalam rangka pemerataan pertumbuhan; dan
- f. Belum optimalnya pembinaan tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan.

#### **2.7.2.3.2 Bidang Pariwisata**

Permasalahan pembangunan Bidang Pariwisata, meliputi:

- a. Perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca yang ekstrim;
- b. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi domestik
- c. Masih kurangnya pengembangan pada potensi daya tarik wisata di berbagai daerah;
- d. Masih rendahnya kualitas SDM kepariwisataan; dan
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat lokal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (media social, influencer, kerjasam sosial, dll) dalam mempromosikan pariwisata.

#### **2.7.2.3.3 Bidang Pertanian**

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanian, meliputi:

- a. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan;
- b. Belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran;
- c. Kurangnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun;
- d. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;
- e. Rendahnya nilai tukar petani; dan

- f. Belum optimalnya kinerja aparaturnya pertanian serta belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.

#### **2.7.2.3.4 Bidang Kehutanan**

Permasalahan pembangunan Bidang Kehutanan, meliputi:

- a. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik;
- b. Penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi;
- c. Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan belum seluruhnya diakui oleh para pihak/masyarakat;
- d. Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi;
- e. Belum tersedianya data kondisi dan potensi kawasan hutan (baik kayu dan non kayu) sebagai dasar penyusunan rencana makro kehutanan;
- f. Kondisi kekritisitas DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Maluku;
- g. Belum optimalnya penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan;
- h. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan daya beli masyarakat sekitar hutan;
- i. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan;
- j. Peran kelembagaan pengelolaan kawasan hutan belum optimal;
- k. Belum terciptanya sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan; dan
- l. Masih terjadinya pencurian hasil hutan, pembakaran liar dan gangguan keamanan hutan lainnya.

#### **2.7.2.3.5 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:

- a. Rendahnya rasio elektrifikasi Provinsi Maluku;
- b. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pemanfaatan penerangan dan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- c. Minimnya data dan informasi potensi energi dan sumber daya mineral serta daerah rawan bencana geologi;
- d. Rendahnya ketaatan serta pemahaman pelaku usaha pertambangan terhadap regulasi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Kurangnya komitmen masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana energi terbarukan;
- f. Kurangnya sumber daya aparatur yang profesional dan terampil di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- g. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar selain minyak.

#### **2.7.2.3.6 Bidang Perdagangan**

Permasalahan pembangunan Bidang Perdagangan, yakni:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah pengembangan ekonomi lokal;
- b. Pola pikir eksportir yang masih menginginkan ekspor dari luar Maluku;
- c. Biaya logistik di Maluku masih cukup tinggi;
- d. Struktur dan prosedur birokrasi masih perlu biaya tambahan dan proses perizinan masih lambat;
- e. Komoditi ekspor Provinsi Maluku masih berorientasi pada komoditi perikanan, perkebunan, belum menyentuh pada komoditi yang lain seperti industri kreatif, kehutanan,

perikanan dan lain-lain sehingga lambat dalam peningkatan ekspor.

#### **2.7.2.3.7 Bidang Perindustrian**

Permasalahan pembangunan Bidang Perindustrian, meliputi:

- a. Terbatasnya kapasitas SDM terutama pelaku IKM agar dapat memanfaatkan peluang usaha pada era penggunaan teknologi informasi;
- b. Kurangnya penggunaan teknologi yang tepat sasaran khususnya untuk IKM Maluku yang diharapkan dapat menekan harga produksi produk, peningkatan kualitas produk, serta memberikan efektivitas produksi;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan investasi terutama pada sektor industri; dan
- d. Minimnya infrastruktur pendukung di Maluku dalam hal ini investor.

#### **2.7.2.3.8 Bidang Transmigrasi**

Permasalahan pembangunan Bidang Transmigrasi, meliputi:

- a. Tidak ada Dukungan Anggaran APBD/ APBN; dan
- b. Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

#### **2.7.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **2.7.2.4.1 Bidang Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan pembangunan Bidang Pemerintahan, meliputi:

- a. Belum optimalnya tata kelola layanan pemerintah dalam penyelenggaraan penyebaran informasi dan publikasi;
- b. Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi sebagai media publikasi;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama daerah; dan

d. Kapasitas Sumber Daya Manusia belum memadai.

#### **2.7.2.4.2 Bidang Pengawasan**

Permasalahan pembangunan Bidang Pengawasan, meliputi:

- a. Masih kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap tugas-tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam bidang pengawasan yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota, sehingga masih membebani anggaran daerah untuk melakukan tugas-tugas tersebut;
- b. Masih tingginya ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, utamanya di bidang keuangan, kepegawaian, pendapatan dan beberapa bidang teknis lainnya seperti pendidikan, desa dan pelayanan dasar;
- c. Masih belum disusunnya Matriks Resiko Kecurangan (Fraud Risk Matrix) untuk mendeteksi potensi-potensi kecurangan yang ada dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, matrix dapat menjadi acuan untuk menyusun program-program terkait pencegahan korupsi maupun strategi investigasi ke depan;
- d. Belum dibuat Resiko Operasional yang detail di tingkat OPD dalam rangka proses pengendalian internal di tingkat yang paling bawah; dan
- e. Belum dicanangkannya, dan belum ada pilot project terkait zona integritas, sehingga upaya untuk mewujudkan Instansi yang menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) masih belum bisa dilakukan.

#### **2.7.2.4.3 Bidang Perencanaan**

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan, meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan daerah yang belum Holistik, Integratif, Terpadu dan Sosial;
- b. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur perencana;
- c. Belum memadainya sarana prasarana perkantoran pendukung perencanaan;
- d. Belum optimalnya sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah; dan
- e. Belum optimal fungsi kelitbangan dan kerjasama pembangunan daerah.

#### **2.7.2.4.4 Bidang Keuangan**

Permasalahan pembangunan Bidang Keuangan, meliputi:

- Transportasi ke Kabupaten/Kota untuk tindak lanjut hasil evaluasi terkendala dampak covid-19;
- Keterbatasan waktu dalam menginventarisasi tanah, bangunan kendaraan; dan OPD belum melakukan inventarisasi OPD;
- Belum memadainya Alokasi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan manajemen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang maksimal;
- Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, pajak daerah dan alokasi dana transfer dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Maluku.

#### **2.7.2.4.5 Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan pembangunan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan rekrutmen ASN belum berdasarkan kebutuhan objektif instansi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. Proses usul berkas pangkat, pensiun, mutasi dan ijin belajar tidak tepat waktu dan belum sesuai ketentuan peraturan;

- c. Proses usul berkas pangkat, pensiun, mutasi dan ijin belajar tidak tepat waktu dan belum sesuai ketentuan peraturan;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN belum ditegakkan secara optimal;
- e. Pelayanan kesejahteraan ASN belum terkelola dengan baik;
- f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi belum terintegrasi dengan optimal.
- g. Kualitas SDM aparatur kediklatan yang terdiri dari Tenaga Pengelola Kediklatan, tenaga penyelenggara kediklatan dan tenaga pengajar masih terbatas.
- h. Kualifikasi pendidikan aparatur tenaga pengajar masih belum memadai.
- i. Dukungan dana yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN dalam melaksanakan program kediklatan masih terbatas dan belum berdasarkan kebutuhan yang berbasis kinerja.

#### **2.7.2.4.6 Fungsi Lainnya**

Permasalahan dalam fungsi lain penunjang pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah yang mendukung peningkatan pendapatan;
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan kas dan aset tetap pada kabupaten/ kota yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum akuntabel;
- c. Keterlambatan penyelesaian rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akibat belum adanya standar waktu pengusulan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah oleh eksekutif dan legislative;

- d. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah kabupaten/kota terkait mekanisme pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota oleh Gubernur; dan
- e. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGARAAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2024 sejatinya tercermin dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan menjadi penting guna mengukur keberhasilan program pembangunan sebagai perwujudan dari upaya daerah mencapai visi dan misi pembangunan dalam 1 perodesasi RPJMD.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, penurunan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Untuk itu maka Pada tabel berikut akan disajikan proyeksi indikator Makro Provinsi Maluku di tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Provinsi Maluku Tahun 2023-2024**

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Proyeksi	
		2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70.39	70.69
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	0.5	1
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	16.13	15.73
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6.12	6.05
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.60 – 6.27	6.10-6.71
6	Indeks Gini (Poin)	0.300	0.295
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	26.94	27.5

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi 2019-2024

### 7.1. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Provinsi Maluku tahun 2022 yang berujuk pada perubahan RPJMD periode pembangunan 2019-2024.

**Tabel 7.2.**  
**Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku**  
**Tahun 2023-2024**

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target	
			2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	B (65,00)		B (70,00)	BB (72.50)
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,71	70.22	70,39	70.69
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.33	5.73	5,60 - 6,27	6.10-6.71
4	Tingkat Kemiskinan	%	16.30	16.23	16.13	15.73
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.93	6.88	6,12	6.05
6	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%			23,40	24.22
7	Indeks Williamson/Indeks Kesenjangan Wilayah	-	0.395M/0.374NM		0,285	0.25
8	Indeks Gini	-	0,316	0.306	0,300	0.295
9	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	-	76.30		80,75	81
10	Indeks pembangunan Pemuda	-	54		54,50	55

Sumber : Perubahan RPJMD Maluku 2019 - 2024

### 7.2. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. IKK Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode 2019-2024.

### 7.2.1. Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah (Impact)

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) memuat IKU daerah maupun IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) yang digunakan untuk menggambarkan aspek/indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bersama seluruh perangkat daerah terkait yang dirangkum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7.3**  
**Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Provinsi Maluku Tahun 2022-2024**

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Ket	
			2022	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00-5,82	5.73	5,60 6,27	-	6.10-6.71	Indikator Makro
2	Tingkat inflasi	Persen	2	6.48	2		2.09-2.99	
3	PDRB ADHB		52.355,41	52.692,05	54.824,33		57.293,24	
4	PDRB Per Kapita	Juta (Rp)	26,38	28.53	26,94		27.5	
5	Indeks gini	Indeks	0,305	0.306	0,3		0.295	
6	Persentase Penduduk miskin	Persen	16,52	16.23	16,13		15.73	
7	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	6,45	6.88	6,12		6.05	
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,5	0,67	0,5		0.5	
9	Pengeluaran perkapita		1.113.825	8.876.000	1.161.389		1.196.209	
10	IPM	Poin	70,1	70.22	70,39		70.69	
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (67,50)	CC (58,49)	B (70,00)		BB (72.50)	IKU Pemda
12	Nilai SAKIP	Nilai	B (70,00)	B (60,35)	BB (72,50)		BB (70.00)	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Ket
			2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,92	3.90	3,96	3.4	
14	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,3	3.35	3,35	3.4	
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	70,5	58,13	71	71.5	
16	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	66,65	60,20	71,65	76.95	
17	Indeks pembangunan Pemuda	Indeks	54		54,5	55	
18	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	93,49		93,74	94	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>1</b>	<b>Persentase pengeluaran rata-rata perkapita per bulan</b>						
a	Makanan	Persen	49.7		49.5		
b	Non Makanan	Persen	50.3		50.5		
<b>2</b>	<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>Persen</b>	<b>&lt; 61</b>		<b>&lt; 61</b>		
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
<b>3</b>	<b>Pangan</b>						
3.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita		1.113.825		1.161.389	1.196.209	IKU Pemda
3.2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita		578.440		611.731	637.738	
<b>4</b>	<b>Pertanian</b>						
4.1	Nilai Tukar Petani		98,5		100,5	72.25	
<b>5</b>	<b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>						
5.1	Indeks Infrastruktur		70,75		71,5	72.25	
5.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak		52,5		55	60	
5.3	Rasio elektrifikasi		96,5		97	97.5	
5.4	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mampu Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler		846		871	896	
<b>6</b>	<b>Iklm Berinvestasi</b>						IKU

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Ket
			2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Jumlah Kejadian Kriminalitas yang Dilaporkan		1.950	13	1.750	1.500	Pemda
6.2	Pertumbuhan Investasi		15		20	25	
6.3	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6325		0,645	56	
<b>7</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>						
7.1	Rasio ketergantungan		56	48,17	54,5	53	

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

### 7.2.2. Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari Program Perangkat Daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah. Pandemi COVID-19 mempengaruhi pembangunan Provinsi Maluku. sehingga indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/impact Tahun 2022-2023 mengalami penyesuaian berdasarkan hasil desk penyesuaian indikator kinerja daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait yang dirangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7.4**  
**Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Provinsi Maluku Tahun 2023-2024**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	%	98,91	99.18	Dinas Pendidikan
2	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Dengan Satuan: Persentase Angka Kelulusan)	%	100	100	Dinas Pendidikan
3	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1:20	1:20	Dinas Pendidikan
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah /Per 1000 Kelahiran Hidup)	6	6	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah /Per 1000 Kelahiran Hidup)	7	7	
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jumlah /Per 1000 Kelahiran Hidup)	4	4	
4					
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah /Per 1000 Kelahiran Hidup)	121	119	
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	50	55	
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	%	67	60	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	kompetensi kebidanan				
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	74,3	76.2	
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	
10	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk)	> 2	> 2	
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	85	87	
12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	< 0.2	< 0.2	
13	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	90	95	
14	Cakupan kunjungan bayi	%	79	82	
15	Cakupan pembantu puskesmas	Jumlah	540	550	
16	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	81	83	
17	Cakupan pelayanan nifas	%	80	85	
18	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	37	39	Dinas Kesehatan
19	Cakupan pelayanan anak balita	%	60	65	
%	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		82	85	
21	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	
22	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes	%	90	95	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana	
			2023	2024		
23	Cakupan Pelayanan Krisis Kesehatan	%	100	100		
24	Cakupan Asi Eksklusif	%	59	62		
25	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	94,5	95		
26	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madya	Jumlah	154	165		
27	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	6,5	6		
28	Presentase Merokok pada 10 - 18 Tahun	%	8,90	8.8		
29	Cakupan Keluarga Berencana	%	75	80		
30	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	%	71	73		
31	Prevalensi Balita Stunting	%	22	20		
32	Annual Paracite Incidence (API)	%	1	0.8		
33	Slide Postivity Rate (SPR)	%	< 5	<5		
34	Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Program ISPA sesuai Standar	%	70	75		
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional	%	29	31		
36	Persentase ODHA yang Mendapat Pengobatan ARV	%	55	55		
37	Prevalensi Ibu Hamil Anemia	%	14	12		
38	Jumlah Rumah Sakit dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dengan Satuan:Jumlah)	Jumlah	6	7		Dinas Kesehatan
39	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan	%	64	65		
40	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	%	94	95		
41	Persentase Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit yang Memenuhi Syarat	%	48	48.5		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	Kesehatan				
42	Persentase Penerapan Sistem Kewaspadaan Dini	%	80	80	
43	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Jumlah	9	10	
44	Persentase Pengawasan Sarana Air Bersih	%	69	72	
45	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokor (KTR)	Jumlah	9	10	
46	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan deteksi dini Penyakit Kanker	Jumlah	9	10	
47	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Gangguan Indera	Jumlah	9	10	
48	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM	Jumlah	9	10	
49	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	Jumlah	560	580	
50	Persentase Keluarga Menggunakan Jamban Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah	76	78	
51	Persentase Kabupaten/Kota Sehat	%	24	26	
52	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Evidence Based	Jumlah	11	11	
53	Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan	%	75	80	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	Kesehatan Peduli Remaja				
54	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak	%	26	28	
55	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	14	17	
56	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	%	90	100	
57	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,8	0,8	
58	Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita	%	84	86	
59	Cakupan Pelayanan Balita (D/S)		71	73	
60	Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori	%	15	14	
61	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan terpadu PTM sesuai Standar	Jumlah	9	10	
62	Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium	%	87	91	
63	Persentase Pelaksanaan Campak Dosis Kedua (Dengan Satuan:Persen)	%	67,2	72.6	Dinas Kesehatan
64	Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama	Jumlah	11	13	
65	Rasio dokter per satuan penduduk	Per satuan penduduk	38	39	
66	Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk	Per satuan penduduk	9	10	
67	Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk	Per satuan penduduk	14	15	
68	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk	Per satuan penduduk	98	99	
69	Rasio Perawat Per Satuan Penduduk	Per satuan penduduk	230	235	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana	
			2023	2024		
70	Rasio Apoteker Per Satuan Penduduk	Per satuan penduduk	18	19		
71	Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat Per Satuan Penduduk	Per satuan penduduk	38	39		
72	Persentase Penggunaan Obat Generik di Puskesmas	%	98	99		
73	Persentase Penggunaan Obat Generik di Rumah Sakit	%	76	78		
74	Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap	%	42,50	45		
75	Persentase Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	%	52,50	55		
76	Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	79	82		
77	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	%	91	93		
78	Persentase Penyediaan Makanan Jajanan Anak Sekolah	%	79	81		
79	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan	%	94	95		
80	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendukung Kesehatan	Jumlah	18	20		Dinas Kesehatan
81	Persentase Pos Kesehatan Desa	%	44	48		
82	Persentase Kecamatan dengan Indikator Keluarga Sehat	Jumlah	4	5		
83	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memanfaatkan 10% Dana Desa untuk Kesehatan	%	49	52		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
84	Jumlah Model Intervensi Kesehatan	Jumlah	8	9	
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	75%	100%	PUPR
2	Akses Air Minum Layak	%	87,52	87,78	
3	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	%	19,41	20	
4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	75%	100%	
5	Capaian Sanitasi	Meter	923	1456	
6	Capaian Pengurangan Kumuh	Meter	8766 Meter	9520 Meter	
7	Persentase bangunan ber-IMB	%	55,00	57.5	
8	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	15%	17.50%	
9	Presentase Kemantapan Jalan	%	66,58	70.58	
10	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	18%	20%	
11	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	70,00	71.5	
1	Persentase capaian program dan	%	100	100	PERKIM

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	kegiatan dinas				
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	100	100	
3	Persentase pemukiman yang tertata	%	100	100	
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	100	100	
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	Satpol PP
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	BPBD
3	Indeks risiko bencana di daerah	Indeks	160,25	159.95	BPBD
1	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah	%	100	100	
2	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	%	100	100	
3	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	
4	Presentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100	100	Dinas Sosial
5	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100	100	
6	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	%	100	100	
7	Presentase cakupan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan	%	100	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	NAPZA				
8	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	%	100	100	
9	Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial	%	100	100	
10	cakupan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi	%	100	100	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	80	100	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	3,75	5	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	8,5	8.7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,5	9	
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan	%	63	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	0	0	Dinas PPPA
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	27,50	30	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	52	65	
4	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	47	50	
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	46	48	
6	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	%	23	25	
7	Rasio KDRT	%	0,35	0.35	
8	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	21	25	
9	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah	%	65	70	
10	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	65	70	
11	Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan	%	0	0	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan				
12	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	45	50	
13	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	30	32	
14	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	30	35	
15	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	1,50%	1.50%	Dinas PPPA
16	Persentase Keluarga Sejahtera	%	58	60	
17	Cakupan kab/kota yang mengelola sistem data gender dan anak	%	82	91	
18	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	72,72	100	
19	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	45	50	
20	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	45	50	
21	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	75	
22	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0	0	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
1	Inflasi komoditas pangan	%	<5%	<5%	Dinas Ketahanan Pangan
2	Persentase cadangan pangan	%	70%	75%	
3	Angka PPH Ketersediaan	%	100	100	
4	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu	%	62,50	65	
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100%	Sekretariat Daerah / Biro Pemerintahan
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	50%	60%	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	%	1	1	
1	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan	Dok	1	2	Dinas Lingkungan Hidup
2	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		3	3	
3	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah	Upaya	1	1	Dinas Lingkungan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana	
			2023	2024		
	bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku				Hidup	
4	Jumlah upaya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku	Upaya	1	1		
5	Jumlah objek kelembagaan MHA dan kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku yang diakui keberadaannya	Objek	3	4		
6	Jumlah upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Upaya	1	1		
7	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang diberikan untuk masyarakat	Jenis	2	2		
8	Jumlah upaya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Upaya	1	1		
9	Jumlah upaya pengelolaan persampahan	Upaya	0	0		
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,85	0,9		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	100	100		
3	Rasio pasangan ber-Akte Nikah	Rasio	100	100		
4	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan	Dok	3	3		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	Informasi Administrasi Kependudukan				
5	Status Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	
1	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif (Dengan Satuan:Kelembagaan Desa)		72	75	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Persentase Kawasan Perdesaan yang berkembang (Dengan Satuan:Persen)		44	45	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa baik	%	50	60	
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	4,33	6.33	
1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	46,27	46.23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,87	2.84	
3	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter	%	41,68	42.68	
1	Presentasi Angka Kecelakaan di Jalan Raya	Dok	0	0	Dinas Perhubungan
2	Presentasi Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek	Dok	5	7	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	Angkutan Penyeberangan, Presentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis				
3	Presentasi terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Dok	0	1	
1	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	%	100	100	Dinas Kominfo
2	Persentase pemanfaatan Jaringan TIK	%	100	100	
1	Persentase koperasi aktif	%	70	70	Dinas Koperasi dan UKM
2	Jumlah Pengukuran Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	15	17	
3	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel	%	75	80	
5	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%	92,06	92.34	
6	Persentase Usaha Kecil yang menjadi	%	25%	25%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	wirausaha				
1	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA	Jumlah	2	2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (BPMPTSP)
2	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)	Jumlah	250	250	
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,5	93	
4	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah	50	50	
5	Persentase pertumbuhan investasi	%	100%	100%	
1	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	90	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Tingkat Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	90	100	
3	Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	90	100	
1	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	47,62	4.76	Dinas Kominfo
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	20	20	Dinas Kominfo
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola	Jumlah cagar budaya	68	70	Dinas

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	secara terpadu				Pendidikan dan Kebudayaan
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62	65	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	20	21	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	75%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	35	38	
3	Jumlah tata perizinan dan penggunaan arsip secara baik	Jumlah	1	1	
<b>Urusan Pilihan</b>					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah	555,288759	566.394534	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah	213,101178	217.363202	
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan	%	75%	80%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	perundangan yang berlaku				
1	Pertumbuhan Destinasi Wisata	%	5	5	Dinas Pariwisata
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	2	2	
3	persentase pertumbuhan pengeluaran wisatawan	%	8	9	
4	Presentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	%	25	30	
5	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi	%	5	5	
1	Jumlah Penambahan Sarana Pertanian yang dikembangkan	Paket	1	1	Dinas Pertanian
2	Jumlah Penambahan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Paket	1	1	
3	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100	100	
4	Persentase pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	65	70	
5	Persentase Perizinan Usaha Pertanian yang dilaksanakan	%	100	100	
6	Cakupan bina kelompok petani	%	99	100	
1	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan	Lokasi	18	18	Dinas Kehutanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
2	persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan	%	68	0	
3	Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	Unit	15	15	
4	Jumlah Unit Bangunan Sipil Teknis KTA	Unit	175	215	
1	Jumlah Peta Potensi Geologi	Dok	23	24	Dinas ESDM
2	Jumlah Peta Potensi Air Tanah dan Jumlah Batuan Sumur Bor	Peta/Sumur Bor	21 Peta, 2 Sumur Bor	22 Peta, 3 Sumur Bor	
3	Jumlah IUP yang Dibina	IUP	9	9	
4	Jumlah IUP yang Diawasi	IUP	14	13	
5	Jumlah PETI yang tertibkan	Lokasi	8	8	
6	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	390	400	
7	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	%	0,0079	0.0083	
8	Rasio Elektifikasi	%	98	99	
9	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Jumlah RTS	375	390	
1	Jumlah Perizinan Jenis Bahan Berbahaya	Jenis	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	1	0	
3	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	3,5-4	3,5-4	
4	Jumlah realisasi jenis pupuk bersubsidi	Jenis	2	2	
5	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	10	10	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
6	Persentase Penanganan Konsumen	%	0	0	
7	Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	%	0	0	
8	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	%	0	0	
1	Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas	USD (Juta)	0	0	
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Orang	0	0	
3	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	10%	10%	
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100%	100%	
1	Persentase Pertumbuhan kawasan transmigrasi	%	40	40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Jumlah Kawasan/Unit Pemukiman Transmigrasi yang siap dibangun	Kawasan	1	1	
3	Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing	Kelompok	10	10	
1	Persentase OPD yang mengumpulkan LAKIP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	Biro Organisasi/Biro Pemerintahan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		63	68	Biro Organisasi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
3	Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah		100	100	Biro Pemerintahan
4	Persentase kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	%	100	100	Biro Kesra
5	Persentase produk hukum yang disahkan	%	100	100	Biro Hukum
6	Persentase Penurunan Inflasi Daerah	%	5,00%	5,00%	Biro Ekonomi dan Investasi
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	55	60	Biro Adm Pembangunan
8	Maturitas UKPBJ	Level	level 3	level 3	
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan	Indeks	96	97	Sek. DPRD
1	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	Bappeda
2	Status Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, RKPDP yang Tepat Waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	
3	Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	100%	
4	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100 %	100%	
5	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100 %	100%	
6	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	%	100 %	100%	
1	Jumlah Pengelolaan barang milik daerah	Dok	2	2	BPKAD
2	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan	%	85,00%	90%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan				
3	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	60,00%	60%	
4	Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	
5	Persentase terlaksannya program pengelolaan pendapatan daerah	%	100	100	Dinspenda
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	20%	20%	Biro Admistrasi Pembangunan
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	65%	65%	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	46%	48%	
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100%	100%	Bappeda
2	Provinsi Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	
1	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya	%	100%	100%	BKD
2	Persentase PNS yang meningkat Kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar	%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
3	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang Terevaluasi Kinerjanya	%	100%	100%	
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100%	100%	
5	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	100%	100%	
6	Persentase Pelayanan Kasus Kepegawaian	%	100%	100%	
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	BPSDM
1	Persentase pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku		100	100	Badan Perbatasan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				Badan Penghubung
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		100%	100%	BPPKAD
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		100%	100%	
3	Assets management		1. Ya	1. Ya	
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		2. Ya	2. Ya	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun		3. Ya	3. Ya	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
	daftar asset tetap? (Ya/Tidak)				
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		4. Ya	4. Ya	
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)				
4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		5%	5%	
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan ( <i>Information on resources available to frontline service delivery units</i> )		100%	100%	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah ( <i>Public access to fiscal information</i> )		100%	100%	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, Itjen dan Inspektorat	%	95	100	Inspektorat
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	B	BB	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengawasan (Skala 1-4)	Skala	2,5	3	
4	Persentase Implementasi MCP Korsupgah dan Stranas	%	82	88	
1	Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme Dan Tindak Kriminalitas	%	100%	100%	Kesbangpol
2	Persentase Aspek Hak-Hak Politik	%	75%	80%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target		OPD Pelaksana
			2023	2024	
3	Persentase Aspek Kebebasan Sipil	%	89%	90%	Kesbangpol
4	Persentase Lembaga Demokrasi	%	77%	80%	
5	Jumlah Koordinasi Dengan Instansi Terkait	Jumlah Koordinasi	13	14	
6	Jumlah Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan, Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba (Dengan Satuan:Jumlah Pembinaan)	Jumlah Pembinaan	4	4	Kesbangpol
7	Jumlah Pembinaan Terhadap Paham Keagamaan Bermasalah (Dengan Satuan:Jumlah Pembinaan)	Jumlah Pembinaan	13	16	Kesbangpol
8	Jumlah Pembinaan Kamtramtibmas (Dengan Satuan :Jumlah Pembinaan)	Jumlah Pembinaan	18	20	Satpol PP

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Maluku yang terakhir dalam pentahapan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yang disusun dengan memperhatikan dokumen RPJPD Tahun 2005 – 2025 Provinsi Maluku. Dokumen ini merupakan instrument mengejawantahkan muatan muatan yang terkandung pada RPJMD Tahun 2019 – 2024, selain itu untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 telah dipadukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Dalam rangka mencapai target kinerja pada tahap ke - 5 RPJPD maka RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 dilaksanakan dengan tema **“Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”**. tema RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku, dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam program prioritas dan kegiatan prioritas untuk tahun 2024 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow program yang dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Penyusunan RKPD tahun 2024 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam renja perangkat daerah Tahun 2024 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan. Sementara itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota, rancangan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD

Kabupaten/Kota. Sehingga ada keselarasan dalam sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) untuk berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini demi tercapainya Provinsi Maluku yang sejahtera.

**GUBERNUR MALUKU,**



**MURAD ISMAIL**

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka perlu diselaraskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Terkait dengan itu, maka beberapa kebijakan yang dijadikan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 adalah (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (3) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (4) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan ; (5) penguatan daya saing usaha ; (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) pembangunan ibu kota nusantara; (8) pelaksanaan pemilu 2024.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada RKP 2024, maka kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi. Oleh karena itu, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2024 diarahkan pada upaya : 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2) pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industry pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan; 3) pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata; 4) pemantapan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang merata dan terjangkau; 5) penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang unggul; 6) pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas; 7) Optimalisasi reformasi birokrasi menuju *good governance*.

Sejalan dengan itu, maka upaya untuk meningkatkan daya saing di

semua sektor lapangan usaha perlu dilakukan. Bersamaan dengan agenda tersebut, pemulihan sosial juga akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengupayakan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan pemulihan sosial ekonomi yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui peningkatan produktivitas tersebut, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah-panjang. Upaya transformasi ekonomi tersebut sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan baru pasca pandemi.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2022**

Kondisi perekonomian Maluku Tahun 2022 menunjukkan trend pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Maluku di Tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,73% (y-o-y) lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 5,33% (y-o-y). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Maluku di tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya situasi pandemi sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Jika dibandingkan dengan perekonomian nasional, maka pertumbuhan ekonomi Maluku masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang dalam tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 5,01%.(y-o-y). Oleh karena itu berbagai paket kebijakan dan stimulus terus dilakukan, terutama untuk menjaga tingkat konsumsi dan investasi agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

#### **3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomian Maluku dalam 5 tahun terakhir cukup stabil walaupun mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai dengan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan kembali positif di tahun 2021 dan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,73% (y-o-y). Perekonomian Provinsi Maluku berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku Triwulan IV-2022 mencapai Rp.53,69 trilyun dan atas dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp.33,32 trilyun. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku yang positif di tahun 2022 masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulampua yang mampu tumbuh sebesar 7,49% (y-o-y).

#### **a. Pertumbuhan dari Sisi Produksi**

Dari sisi produksi, pelambatan pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya kinerja beberapa Lapangan Usaha (sektor) utama. Papangan usaha yang mengalami penurunan kinerja antara lain pertanian, perikanan, kehutanan serta administrasi pemerintahan. Disamping terjadi penurunan kinerja pada beberapa lapangan usaha utama, masih terdapat lapangan usaha utama lainnya yang tumbuh positif seperti perdagangan dan konstruksi. Struktur perekonomian Provinsi Maluku selama beberapa tahun terakhir ini masih di dominasi oleh 3 lapangan usaha utama antara lain Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; serta lapangan usaha Perdagangan yang pangsaanya pada triwulan IV tahun 2022 mencapai 59,09% dari total PDRB Provinsi Maluku.

Kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP) pada triwulan IV 2022 tumbuh positif meskipun arahnya melambat. Kinerja LU ini tercatat tumbuh sebesar 5,15% (yoy) pada triwulan IV 2022, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,59% (yoy). Penurunan kinerja LU PKP Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 sejalan dengan penurunan produksi padi yang terjadi selepas periode panen di triwulan lalu. Penurunan produksi juga berdampak pada turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan, khususnya pada sub LU Tanaman Bahan Makanan (Tabama), Hortikultura, Peternakan dan Perikanan. Penurunan NTP juga tidak terlepas dari penurunan harga jual komoditas-komoditas pertanian seperti pada komoditas hortikultura dan penurunan harga komoditas perikanan (Tuna) di pasar internasional.

Kinerja LU Administrasi Pemerintahan pada triwulan IV 2022 mengalami perlambatan. Kinerja LU ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya

yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,56% (yoy). Perlambatan pada LU Administrasi terjadi seiring penurunan kinerja komponen Konsumsi Pemerintah pada sisi permintaan yang dapat mengindikasikan adanya penurunan kegiatan instansi pemerintah akibat penurunan realisasi belanja pemerintah pada komponen-komponen belanja terkait. Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku, penurunan kinerja belanja terpantau terjadi komponen belanja non modal dan barang. Realisasi belanja non modal APBN di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh sebesar 1,26% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,06% (yoy). Demikian halnya dengan realisasi belanja barang APBN di Provinsi Maluku yang tumbuh 2,05% (yoy) pada triwulan IV 2022, juga menurun dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 13,96% (yoy). Penurunan belanja barang dan juga non-modal disinyalir akibat terjadinya penurunan pagu APBN 2022 yang mengurangi tingkat realisasi belanja pemerintah daerah.

Penurunan administrasi pemerintah pada triwulan IV 2022, juga didorong oleh penurunan realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kota Ambon dan Tual. Terdapat penurunan realisasi belanja dalam triwulan IV 2022, dengan tingkat realisasi sebesar 88,08% (yoy) atau lebih rendah dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 89,94% (yoy). Realisasi komponen Belanja Barang di Kedua Kota Tersebut pada triwulan IV 2022 berkontraksi sebesar 3,61% (yoy), atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,70% (yoy). Secara nominal, realisasi belanja barang pada triwulan IV 2022 juga lebih rendah dari periode yang sama tahun 2021, dengan nominal Rp528,40 miliar. Selain pada komponen Belanja Barang, terdapat penurunan realisasi juga pada komponen Belanja Non Modal yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi komponen tersebut di Kota Ambon dan Tual adalah sebesar Rp1.92,46 miliar atau berkontraksi sebesar 4,46% (yoy). Nilai ini menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang tumbuh 3,11% (yoy). Peningkatan kinerja realisasi APBD di kedua kota tersebut disinyalir akibat terdapat penurunan pagu anggaran APBD di Kota Ambon dan Tual yang mengurangi tingkat realisasi.

Penurunan kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 tertahan oleh meningkatnya kinerja LU Perdagangan. LU Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 8,67% (yoy), meningkat terbatas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,66% (yoy). Terbatasnya peningkatan kinerja LU ini tidak terlepas dari tertahannya permintaan masyarakat secara umum, yang berdampak pada penurunan kinerja komponen Konsumsi RT di sisi permintaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun peningkatan LU Perdagangan ini tercermin dari arus bongkar muat peti kemas di Provinsi Maluku yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,05% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,97% (yoy). Pertumbuhan kinerja LU Perdagangan ini juga terkonfirmasi oleh realisasi kegiatan usaha perdagangan dalam SKDU triwulan IV 2022 yang meningkat menjadi sebesar 11,52% dari triwulan sebelumnya sebesar 8,64%.

#### **b. Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran**

Dari sisi pengeluaran, tiga komponen utama dalam struktur perekonomian Provinsi Maluku adalah komponen Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Komponen Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV tahun 2022 tumbuh sebesar 4,04% lebih rendah (melambat) dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar 6,31% (yoy). Konsumsi RT ini merupakan komponen dengan porsi terbesar dalam kinerja perekonomian Provinsi Maluku yakni dengan pangsa yang mencapai 63,36% pada triwulan IV tahun 2022. Penurunan kinerja komponen ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM di bulan September 2022 yang memberikan meningkatnya tekanan harga-harga barang dan jasa secara umum.

Sejalan dengan itu, Konsumsi Pemerintah juga mengalami penurunan pertumbuhan di triwulan IV tahun 2022 yaitu hanya sebesar 4,74% (yoy), menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 12,85% (yoy). Penurunan kinerja komponen Konsumsi Pemerintah ini tidak terlepas dari menurunnya realisasi belanja APBN dimana pada triwulan IV 2022 realisasi APBN khususnya belanja non modal dan barang hanya tumbuh 1,26% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,06% (yoy). Demikian halnya juga dengan realisasi belanja barang

APBN Provinsi Maluku yang pada triwulan IV 2022 hanya tumbuh sebesar 2,05% (yoy), lebih rendah dari triwulan III yang tumbuh sebesar 13,96% (yoy).

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) Provinsi Maluku pada triwulan IV tahun 2022 menurun. Peningkatan kinerja PMTDB yang mencerminkan kegiatan investasi menunjukkan peningkatan sebesar 4,21% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang pertumbuhannya -1,40% (yoy). Realisasi belanja modal APBN pada triwulan IV tahun 2022 mencapai Rp.2,47 triliun lebih tinggi dari realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp.2,37 triliun. Namun demikian, peningkatan nominal realisasi belanja modal APBN pada triwulan IV tahun 2022 ini tercatat hanya tumbuh 4,20% (yoy), masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 52,39% (yoy).

Meningkatnya kinerja PMTDB ini tidak dibarengi dengan peningkatan realisasi investasi swasta. Hal ini tercermin dari penurunan pertumbuhan kredit investasi yang pada triwulan IV tahun 2022 tumbuh sebesar 94,79% atau mencapai Rp.3,99 triliun, lebih rendah dari triwulan III tahun 2022 yang tumbuh sebesar 208,77% (yoy). Disamping itu juga, berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada Triwulan IV 2022 menunjukkan adanya penurunan realisasi investasi yaitu hanya sebesar 0,56%, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,71%.

Pada triwulan IV 2022, kinerja Ekspor Luar Negeri Provinsi Maluku meningkat signifikan. Ekspor Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 140,75% (yoy), jauh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 57,46% (yoy) (Grafik 21). Adanya realisasi ekspor minyak bumi dengan volume yang cukup besar pada triwulan IV 2022 mendorong peningkatan kinerja ekspor tersebut. Peningkatan kinerja ekspor juga sejalan dengan perbaikan pada kinerja Impor Luar Negeri Provinsi Maluku. Impor Luar Negeri Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 mencatatkan kontraksi sebesar 40,01% (yoy) atau mengalami perbaikan setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi hingga 50,83% (yoy).

Sementara itu, kinerja perdagangan antar daerah menunjukkan perbaikan. Meskipun secara umum Provinsi Maluku masih mengalami defisit

neraca perdagangan, namun pada triwulan IV 2022 defisit tersebut membaik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan komponen Net Ekspor Antar Daerah (NEAD) Provinsi Maluku yang tercatat sebesar 11,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -1,39% (yoy). Tingginya ketergantungan Provinsi Maluku terhadap pasokan barang dan jasa dari luar daerah berdampak pada kurang optimalnya perputaran ekonomi di dalam Provinsi Maluku akibat besarnya arus pembayaran ke luar daerah sehingga mengurangi nominal PDRB Provinsi Maluku.

### 3.1.1.2. Tingkat Inflasi

Inflasi tahunan pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 mencatatkan penurunan setelah mencapai titik tertingginya pada triwulan III 2022. Indeks Harga Komoditas (IHK) pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 6,28% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan III 2022 sebesar 6,89% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan historis inflasi tiga tahun terakhir. Secara umum, masih tingginya realisasi inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 tidak terlepas dari gejolak harga energi global serta dampak kebijakan pemerintah. Selain itu, tren peningkatan permintaan masyarakat seiring membaiknya kondisi pandemi juga turut menekan inflasi dari sisi permintaan. Di sisi lain, sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Maluku dalam melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi secara intensif, mampu meredam tekanan inflasi dari sisi komoditas bahan makanan.

Dengan perkembangan tersebut, realisasi inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 berada di atas sasaran inflasi tahun 2022 yang sebesar  $3,0 \pm 1\%$  (yoy). Realisasi inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 juga menempati peringkat tertinggi kedua dibandingkan dengan inflasi pada gabungan kota di provinsi lainnya di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Inflasi gabungan kota di kawasan Sulampua pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 5,63% (yoy), dengan inflasi tertinggi terjadi pada gabungan kota di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 7,39% (yoy) dan inflasi terendah terjadi pada gabungan kota di Provinsi Maluku Utara sebesar 3,37% (yoy) (Tabel 3). Tidak hanya pada

tingkat kawasan, inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV 2022 juga berada di level yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,51% (yoy).

Berdasarkan kelompok komoditasnya, penurunan inflasi pada triwulan IV 2022 didorong oleh turunnya tekanan harga pada kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada triwulan IV 2022, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 17,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 21,90% (yoy). Meskipun menurun, tingkat inflasi pada kelompok transportasi tersebut masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari tingkat inflasi komoditas pada kelompok ini seperti bensin, angkutan udara, dan angkutan dalam kota yang masing-masing sebesar 30,65% (yoy), 21,76% (yoy), dan 13,38% (yoy) (Tabel 4). Inflasi pada kelompok transportasi secara umum tidak lepas dari kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada triwulan III 2022 lalu. Secara khusus, tekanan pada tarif angkutan udara pada triwulan IV 2022 turut didorong oleh tingginya permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan liburan tahun akhir tahun.

### **3.1.1.3. Kinerja Perbankan**

Perkembangan penghimpunan DPK pada perbankan di Provinsi Maluku menurun. Pada triwulan IV 2022, DPK BU di Provinsi Maluku berkontraksi hingga sebesar 1,87% (yoy) dengan nominal Rp14,09 triliun atau lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,40% (yoy) (Grafik 93). Penurunan DPK BU Provinsi Maluku tersebut sejalan dengan penurunan pada komponen deposito yang berkontraksi sebesar 2,73% (yoy) atau lebih dalam dari kontraksi pada triwulan III 2022 yaitu sebesar 2,24% (yoy). Di sisi lain, penurunan lebih dalam tertahan oleh membaiknya kinerja komponen tabungan dan giro yang menyumbang pangsa hingga 76,63% terhadap total DPK BU Provinsi Maluku. Komponen tabungan mencatatkan kontraksi sebesar 2,59% (yoy) dengan nominal Rp8,93 triliun atau lebih dangkal dari triwulan sebelumnya yang tercatat berkontraksi sebesar 4,38% (yoy). Selanjutnya, komponen giro juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,49% (yoy), meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,05% (yoy).

Sejalan dengan itu, perkembangan Kredit Perbankan di Provinsi Maluku juga tercatat menurun. Pada triwulan IV 2020, kredit BU di Provinsi Maluku tumbuh sebesar 16,79% (yoy) dengan nominal Rp18,50 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar 20,70% (yoy) (Grafik 94). Penurunan kinerja kredit BU ini tidak terlepas dari oleh penurunan kinerja kredit investasi menjadi sebesar 94,77% (yoy) pada triwulan IV 2022, setelah tumbuh hingga 208,77% (yoy) pada triwulan III 2022. Penurunan kinerja kredit BU lebih jauh tertahan oleh peningkatan pada kredit modal kerja dan konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 9,59% (yoy) dan 2,68% (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih tinggi dari triwulan III 2022 yang masing-masing tumbuh sebesar 7,06% (yoy) dan 1,58% (yoy). Berdasarkan pangsaanya, kredit konsumsi masih menyumbangkan pangsa terbesar terhadap total kredit BU pada triwulan IV 2022. Kredit konsumsi masih menyumbangkan sebesar 48,60% dari total kredit BU. Sementara itu, kredit jenis modal kerja dan kredit jenis investasi memiliki proporsi masing-masing sebesar 29,83% dan 21,53%. Kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa pangsa kredit produktif BU pada triwulan IV 2022 telah berada sedikit di atas kredit konsumsi.

#### **3.1.1.4. Tingkat Pengangguran**

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Agustus 2022 mencapai 59,7 ribu orang atau sebesar 6,88% terhadap total angkatan kerja sebanyak 868 ribu orang. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan TPT pada Februari 2022 yang tercatat sebesar 6,44% atau sebesar 56,4 ribu orang dari total angkatan kerja sebanyak 876 ribu orang. Berdasarkan laju pertumbuhannya, jumlah pengangguran di Provinsi Maluku pada Agustus 2022 tersebut tercatat tumbuh 0,25% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan pada Februari 2022 yang tercatat 0,24% (yoy).

Peningkatan TPT Provinsi Maluku pada Agustus 2022 ini berbeda dengan perkembangan dengan perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan III 2022. Kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan III 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,10% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2022 sebesar 4,85% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha

(LU) utama di Provinsi Maluku seperti LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP). Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2022 tertahan oleh penurunan pada beberapa LU utama seperti industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi.

Struktur tenaga kerja di Provinsi Maluku didominasi oleh LU PKP serta LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Pada Agustus 2022, LU PKP mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 271.286 orang, atau 33,54% dari total tenaga kerja di Provinsi Maluku. Dengan jumlah tersebut, LU PKP menjadi LU yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Maluku. Penurunan TPT pada Agustus 2022 secara khusus didorong oleh meningkatnya serapan tenaga kerja pada LU ini hingga 23,37 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2022. Hal ini juga sejalan dengan kinerja LU PKP sebagai LU dengan pangsa terbesar dalam PDRB Provinsi Maluku yang tumbuh 7,24% (yoy) pada triwulan III 2022. LU yang menyerap tenaga kerja terbesar selanjutnya adalah LU jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 179.644 orang atau 22,21% dari total tenaga kerja Maluku. Sedangkan LU perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi memiliki pangsa penyerapan tenaga sebesar 17,38%, atau sebanyak 140.577 dari total tenaga kerja Maluku.

#### **3.1.1.5. Tingkat Kemiskinan**

Upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan menunjukkan kinerja yang membaik seiring dengan membaiknya ekonomi Maluku. Dimanapun tahun 2022 aktivitas masyarakat kembali digerakkan. Tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Maluku pada Maret 2022 berada pada nilai 15,97%. Nilai tersebut mengalami penurunan 0,33% dibandingkan dengan September 2021 dan turun 1,90% dibandingkan Maret 2021. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi Maluku pada Maret 2022 adalah sebesar 290,57 ribu orang, menurun 4,40 ribu orang dibandingkan September 2021 dan turun 31,24 ribu orang dibandingkan Maret 2021. Tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Maluku bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional masih cukup tinggi. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan nasional adalah sebesar 9,54%, sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku adalah sebesar 15,97% atau lebih tinggi sebesar 6,43% dari tingkat kemiskinan nasional.

Selanjutnya, berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 turun dari 6,13% menjadi 5,82%. Sementara penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 adalah 23,50%, turun dari 24,34% pada September 2021. Menurut jumlahnya, penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2022 adalah 45,12 ribu orang, jumlah ini berkurang 3,90 ribu orang dibandingkan periode September 2021. Pada periode yang sama, Maret 2022, jumlah penduduk miskin pedesaan berjumlah 245,45 ribu orang atau turun sejumlah 0,50 ribu orang dibandingkan September 2021.

### **3.1.2 Prospek Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2023 dan 2024**

Tahun 2023 ekonomi global akan mengalami perlambatan setelah terjadi pemulihan di tahun 2021 dan 2022. Kondisi perekonomian global diperkirakan masih dipenuhi tantangan di tahun 2023 sehingga pertumbuhannya akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* memperkirakan Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 mengalami perlambatan dari 3,2% di tahun 2022 menjadi 2,6% pada tahun 2023. Hal dipicu oleh risiko semakin meluasnya dampak perang Rusia dan Ukraina seperti memperparah gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas utamanya energi, tekanan inflasi yang persisten, dan risiko ketahanan pangan.

Di tengah perlambatan ekonomi global, perkembangan ekonomi Indonesia dan Provinsi Maluku yang sudah membaik di tahun 2022 dan mampu mencapai pertumbuhan yang positif diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya

mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Untuk tahun 2024, secara agregat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat, di tengah ketidakpastian risiko global. Tensi geopolitik dan inflasi yang tinggi di tahun 2022 dan 2023 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024. Namun demikian, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan membaik di tahun 2024 dari 2,8 persen di tahun 2023 menjadi 3 persen sejalan dengan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang juga diperkirakan akan meningkat dari 2,4 persen pada tahun 2023 menjadi 3,5 persen di tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik pada tahun 2024 seiring dengan perbaikan ekonomi global. Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan kembali menguat seiring dengan peningkatan perdagangan dunia. Disamping itu, upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan mampu menopang daya saing produk ekspor Indonesia.

Dari sisi domestik, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat, pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan

kerja diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Disamping itu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Investasi juga diperkirakan akan meningkat khususnya terkait sektor-sektor berbasis hilirisasi seperti mineral dan produk-produk pertanian. Pembangunan smelter yang terus meningkat diyakini akan mendorong belanja modal korporasi pada sektor-sektor terkait. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia, sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar. Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen dapat dicapai pada 2024.

Dengan membaiknya ekonomi nasional ditahun 2024 tentunya memberikan implikasi juga bagi perkembangan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Maluku. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap didorong oleh tiga kategori utama yakni lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan, pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan hotel dan restoran. Kinerja ekonomi yang lebih baik tersebut ditopang oleh daya beli yang tetap resilien sejalan dengan ekspansi kelas menengah yang tetap berlanjut. Pada tahun 2023, dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi, diperkirakan inflasi masih berada dalam rentang  $3,5\pm 1\%$ . Sumber tekanan inflasi antara lain diperkirakan berasal dari permintaan domestik yang meningkat ditengah turunnya harga komoditas yang semakin terbatas.

Berdasarkan gambaran kondisi kondisi ekonomi tahun 2022 dan 2023 tentang prospek dan tantangan perekonomian daerah, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan penyesuaian target sebagaimana pada perubahan RPJMD Tahun 2019 -2024 yang. Proyeksi terhadap indikator bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, salah satunya adalah perang Rusia - Ukraina. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dengan skenario moderat dengan memperhatikan proyeksi Bank Indonesia serta mempertimbangkan target capaian indikator RPJMD agar gap target penyesuaian tidak terlalu besar. Oleh karena itu berdasarkan analisis yang dilakukan bersama Tim Ahli Ekonomi

Pemerintah Daerah maka pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan berada pada kisaran 5,60 - 6,27 %. Inflasi Maluku tahun 2024 diproyeksikan 2,09 - 2,99% masih berada pada kisaran roadmap inflasi Maluku yakni  $\pm 3 \pm 1\%$ . Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang target-target makro dapat diikuti pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Makro Ekonomi Maluku, Tahun 2018 – 2024**

NO.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi					Target	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)	6,41	4,73	-3,42	5,33	5,73	5,60-6,27	6,10-6,71
2.	Tingkat inflasi (%)	3,35	2,87	0,21	4,01	6,28	2,10-3,24	2,09-2,99
3.	Tingkat kemiskinan (%)	17,85	17,65	17,99	16,30	16,23	15,92	15,73
4.	Tingkat pengangguran (%)	7,27	7,08	7,57	6,93	6,88	6,12	6,05
5.	IPM		69,45	69,49	69,71	70,22	70,39	70,69
6.	Gini Rasio		0,32	0,326	0,320	0,306	0,300	0,295

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2023

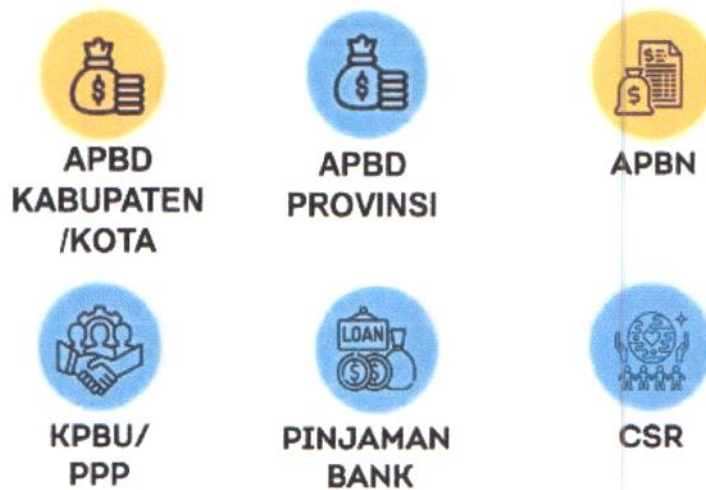
### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan Daerah di Provinsi Maluku didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, kemampuan keuangan daerah menjadi penting karena sangat menentukan bagi terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui pendanaan APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; pinjaman bank; PHLN; dana kemitraan dunia usaha; Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL) di Maluku, yang semuanya berkolaborasi menjadi potensi sumber penerimaan guna menunjang belanja pembangunan daerah. Konsep pendanaan pembangunan di Maluku dikenal dengan 6 (enam) pintu anggaran dalam membangun Maluku.

**Gambar 3.1**  
**Kolaborasi Pendanaan Pembangunan**



Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab sebelumnya dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

### **3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyaikemampuan fiskalnya baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik didalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan

pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2020, 2021 dan tahun 2021, asumsi pendapatan tahun 2023 dan tahun 2024. Pada awal tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat dan menyebabkan sektor-sektor ekonomi baik itu usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat pandemi COVID-19 ini. Upaya untuk memulihkan diri dari dampak pandemi terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya. Upaya-upaya pemerintah yang cukup ketat dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya telah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini ditandai dengan semakin membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat yang nantinya akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan negara/daerah.

Sektor-sektor penerimaan pendapatan daerah di Provinsi Maluku. Kembali digerakan sehingga akan memberikan dampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran tentang realisasi pendapatan pendapatan daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan proyeksi target pendapatan tahun 2023 dan 2024 dapat diikuti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

No.	Uraian	Belanja				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>545,752.87</b>	<b>552,191.50</b>	<b>588,888.45</b>	<b>619,035.64</b>	<b>706,494.50</b>
4.1.1	Pajak daerah	382,358.28	414,045.98	395,554.20	450,305.19	510,446.30
4.1.2	Retribusi daerah	94,079.86	29,668.99	19,729.56	20,924.56	24,298.00
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	38,891.79	40,549.37	40,549.37	24,549.37	42,878.20
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	30,422.94	67,927.17	133,052.33	123,256.53	128,872.00
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan/Transfer</b>	<b>2,498,865.07</b>	<b>2,711,163.63</b>	<b>2,284,925.03</b>	<b>2,399,031.77</b>	<b>2,741,198.10</b>
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	77,036.18	98,590.69	74,670.13	70,434.44	83,000.93
4.2.2	Dana alokasi umum	1,524,466.22	1,523,748.76	1,525,401.86	1,578,790.92	1,681,755.55
4.2.3	Dana alokasi khusus	897,362.67	1,088,824.18	679,021.44	749,806.41	970,012.27
4.2.4	Dana Insentif Daerah			5,831.61		6,429,35
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>1,207.31</b>	<b>1,588.15</b>	<b>3,395,027.57</b>	<b>420,00</b>	<b>400,00</b>
4.3.1	Hibah	1,207.31	1,588.15	3,395,027.57	420,00	400,00
4.3.2	Dana darurat					
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsidan dari pemerintah daerah Lainnya	-	-			
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-			
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>3,045,825.25</b>	<b>3,269,499.78</b>	<b>2,941,199.89</b>	<b>3,018,487.41</b>	<b>3,448,092.60</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Pendapatan daerah dalam Tahun 2024 diaproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 14,02 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2023, kenaikan tersebut harapan bersumber dari PAD yang ditargetkan naik 14,13 persen dan dana transfer pemerintah pusat yang ditargetkan naik sebesar 13,99 persen. Asumsi kenaikan pendapatan daerah pada Tahun 2024 tersebut bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah semakin meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan kembali hidup normal seperti sebelum pandemi. Diharapkan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Selain hal tersebut di Provinsi Maluku masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Maluku merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) dan Badan Pendapatan.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
7. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui :
  - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
  - b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
  - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan antara lain drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, mengembangkan Samsat Outlet.

- e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
  - f. Menyearluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
  - g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.
  - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diatrahkan pada peningkatan pendapatan asli daeah..
  - i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui :
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
  - b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  - c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran

DPR-RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
  - a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
  - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Maka tentunya program dan kegiatan yang bersifat strategis akan menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan ditahun 2024.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Maluku menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi Dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar,

diantaranya :

- a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, sebanyak 7 (tujuh) prioritas, sebagai berikut :
  1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.
  2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industry Pengolahan yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan.
  3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya Yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi dan Pariwisata.
  4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau.
  5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul.
  6. Pemantapan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata dan Berkualitas.
  7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mutu Layanan Publik.
- b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
- c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;

dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Maluku secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
7. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2024, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
9. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
10. Mengalokasikan dana Hibah untk KPU dan Bawaslu untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di tahun 2024.

Belanja daerah dari tahun 2022 relatif berfluktuasi sesuai dengan

kondisi dan perkembangan reguasi serta kebutuhan daerah. Sebagai bagian dari upaya-upaya melakukan perbaikan akibat terjadi pandemi COVID-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penyesuaian terhadap target-target pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan-pendapatan lain.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Belanja				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3,008,048.65</b>	<b>3,818,867.10</b>	<b>3,098,429.82</b>	<b>2,980,565.21</b>	<b>3,361.420.41</b>
2.1	<b>Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>2,687,128.46</b>	<b>3,536,092.57</b>	<b>2,798,196.69</b>	<b>2,239,109.85</b>	<b>3,030,674.94</b>
2.2	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>93,681.26</b>	<b>63,047.80</b>	<b>83,209.89</b>	<b>25,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
	Belanja Tidak Terduga	93,681.26	63,047.80	83,209.89	25,000.00	50,000.00
2.3	<b>Belanja Transfer</b>	<b>227,238.93</b>	<b>219,726.74</b>	<b>217,023.24</b>	<b>233,047.05</b>	<b>280,745.47</b>
	Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/ kota	205,330.03	212,850.34	217,023.24	233,047.05	280,745.47

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat asumsi dan target pendapatan daerah tahun anggaran 2024, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target serta sasaran pembangunan dalam RPJMD maka belanja daerah pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 12,78 persen, peningkatan ini terjadi pada belanja operasi dan belanja modal sebesar 11,32 persen dan belanja transfer diperkirakan meningkat 20,47 persen seiring dengan peningkatan target penerimaan pajak daerah serta belanja tidak terduga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 100,00 persen dari target tahun 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih

unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pemerintah Provinsi Maluku mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja

daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut :

1. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
2. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan perkiraan maju. Pada tahun 2024 pembiayaan netto diperkirakan akan terjadi penurunan. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam dua tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Belanja				
		Realisasi Tahun 2020 <sup>1)</sup>	Realisasi Tahun 2021 <sup>1)</sup>	Realisasi Tahun 2022 <sup>3)</sup>	Proyeksi Target Tahun 2023 <sup>4)</sup>	Proyeksi Target Tahun 2024 <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>338,326.48</b>	<b>851,689.06</b>	<b>250,000.00</b>	<b>98,750.00</b>	<b>50,000.00</b>
	SILPA	163,326.48	343,328.07	250,000.00	98,750.00	50,000.00
	Penerimaan Kembali Investasi non Permanen					
	Pinjaman dari pemerintah	175,000.00	508,360.99			
	Pencairan Dana Cadangan					
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32,775.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>22,728.70</b>	<b>136,672.20</b>	<b>136,672.20</b>
	Penyertaan Modal	32,775.00	6,000.00	6,000.00	-	-
	Pengembalian Pokok Hutang	-	-	22,778.70	136,672.20	136,672.20
	Pembentukan Dana Cadangan			-	-	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>			<b>221,221.30</b>	<b>(37,922.20)</b>	<b>(86.672,20)</b>

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan dan realisasi pembiayaan daerah 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, maka penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 adanya SiLPA Tahun 2023, yang diperkirakan lebih kecil dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 atau berkurang 49,37 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari target tahun 2023 yang hanya diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok pinjaman PEN. Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah dengan struktur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diikuti pada tabel 3.4.

### **3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Maluku dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Maluku. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN, 2) APBD Kabupaten/Kota, 3) Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), 4) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan 5) Hibah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut :

#### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Maluku selain bersumber dari APBD Provinsi Maluku, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

#### **2. APBD Kabupaten/Kota**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Maluku dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan

APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

### **3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Berdasarkan Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat

dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai keselarasan pembangunan.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **TAHUN 2024**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Provinsi Maluku pada tahun berkenaan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya.

Dalam menentukan prioritas pembangunan Provinsi Maluku juga mempertimbangkan kebijakan nasional demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam penyusunannya RKPDP 2024 disusun dengan tetap mengikuti regulasi yang berkaitan dengan tata cara penyusunannya dan yang paling

utama adalah mempedomani dokumen perencanaan RPJMD dimana saat ini Provinsi Maluku telah melakukan perubahan RPJMD 2019 – 2024 melalui Perda RPJMD No.12 Tahun 2022

Visi pembangunan daerah Provinsi Maluku sebagai mana tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025“MALUKU YANG RUKUN DAN DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS, SERTA MAJU DAN SEJAHTERA”. Terdapat 3 Misi Pokok yaitu: Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Provinsi Maluku yang (1) Bertaqwa, Rukun, Aman, dan Damai; (2) Maju, Mandiri dan Sejahtera; serta (3) Adil dan Demokratis. Tahapan pembangunan RPJMD 2019-2024 merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir pembangunan jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku. Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019–2024 yaitu :

**“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”**

Visi di atas merupakan gambaran yang ingin dicapai Provinsi Maluku di akhir tahun kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2024 dengan 3 frasa; frasa pertama yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani; frasa kedua yaitu Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan dan frasa ketiga yaitu Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan. Pernyataan visi di atas mengandung makna sebagai berikut :

**Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna :**

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

### **Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

### **Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :**

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.

Pelaksanaan visi pembangunan ini dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pengembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat serta pemenuhan sarana prasarana dibingkai dalam kearifan budaya lokal dan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam mewujudkan visi dan misinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode Tahun 2019–2024 menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan sebagai wujud konkrit langkah-langkah akselerasi mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Program unggulan, merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019–2024. Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024 yang disertai dengan implementasi Program unggulannya,

ditetapkan sebagai berikut :

**1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani**

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

**2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau**

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar.

**3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, di antaranya melalui peningkatan keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam

upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang.

#### **4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau**

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Mengingat infrastruktur merupakan investasi pembangunan pendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan juga jasa, maka sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku akan terus didorong dengan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

#### **5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata**

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam. Dari misi kelima Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.

#### **6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif,**

### **mandiri dan berprestasi**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Di samping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (*no one left behind*). Dari misi keenam Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari agenda lima tahun pada periodesisai ini atau tahun terakhir dari periode RPJMD 2019-2024. Sesuai dengan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, tema atau fokus pembangunan daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”. Dimana Tema ini memberikan arah bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Maluku Tahun 2024.

Sama halnya dengan pendekatan perencanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dimana Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan : (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 7 (tujuh) Prioritas pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) tujuan dan 10 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, obligasi daerah dan pinjaman bank daerah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; (4) melibatkan secara aktif

*stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Maluku Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Provinsi Maluku Tahun 2010-2030; (2) Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019- 2024; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024.

Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Maluku periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Maluku. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Provinsi Maluku.

Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, dalam periode Tahun 2022-2024 akan lebih mengkonsentrasikan pada penguatan perekonomian pada peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan

government spending pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM.

## **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

### **4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Dalam Rancangan awal RKP 2024 tema pembangunan RKP tahun 2024 yang disusun mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Arah presiden
2. Evaluasi kebijakan tahun 2023
3. Forum konsultasi publik
4. Hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022
5. sasaran RPJMN tahun 2020 – 2024
6. Kerangka ekonomi makro
7. Dinamika ketidakpastian global dan menyukseskan pemilu tahun 2024
8. Isu strategis lainnya yang menjadi perhatian

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

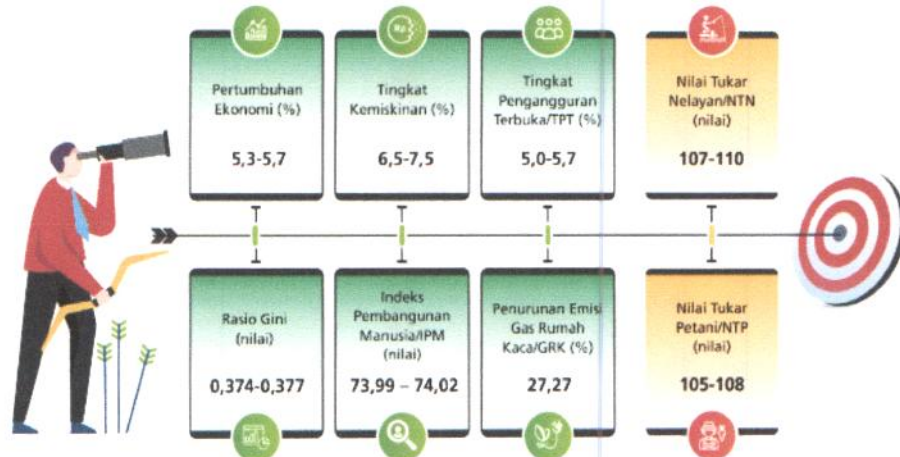
Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

#### 4.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui : (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

#### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024

##### 4.1.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan

keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Provinsi Maluku pada tahun berkenaan dengan tentunya memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Provinsi Maluku juga mempertimbangkan kebijakan nasional demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Provinsi Maluku sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Maluku dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas,

dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 terdapat 16 Tujuan dan 18 sasaran daerah. Setelah dilakukan perubahan, maka dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 terdapat 8 Tujuan dan 20 Sasaran Daerah. Arah tujuan pembangunan jangka menengah ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro. Agar visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019– 2024 lebih terarah dalam pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi tersebut secara operasional dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Indikator tujuan RPJMD perubahan Provinsi Maluku**

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani		
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau		
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau		
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan	Indeks Williamson/Indeks Kesenjangan Wilayah
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata		

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	TUJUAN	INDIKATOR
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata	Indeks Pembangunan Budaya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi		
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif	Indeks Pengeluaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019–2024 lebih terarah dalam pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi tersebut secara operasional dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Tujuan pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih  
Berdasarkan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sasaran yang ingin dicapai :
  - Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP;
  - Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik;
  - Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Tujuan kedua: Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing.  
Berdasarkan tujuan Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing sasaran yang ingin dicapai:
  - Sasaran 1 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan indikator Indeks Pendidikan
  - Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu

dan merata dengan indikator Indeks Kesehatan

3. Tujuan ketiga: Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan

Berdasarkan tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan sasaran yang ingin dicapai :

- Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dengan indikator LPE kategori industri pengolahan dan LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor
- Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan dengan indikator LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

4. Tujuan keempat: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Berdasarkan tujuan Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sasaran yang ingin dicapai :

- Sasaran 1: Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator PDRB per Kapita
- Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
- Sasaran 3: Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat dengan indikator Inflasi
- Sasaran 4: Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

5. Tujuan kelima: Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan

Berdasarkan tujuan Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana (IRB)

6. Tujuan Keenam : Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan

konektivitas wilayah kepulauan

Berdasarkan tujuan Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah dengan indikator Indeks Gini
- Sasaran 2: Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur dengan indikator Indeks Infrastruktur

7. Tujuan Ketujuh: Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata

Berdasarkan tujuan Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata sasaran yang ingin dicapai :

- Sasaran 1: Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis dengan indikator Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama
- Sasaran 2: Meningkatnya investasi pembangunan daerah dengan indikator Pertumbuhan Investasi
- Sasaran 3: Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional

8. Tujuan kedelapan: Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif

Berdasarkan tujuan Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari dengan indikator LPE Ekonomi Kreatif
- Sasaran 2: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan indikator Indeks pembangunan Pemuda
- Sasaran 3: Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender)

#### 4.1.3.2. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 maka dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024 Provinsi Maluku menjadi pedoman, serta mengacu pada RKP Tahun Tahun 2024 dan RPJMN 2020-2024. Hal tersebut berguna untuk menjamin terciptanya keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam table 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Matrik Persandingan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah Provinsi Maluku**

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR
<b>Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani</b>		
	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau</b>		
	<b>Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan
<b>Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</b>		
	<b>Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Resiko Bencana (IRB)
<b>Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau</b>		
	<b>Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan</b>	<b>Indeks Wiliamson/ Indeks Kesenjangan Wilayah</b>
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur
<b>Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata</b>		
	<b>Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata</b>	<b>Indeks Pembangunan Budaya</b>
		<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</b>
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata
		Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional
<b>Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi</b>		
	<b>Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif</b>	<b>Indeks Pengeluaran</b>

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)

**Tabel 4.3**  
**Matriks Sasaran Pembangunan daerah Serta Target Indikator Perubahan**  
**RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024**

RPJMD PERUBAHAN			TARGET	
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2023	2024 (Target Akhir RPJMD)
<b>Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani</b>				
	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	B (70,00)	BB (72,50)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (67,50)	BB (70,00)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,1	3,15
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,35	3,4
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71	71,5
<b>Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau</b>				

RPJMD PERUBAHAN			TARGET	
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2023	2024 (Target Akhir RPJMD)
	<b>Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	70,39	70,69
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	0,732	0,737
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan	0,714	0,716
<b>Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</b>				
	<b>Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	5,60-6,27	6,10 - 6,71
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan	4,17	6,02
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor	11,46	14,98
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,82	23,35
	<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	15,92	15,73
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	26,94	27,5
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	71,65	76,95
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi	2,10-3,24	2,09-2,99
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,12	6,05
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,66	77,87
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	160,05	159,95

RPJMD PERUBAHAN			TARGET	
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2023	2024 (Target Akhir RPJMD)
<b>Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau</b>				
	<b>Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan</b>	<b>Indeks Wiliamson/ Indeks Kesenjangan Wilayah</b>	0,285	0,250
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	0,3	0,295
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	71,5	72,25
<b>Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata</b>				
	<b>Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata</b>	<b>Indeks Pembangunan Budaya</b>	54,50	56,00
		<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</b>	3,80	4,00
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	80,75	81
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	20	25
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	6,85	6,86
		Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional	13	15
<b>Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi</b>				
	<b>Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif</b>	<b>Indeks Pengeluaran</b>	0,667	0,669
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	3,00	3,75
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi	Indeks pembangunan Pemuda	54,50	55,00

RPJMD PERUBAHAN			TARGET	
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2023	2024 (Target Akhir RPJMD)
	olahraga			
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,74	94,00

#### 4.2.1.2. Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi dan Nasional

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang diharapkan mengalami perbaikan akibat dari dampak covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan sebagaimana pada tabel 4.6.

**Tabel 4.4**  
**Keselarasn Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL TAHUN 2024	TARGET PROVINSI MALUKU 2024
1	Persentase pertumbuhan ekonomi	5,3 – 6,7	6,10 – 6,71
2	Persentase Penduduk Miskin	6,5 – 7,5	15,73
3	Indeks Gini	0,374 – 0,377	0,295
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	70,69
5	Persentase tingkat pengangguran	5,0 – 5,7	6,05

Sumber : Perubahan RPJMD Maluku & Ranwal RKP 2024

Provinsi Maluku merupakan tangan estafet pertama ketercapaian pembangunan Nasional, sehingga dalam pengambilan kebijakan perlu menyelaraskan dengan Nasional. Berikut ini adalah keterkaitan RPJMD perubahan Provinsi Maluku dengan RPJMN.

**Tabel 4.5**  
**Keselarasn Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional**

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
<b>Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani</b>				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip $\geq$ B:

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Perilaku Anti Korupsi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP
<b>Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau</b>				
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	Terpenuhinya layanan dasar	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan	Terpenuhinya layanan dasar	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
				Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
<b>Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</b>				
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor		Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pertumbuhan wirausaha (%)

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
			(UMKM), dan koperasi	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan
	Terkendalnya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonom	Tingkat Inflasi
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Air (IKA)				
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)
<b>Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau</b>				
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas wilayah	Panjang jalan baru yang terbangun (Km)
<b>Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata</b>				

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan investasi (PMTB)
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Kontribusi PDB pariwisata
		Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional		
<b>Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi</b>				
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

#### 4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

Mempercepat implementasi dan konsistensi dari visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, maka sangat diperlukan upaya

pengembangan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Provinsi Maluku setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Maluku 2021 - 2024**



Sumber : RPJMD Perubahan 2019 -2024

2019, 2020 dan 2021 (tahun berjalan), maka strategi dan arah kebijakan diperbaiki untuk meningkatkan efektifitasnya dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD. Penjabaran tema/agenda pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Agenda pembangunan pada tahun 2024 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir Perubahan RPJMD periode 2019-2024. Pada tahun 2024 ini di harapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Agenda pembangunan pada tahun 2024 menitikberatkan upaya **“Pemantapan Maluku yang Sejahtera dan Berdaulat”**.

Berdasarkan pada tema tersebut, maka fokus pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah pembangunan di segala bidang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 menjadi tahun terakhir dalam periode pembangunan 2019 – 2024, sehingga diharapkan pembangunan Provinsi Maluku mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku. Guna mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka arah kebijakan pembangunan di tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**  
**Tahun 2023-2024**

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun	
Visi : “Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”				2023	2024
<b>Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani</b>					
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance	Peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintah daerah		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT		
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah		Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah		
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau</b>					
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan menengah yang terjangkau		
			Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan non formal		

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun	
Visi : "Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"				202 3	202 4
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata		Peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (Tenaga Kesehatan) Maluku yang unggul.		
			Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau		
<b>Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</b>					
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan				
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan	Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan		
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan		
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat		
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)		
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok		Ketersediaan pangan daerah		
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas		Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat		
			Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM dan penciptaan lapangan kerja		
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan				
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan		

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun	
Visi : “Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”				202 3	202 4
		daerah dalam menghadapi bencana	Penguatan mitigasi risiko bencana daerah		
<b>Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau</b>					
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan				
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri		
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur		Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah		
<b>Misi 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata</b>					
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata				
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa		
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah		Optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi		
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata		
<b>Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi</b>					
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif				
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdaya	Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda		
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga		
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan		

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun	
Visi : “Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”				2023	2024
			lainnya dalam pembangunan		

Sumber : RPJMD Perubahan 2019 -2024

### 4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan yang akan dilaksanakan oleh OPD sehingga tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Mengingat keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal.

#### **4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional 2024**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
1. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2. PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6. PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

#### **4.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024**

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2024 dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2019-2024, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan arah

kebijakan RPJMD untuk Tahun 2024 sangat erat.

Perumusan prioritas 2024 disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah, diantaranya :

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan
3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
6. Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*

Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan yang tersebar ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

**1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ;**

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pengentasan kemiskinan dan didukung dengan arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu, peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), perwujudan ketersediaan pangan pokok daerah, pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM usia kerja. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan daerah, terkendalinya harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan angkatan kerja yang berdaya saing sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ketiga Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam yang

Berkelanjutan.

## **2. Peningkatan Kapasitas Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana;**

Dalam pembangunan suatu wilayah, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk memperkecil dampak yang akan merugikan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pada wilayah Provinsi Maluku, lingkungan hidup menjadi suatu isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Isu lingkungan yang ada di wilayah Maluku di antaranya yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum optimal, alih fungsi lahan, serta kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengupayakan pengendalian lingkungan dalam pembangunan yang dilakukan, menemukan permasalahan, yaitu belum optimalnya peningkatan ketahanan lingkungan hidup dan belum optimalnya mitigasi dan ketahanan bencana.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dengan arah kebijakan peningkatan pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan, serta penguatan ketangguhan bencana. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi yang ke tiga Kepala Daerah Provinsi Maluku.

## **3. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara

seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan ketrampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah, demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu penyebabnya. Dengan demikian strategi yang ingin dilaksanakan diantaranya :

1. Pengembangan industri berbahan baku sumber daya alam;
2. Pengembangan industri skala rumah tangga;
3. Peningkatan kapasitas SDM, bantuan sarana pendukung industri;
4. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan;
5. Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga;
6. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan perkebunan;
7. Peningkatan sumber daya manusia penyuluh, sarana prasarana, pemberdayaan petani;
8. Perlindungan terhadap plasma nutfah Maluku;
9. Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi; dan

10. Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan pangan daerah, diversifikasi pangan lokal, peningkatan industri pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan.

#### **4. Pengembangan usaha ekonomi kreatif;**

Pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku. Pengangguran dan ketenagakerjaan merupakan satu kesatuan yang yang keduanya menciptakan suatu permasalahan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika pemerintah daerah mampu mengatasi permasalahan tersebut, maka akan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Dalam upaya pembangunan kualitas tenaga kerja yang unggul dan kompetitif, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu masih rendahnya keterampilan dan kreatifitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif, dikarenakan masih minimnya kapasitas dan kapabilitas angkatan kerja dan belum optimalnya pengembangan kreatifitas produk unggulan daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yaitu pengembangan usaha ekonomi kreatif dn didukung arah kebijakan meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang kreatif dan berdikari dalam upaya meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan rah kebijakan ini mendukung pencapaian misi keenam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatof, Mandiri dan Berprestasi.

#### **5. Peningkatan Mutu, Jangkauan dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;**

Peningkatan Mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik guru

maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau- pulau terpencil, terdepan dan terluar, sehingga strategi yang ingin dilakukan diantaranya :

1. Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasana pendidikan;
2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Bantuan penyelenggaraan pendidikan yang murah bagi siswa miskin;
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
5. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
6. Peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga kesehatan lainnya;
7. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
8. Bantuan penyelenggaraan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

**6. Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah;**

Kegiatan pembangunan tidak lepas dari upaya partisipasi yang dilakukan dari seluruh elemen yang ada baik pemerintah, swasta serta masyarakat. Salah satu komponen yang harus berpartisipasi dalam pembangunan adalah partisipasi pemuda. Keberhasilan dalam kegiatan pembangunan suatu daerah sangat tergantung dari tingkat partisipasi pemuda yang ada pada wilayah tersebut. Peran pemuda dalam pembangunan memiliki peran yang strategis sehingga perlu adanya pengembangan potensi dan perannya melalui pemberdayaan, pelatihan, dan lainnya. Dalam upaya pembangunan kualitas tenaga kerja yang unggul dan

kompetitif masih terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif, dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yang dilakukan, yaitu pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah dengan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dalam upaya meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi keenam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

#### **7. Optimalisasi pengarusutamaan gender;**

Pengarusutamaan gender merupakan merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki – laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Dalam mendukung pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku masih terdapat permasalahan, yaitu masih minimnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu optimalisasi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul pada masyarakat wilayah Maluku.

Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender ini didukung dengan arah kebijakan peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dalam upaya peningkatan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ke enam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

#### **8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Yang Merata dan Berkualitas;**

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perumbuhan ekonomi, karena infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta terwujudnya stabilitas perekonomian. Sebagai wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur dalam pembangunan di Wilayah Maluku harus disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas serta sarana dan prasarana di wilayah Maluku, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah dikarenakan masih tingginya ketimpangan pembangunan wilayah dan belum optimalnya konektivitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas dengan arah kebijakan akselerasi pengembangan pembangunan desa yang mandiri dan penguatan konektivitas antar wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mendukung peningkatan

pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah serta mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian pada misi keempat Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.

#### **9. Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dan Daya Saing Pariwisata**

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan regional serta menjadi tumpuan pemerintah dalam pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata dengan berdasarkan pada kebudayaan merupakan suatu kolaborasi yang sangat strategis karena beragamnya kebudayaan dan pariwisata daerah–daerah di Indonesia dapat menjadi perintis utama dalam mencapai tujuan ekonomi. Salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya pariwisatanya yaitu Provinsi Maluku. Maluku dengan gugusan kepulauan yang sangat indah untuk dijadikan potensi pariwisata serta sarat dengan objek wisata sejarah zaman penjajahan dan kebudayaan lain turut memberikan daya tarik yang berbeda. Dalam upaya peningkatan investasi serta pengembangan pariwisata dan budaya daerah, terdapat permasalahan yang harus dihadapi, yaitu belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya, dikarenakan tingginya potensi degradasi nilai – nilai agama dan kebudayaan daerah, belum optimalnya daya dukung penanaman modal daerah, dan belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata termasuk infrastruktur penunjangnya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yaitu peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata dengan didukung arah kebijakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa, optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi, serta

peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mencapai terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis, meningkatnya investasi pembangunan daerah, dan meningkatnya ekonomi pariwisata daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi kelima Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata.

#### **10. Optimalisasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance;**

Optimalisasi reformasi birokrasi menuju good governance bertujuan untuk menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfer budaya kerja yang baik.

Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya ketidak selarasan penyelenggaraan pemerintahan /pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat diantaranya : tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota.

Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut

kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Diantaranya keadaan ini terjadi karena aparatur pemerintah masih memosisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ke depannya. Sehingga strategi yang akan dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi diantaranya adalah :

1. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
2. Pengelolaan aset yang profesional;
3. Peningkatan kinerja kelembagaan;
4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berbasis teknologi informasi; dan
6. Peningkatan kompetensi aparatur.

#### **4.4. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024**

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Maluku ditahun 2024, tentunya diseleraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019- 2024), yang yang juga diarahkan pada upaya-upoaya mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024, dimana diharapkan memberikan solusi serta menjawab setiap permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku dengan kebijakan yang ada didokumen pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.7**  
**Keselarasan Tema Pembangunan Daerah Provinsi Maluku**  
**Dan Nasional Tahun 2023**

Arah Pembangunan Nasional Tahun 2024	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
Arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.	Arah kebijakan pada tahun terakhir Perubahan RPJMD periode 2019-2024. Pada tahun 2024 ini di harapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Agenda pembangunan pada tahun 2024 menitikberatkan pada tema <b>“Pemantapan Maluku yang Sejahtera dan Berdaulat”</b> . Berdasarkan pada tema tersebut, maka fokus pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah pembangunan di segala bidang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pemilu 2024
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024	Tema Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sehingga penting untuk memastikan keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024. Berikut disajikan keselarasan prioritas daerah dan prioritas nasional 2024;

**Tabel 4.8**  
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024**

NO PN	PRIORITAS NASIONAL 2024	NO PD	PRIORITAS DAERAH 2024
PN. 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD.3	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
		PD. 1	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
PN. 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD. 6	Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
		PD.2	Pengelolaan Sumber Daya Alam

NO PN	PRIORITAS NASIONAL 2024	NO PD	PRIORITAS DAERAH 2024
			dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan
PN. 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PD.4	Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
		PD.5	Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
PN. 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD. 3	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
PN. 5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD.6	Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
PN. 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD.2	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan
PN. 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD.3	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
		PD. 7	Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju <i>Good Governance</i>

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 diidentifikasi dan diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.9**  
**Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dengan**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024**

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2024
1	Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku;	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2		Pembangunan	Pengelolaan Sumber

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2024
	Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan;	Berkelanjutan	Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	
3	Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya;	Pilpres, Pilkada dan Pileg 2024	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
4	Belum optimalnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif	Peningkatan Kualitas SDM	Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
5	Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia;		Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;	Infrastruktur & Konektivitas	Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
7	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;	Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju <i>Good Governance</i>

**Tabel 4.10**  
**Keselarasan Prioritas Provinsi dan Pusat (RPJMN – RPJMD)**

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
2	3	4	8	9	10	11	15	16
PN	<b>MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS</b>				<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			
	PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	17,9	19,5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan Rumah Tangga)	0,008	0,0083
		Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	69,2	70,3				
PP	PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m <sup>3</sup> )	5,1	5,4				
					<b>PANGAN</b>			
PP	PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	94,0	95,2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Kemmandirian Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100
		Angka Kecukupan	2.100,	2.100,	PROGRAM	Meningkatnya	100	100

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	0	0	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dengan Satuan:%)		
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,0	57,0				
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under- nourishment/PoU)	5,2	5,0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry ExperienceScale/FIES)	4,2	4,0	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100
PP	PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	26,0	26,9				

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<76	≤80				
					<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			
pp	<b>PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi</b>	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,9	4,0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:satuan)	518	518
		Kontribusi UMKM terhadap PDB(Persen )	64,0	65,0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing (Dengan Satuan:Satuan)	90	100
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen )	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel (Dengan Satuan:Satuan)	70	80
pp	<b>PP : Peningkatan</b>	Pertumbuhan PDB	4,0	4,1				

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
	nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	pertanian (Persen)						
		Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	7,5	7,8				
		Pertumbuhan PDB IndustriPengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	7,5	8,1				
		Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	5,3	5,5				
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.564- 1.570	1.689				
					<b>PENANAMAN MODAL</b>			
		Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	7,8	8,4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan investasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100
		Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0				
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,2-4,0	3,5-4,5				
		Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	15,3	15,7				
					<b>PERINDUSTRIAN</b>			

Kode		RPJMN Tahun 2020-2024			RPJMD Provinsi Maluku			
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	21,4	22,0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:Orang)	0	0
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	14,5	15,0				
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	21,0	21,0				
					<b>PERDAGANGAN</b>			
PP	PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (Dengan Satuan:Pesen)	10	10
		Neraca perdagangan barang (USD miliar)	7,5	15,0				
		Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	27,5	30,0				
PP	PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,4	4,4				
		Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	20,1	18,0				
		Peringkat Travel and Tourism Competitive	29-34	N.A				

Kode		RPJMN Tahun 2020-2024			RPJMD Provinsi Maluku			
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
PN	<b>MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING</b>							
PP	<b>PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN</b>	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)		98				
					<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
		Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,19	2,1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:Persentase)	2,87	2,84
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)		80				
PP	<b>PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		98	<b>SOSIAL</b> PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		80		Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100

Kode		RPJMN Tahun 2020-2024			RPJMD Provinsi Maluku			
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
					<b>KESEHATAN</b>			
PP	<b>PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 100.000 kelahiran hidup)	121	119
		Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	17,6	16		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:Per 1000 Kelahiran Hidup)	6	6
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	11	10		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	4	4
					<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	62,9	63,4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (Dengan Satuan:Persen)	46,27	46,2

Kode		RPJMN Tahun 2020-2024			RPJMD Provinsi Maluku			
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,7	7,4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Persen)	75	80
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	20	18				
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	16	14		Prevalensi Balita Stunting (Dengan Satuan:Persen)	22	21
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,3	7		Prevalensi Balita Gizi Kurang (Dengan Satuan:Persen)	6,5	6
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,19	0,18		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Dengan Satuan:Persen)	< 0.2	< 0.2
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	211	190		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Dengan Satuan:Persen)	85	87
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai	385	405				

Kode		RPJMN Tahun 2020-2024			RPJMD Provinsi Maluku			
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		eliminasi malaria						
		Insidensi hepatitis B (persen)	1,24	1,09				
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,8	8,7		Presentase Merokok pada 10 - 18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	8.90	8.80
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8				
		Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1				
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	90	100		Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama (Dengan Satuan:Jumlah)	5	11
		Persentase rumah sakit terakreditasi	95	100				
					<b>PENDIDIKAN</b>			
<b>PP</b>	<b>PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,7 392,3 406,2				
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Dengan Satuan:Persentase Angka Kelulusan)	100	100
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN	Meningkatnya Angka partisipasi	98,91	99,18

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		15 Tahun Keatas (Tahun)			PENDIDIKAN	sekolah (Dengan Satuan:Persentase Angka Partisipasi Sekolah)		
		Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	14	14,16		Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (Dengan Satuan:Rasio)	1:20	1:20
					<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
<b>PP</b>	<b>PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA</b>	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,7	73,49				
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Menur un	Menur un				
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) 9	91,3	91,39				
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74	74,18				
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	54,4	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (Dengan Satuan:%)	27,50	30
		Prevalensi kekerasan terhadap	Menur un	Menur un	PROGRAM PERLINDUNGAN	Rasio KDRT (Dengan Satuan:%)	0,35	0,35

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir			PEREMPUAN			
					<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58,2	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Dengan Satuan:%)	90	100
PP	PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)		40				
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha		50				
		Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)						
		Bidang tanah yang didistribusi		7.750.000				
		Bidang tanah yang dilegalisasi		52.286.087				
					<b>TENAGA KERJA</b>			
PP	PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	50,2	52,1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3,75	5

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
					TENAGA KERJA	(Dengan Satuan:Persen)		
		Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University						
		a. Top 200	0	1				
		b. Top 300	1	2				
		c. Top 500	2	3				
		Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	48	50	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	8,5	8,7
PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN							
PP	PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN				UMUM PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	JUMLAH PEMBINAAN SEPARATISME, RADIKALISME DAN TINDAK KRIMINALITAS (Dengan Satuan:%)	100%	100%

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
	<b>MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER</b>							
					<b>KEBUDAYAAN</b>			
PP	<b>PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA</b>				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	meningkatnya Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Jumlah Cagar Budaya)	68	70
					<b>UMUM</b>			
PP	<b>PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN</b>	Indeks Kerukunan Umat Beragama			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	JUMLAH PEMBINAAN TERHADAP PAHAM KEAGAMAAN BERMASALAH	13	16

C	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku				
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
				2023	2024			2023	2024
		<b>HARMONI SOSIAL</b>					(Dengan Satuan:JUMLAH PEMBINAAN)		
	PP	<b>PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER</b>				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat (Dengan Satuan:Nilai)	62	65
	PN	<b>MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>							
						<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
	PP	<b>PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR</b>	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	94,6	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	86	87	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	100	100	
			Persentase rumah tangga yang memiliki	59,6	60				

C	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku				
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
				2023	2024			2023	2024
			sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)						
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,6	4				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	86,03 % akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)				
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	1,49	0				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik (%)	77.64 % penanganan; 14.57 % pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Dengan Satuan:%)	100	100	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)				
			Persentase rumah tangga yang menempati	12,2	15				

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		hunian dengan akses air minum aman (%)						
		Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	58,1	58,5				
		Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	2	1				
		Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare)	11634 2,7083	11634 2,7083				
					<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
		Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunnya Indeks risiko bencana di daerah (Dengan Satuan: indeks)	160.15	160.05
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	11,4	11,43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentasi Capaian Pengelolaan Sumber daya Air (Dengan Satuan:-)	0	0
					<b>PERHUBUNGAN</b>			
		Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentasi Angka Kecelakaan di Jalan Raya (Dengan Satuan:Dokumen)	16573200000	19887840000
					<b>PUPR</b>			

C	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku				
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
				2023	2024			2023	2024
	PP	PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:satuan)	0	0
						<b>PERHUBUNGAN</b>			
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentasi Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan, Presentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis (Dengan Satuan:Dokumen)	8111250000	9733500000
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)						
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)						
	PP	PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Presentasi terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan	0	0

C	Kode		RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		
				2023	2024			2023	2024	
							konektivitas antar wilayah (Dengan Satuan:Dokemen)			
						<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				
	PP	PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektifikasi (Dengan Satuan:%)	98	99	
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1336	1408	Persentase rumah tangga pengguna listrik (Dengan Satuan:RUmah Tangga)	350	400		
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	5,91	6,07					
						<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	PP	PP : TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Pemenuhan Operasional perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	
			Persentase pengguna internet (Persentase)	80,7	82,3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Dengan	100	100	

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
						Satuan:persen)		
		Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	99	100	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Peresentase pemanfaatan Jaringan TIK (Dengan Satuan:persen)	100	100
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	74	76,7				
<b>PN</b>	<b>MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM</b>							
					<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>PP</b>	<b>PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Upaya)	3	3
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah	1	1

C	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku				
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
				2023	2024			2023	2024
					(LIMBAH B3)	B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)			
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	60	60,5				
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	65	65,5	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah objek kelembagaan MHA dan kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku yang diakui keberadaannya (Dengan Satuan:Objek)	3	4
	PP	PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	65	70
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	1	1,15				
			Kecepatan penyampaian informasi	3,5	3	PROGRAM PENANGANAN	Presentase cakupan	100	100

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
		peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)			BENCANA	penanganan bencana alam dan sosial (Dengan Satuan:Persen)		
					<b>ESDM</b>			
PP	PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	13	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan:%)	0,0079	0,0083
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	57	58,3				
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	9,4	9,4				
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,6	2,9				
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	7	7,3				
PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK							

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
PP	PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE LEMBAGA DEMOKRASI (Dengan Satuan:%)	77%	80%
PP	PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	96	95,7				
PP	PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	0,7	0,73	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
PP	PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga ) dengan Indeks RB Baik Keatas*	85	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Persen)	0	0
		PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	80	85				
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	55	70				
PP	PP : Menjaga	Global Fire Power Index	0,2	0,2				

Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Maluku			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
			2023	2024			2023	2024
	<b>Stabilitas Keamanan Nasional</b>							
		Global Terrorism Index	4,3	4,24				
		Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>60%	>60%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	100	100
		Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,3	3,4				

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN/ KOTA**

Kebijakan pengembangan wilayah berfungsi untuk menetapkan fokus pengembangan secara kewilayahan sesuai dengan karakteristik, potensi kewilayahan, ketersediaan daya dukung dan daya tampung pada fungsi kawasan yang mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pembentukan gugus pulau, kebijakan pengembangan wilayah akan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Provinsi Maluku.

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

**5.1. ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**5.1.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah**

Kebijakan pengembangan wilayah berfungsi untuk menetapkan fokus pengembangan secara kewilayahan sesuai dengan karakteristik, potensi kewilayahan, ketersediaan daya dukung dan daya tampung pada fungsi kawasan yang mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pembentukan gugus pulau, kebijakan pengembangan wilayah akan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Provinsi Maluku. Strategi kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Maluku terdiri dari:

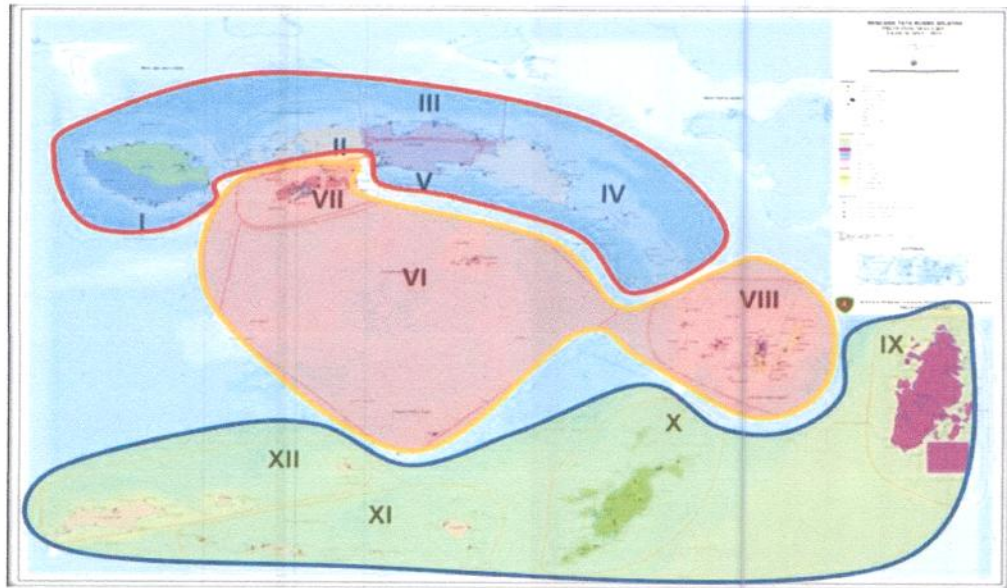
1. Pembagian 8 (delapan) Wilayah Pengembangan meliputi: Pulau Buru, Ambon dan Pulau-pulau Lease, Pulau Seram, Kepulauan Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Maluku Barat Daya;
2. Penentuan keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan berdasarkan gugus pulau yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pengembangan wilayah sehingga kesenjangan pembangunan bisa

dikurangi. Penentuan keterkaitan fungsional antar WP ini meliputi tiga bagian:

- a. Kawasan yang terletak di gugus pulau I, II, III, IV, dan V mencakup WP Pulau Buru dan WP Pulau Seram menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan tujuan ekonomis seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
- b. Kawasan yang terletak di gugus pulau VI, VII, dan VIII mencakup WP Kepulauan Banda, WP Ambon dan Pulau-pulau Lease, dan WP Kepulauan Kei menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata, kebudayaan, dan melibatkan pengembangan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kerentanan terhadap resiko bencana alam dan non alam, serta sedapat mungkin menghindari alih fungsi lahan lindung dan pertanian;
- c. Kawasan yang terletak di gugus pulau IX, X, XI, dan XII mencakup WP Kepulauan Aru, WP Kepulauan Tanimbar, dan WP Kepulauan Maluku Barat Daya menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan prioritas pembangunan Provinsi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa harus mengorbankan fungsi-fungsi lingkungan.

Keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan ini dapat dilihat di gambar berikut

**Gambar 5.1**  
**Peta Keterkaitan Antar Wilayah Pengembangan dalam Gugus Pulau**



Sumber: RTRW Provinsi Maluku setelah diolah, 2021

### 5.1.2 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan kepada berbagai faktor dan merupakan integrasi pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perumusan ini dibuat mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan dan arah pengembangan di setiap Wilayah Pengembangan, dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033, RPJPD Provinsi Maluku, yang diselaraskan dengan program prioritas dan program pembangunan daerah serta program unggulan pimpinan daerah. Alur kerangka pikir perumusan arah kebijakan kewilayahan dirumuskan sebagaimana dalam gambar berikut ini:

**Gambar 5.2**  
**Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan**



Sumber: Hasil analisis, 2021

Dengan demikian strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2019-2024) mendatang secara umum diarahkan untuk mendukung:

1. Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di setiap Gugus Pulau;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau;
4. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana;
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah melalui kawasan budidaya; dan
6. Optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah.

Berikut ini adalah arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan fokus wilayah pembangunan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian gugus pulau,

**Tabel 5.1**  
**Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Wilayah Pembangunan**  
**Kabupaten/Kota**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju <i>Good Governance</i>	Peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintah daerah	12 Gugus pulau
	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	12 Gugus pulau
	Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah	12 Gugus pulau
Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang terjangkau	Gugus II, III, IV, V, dan IX.
	Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau	12 Gugus pulau
Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan	Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan	Gugus II, III, IV, V
	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, khususnya komoditas perikanan tangkap dan rempah-rempah	Gugus I, VII, IX, X, XI, XII
Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu	12 Gugus pulau (Khususnya Gugus IX, X, XI)
	Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	12 Gugus pulau
	Perwujudan ketersediaan pangan pokok daerah	12 Gugus pulau (Khususnya Gugus III & IV)
	Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	12 Gugus pulau
	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM usia kerja	12 Gugus pulau (Khususnya Gugus I, VI, VII, VIII)

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan	12 Gugus pulau
	Penguatan ketangguhan bencana daerah	12 Gugus pulau
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan pembangunan desa yang mandiri	12 Gugus pulau
	Penguatan konektivitas antar wilayah	12 Gugus pulau
Peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan budaya daerah	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa	12 Gugus pulau
	Optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi	Gugus II, III, IV, VI, VIII, IX, X
	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata	Gugus VI, VII, VIII,
Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda	12 Gugus pulau
Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga	12 Gugus pulau
Optimalisasi pengarusutamaan gender	Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan	12 Gugus pulau

Sumber: Diolah dari RTRW, 2021

### 5.1.3 Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW bertujuan untuk mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat. Dalam dokumen RTRW, dijelaskan secara rinci mengenai pembangunan berdasarkan zonasi di Provinsi Maluku selama 20 tahun ke depan yaitu dari 2013-2033. Kawasan strategis Provinsi di Provinsi Maluku

meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta lingkungan. Jenis kawasan strategis Provinsi di Provinsi Maluku yaitu :

1. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, yang meliputi :
  - a. Kepulauan Aru;
  - b. Kepulauan Tanimbar;
  - c. Kepulauan Babar;
  - d. Kepulauan Leti – Moa – Lakor;
  - e. Pulau Kisar;
  - f. Pulau Wetar;
  - g. Pulau Lirang
2. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang meliputi
  - a. Kawasan Seram Barat (GP 2);
  - b. Kawasan Seram Selatan (GP 5);
  - c. Kawasan Seram Timur (GP 4);
  - d. Kawasan Seram Utara (GP 3);
  - e. Kawasan Pulau Buru (GP 1);
  - f. Kota Ambon (GP 7);
  - g. Kepulauan Tanimbar (GP 10);
  - h. Kepulauan Kei (GP 8);
  - i. Kawasan Bula (GP 4);
  - j. Kawasan Benjina (GP 9);
  - k. Zona Industri Seram Selatan (GP 5);
  - l. Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.
3. Kawasan Strategis dari Aspek Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi seluruh kawasan darat dan laut kabupaten/kota di Provinsi Maluku, terutama di :
  - a. Teluk Ambon (GP 7);
  - b. Kawasan Bula (GP 4);

c. Kawasan Buru (GP 1);

**Tabel 5.2**  
**Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi**

NO.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1.	Kepulauan Aru; Kepulauan Tanimbar; Kepulauan Babar; Kepulauan Leti – Moa – Lakor; Pulau Kisar; Pulau Wetar; dan Pulau Lirang	Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Provinsi.	Mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman.
2	Kawasan Seram Barat (GP 2); Kawasan Seram Selatan (GP 5); Kawasan Seram Timur (GP 4); Kawasan Seram Utara (GP 3); Kawasan Pulau Buru (GP 1); Kota Ambon (GP 7); Kepulauan Tanimbar (GP 10); Kepulauan Kei (GP 8); Kawasan Bula (GP 4); Kawasan Benjina (GP 9); Zona Industri Seram Selatan (GP 5); dan Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.	Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, SDM, dan sumber daya lainnya di kawasan kepulauan yang mencakup wilayah darat dan laut (perairan).	Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan.
3	Teluk Ambon (GP 7); Kawasan Bula (GP 4); dan Kawasan Buru (GP 1);	Peningkatan fungsi lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sekitarnya.	Mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan strategis yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan serta daya dukung lingkungan, termasuk pengendalian alih fungsi kawasan lindung.

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024

Arah kebijakan pembangunan yang melingkupi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku dirumuskan untuk mendukung capaian lima indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB Perkapita. Proyeksi target dukungan dari Kabupaten dan kota di Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024 akan ditampilkan dalam tabel-tabel berikut ini,

## **5.2. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2024**

Upaya untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan melihat tingkat ketercapaian Indikator kinerja daerah. Pencapaian target daerah melalui Indikator sejatinya pencapaiannya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, namun pencapaian tersebut dapat dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah (pusat dan daerah maupun Provinsi dan Kab/Kota) dan bahkan pemangku kepentingan masyarakat seperti masyarakat dan dunia usaha.

Kinerja pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku selain diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), juga diukur dengan pencapaian Indikator Kinerja Makro. Target indikator makro yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2024 adalah target berdasarkan hasil analisis dalam perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan penyesuaian target pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, IPM, jumlah dan persentase Penduduk Miskin, TPT, dan Indeks Gini. Dalam mewujudkan sinergi perencanaan provinsi dan kabupaten/kota dimaksud, maka ditetapkan arahan target indikator kinerja makro tahun 2024 bagi setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Pada Tabel berikut menyajikan proyeksi target indikator makro kabupaten/kota yang mendukung pencapaian target Provinsi Maluku untuk tahun 20224 dan 2023 yang terkoreksi. Selanjutnya pada Tabel berikut akan menyajikan proyeksi target indikator komponen pembentuk IPM untuk seluruh kabupaten/kota se-Maluku Tahun 2023 dan Tahun 2024.

**Tabel 5.3**  
**Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024**

Kab/Kota/Prov	IPM		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran		Pertumbuhan Ekonomi		PDRB Perkapita	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	63,68	63,95	23,58	23,08	3,44	3,44	6,65	7,18	34,73	26,03
Kabupaten Maluku Tenggara	67,06	67,35	17,66	17,16	4,52	4,52	6,58	7,02	24,86	35,45
Kabupaten Maluku Tengah	72,18	72,48	17,00	16,64	6,89	6,89	6,54	7,02	17,52	25,38
Kabupaten Buru	69,85	70,14	16,22	15,78	6,54	6,54	6,81	7,20	38,46	17,88
Kabupaten Kepulauan Aru	64,54	64,81	23,37	22,80	2,88	2,88	6,54	6,94	18,80	39,26
Kabupaten Seram Bagian Barat	66,48	66,76	18,79	18,22	4,54	4,54	6,50	6,97	26,76	19,19
Kabupaten Seram Bagian Timur	64,96	65,23	17,20	16,56	2,46	2,46	2,72	2,88	24,28	27,31
Kabupaten Maluku Barat Daya	62,71	62,97	25,14	24,63	3,99	3,99	6,84	7,41	23,58	24,79
Kabupaten Buru Selatan	65,53	65,81	11,99	11,53	1,88	1,88	7,00	7,33	31,67	24,07
Kota Ambon	80,53	80,43	5,85	5,79	9,95	9,95	6,33	6,78	34,25	32,32
Kota Tual	68,85	69,14	16,91	16,14	7,45	7,45	6,53	7,10	26,94	34,96
<b>Provinsi Maluku</b>	<b>70,39</b>	<b>70,69</b>	<b>16,13</b>	<b>15,73</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>	<b>6,28</b>	<b>6,71</b>	<b>25,50</b>	<b>27,50</b>

Sumber RPJMD Perubahan Provinsi Maluku, 2022

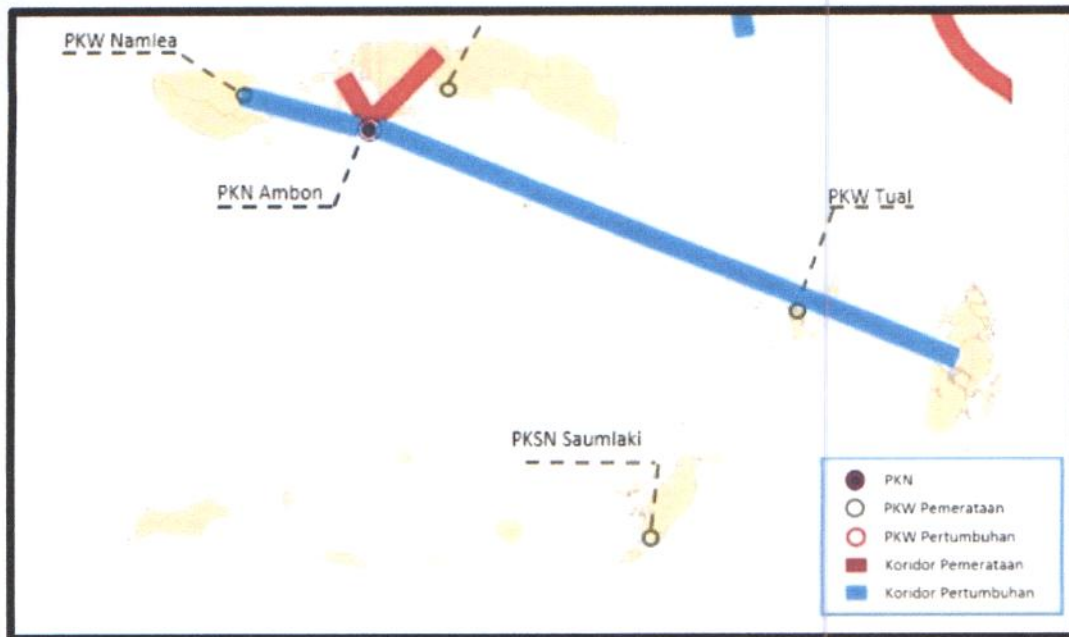
Sementara itu untuk dapat melakukan pengendalian atas pemanfaatan ruang dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan pengendalian pemanfaatan guna terwujudnya tertib ruang dalam pembangunan yang selaras dengan RTRW diperlukan beberapa hal berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban berdasarkan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
2. Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berada dalam kewenangan kabupaten/kota harus berpedoman pada RTRW Provinsi;
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota yang berdampak besar dan/atau berkaitan dengan kepentingan nasional dan/atau provinsi, harus diberikan melalui koordinasi dengan gubernur.

#### **5.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Maluku**

Pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan potensi wilayah. Pengembangan wilayah yang dilaksanakan mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana serta difokuskan pada dua koridor utama yaitu koridor pemerataan dan koridor pertumbuhan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini,

**Gambar 5.4**  
**Peta Pengembangan Kawasan Nasional di Wilayah Provinsi Maluku**



### 5.2.1.1 Prioritas Berdasarkan Sektor Unggulan dan Pusat Pertumbuhan Utama

Secara umum, pengembangan wilayah Maluku terfokus pada pengembangan sektor unggulan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, serta memantapkan perannya sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Wilayah-wilayah pengembangan ini ditandai dengan penetapan pusat-pusat kegiatan, yaitu pusat kegiatan wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan komoditas unggulan yang meliputi pengembangan tanaman perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan antara lain industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain- lain, serta transportasi dan pergudangan.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), di antaranya yang telah ditetapkan adalah:
  - a. Pengembangan Kota Pelabuhan di Ambon;

- b. Pengembangan PKSN Saumlaki termasuk ekonomi kawasan sekitarnya;
- c. Pengembangan kawasan pedesaan;
- d. Pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. Pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan; dan
- f. Pengentasan daerah tertinggal;

#### **5.2.1.2 Prioritas Berdasarkan Sektor Unggulan dan Pusat Pertumbuhan Utama**

Secara umum, pengembangan wilayah Maluku terfokus pada pengembangan sektor unggulan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, serta memantapkan perannya sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Wilayah-wilayah pengembangan ini ditandai dengan penetapan pusat-pusat kegiatan, yaitu pusat kegiatan wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

- 3. Pengembangan komoditas unggulan yang meliputi pengembangan tanaman perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan antara lain industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain- lain, serta transportasi dan pergudangan.
- 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), di antaranya yang telah ditetapkan adalah:
  - g. Pengembangan Kota Pelabuhan di Ambon;
  - h. Pengembangan PKSN Saumlaki termasuk ekonomi kawasan sekitarnya;
  - i. Pengembangan kawasan pedesaan;
  - j. Pengembangan kawasan transmigrasi;
  - k. Pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan; dan

I. Pengentasan daerah tertinggal;

Berikut ini adalah penjabaran mengenai matrik pembangunan RPJMN dalam hal pengembangan wilayah berdasarkan proyek prioritas strategis nasional di Provinsi Maluku,

**Tabel 5.4**  
**Matrik Pembangunan RPJMN untuk Pengembangan Wilayah di Provinsi Maluku**

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Provinsi Maluku				
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun			
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi	Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Makuku Barat Daya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
pertambangan	provinsi			
ss			Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi	Provinsi Maluku, a.l: Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Provinsi Maluku	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Maluku			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku)		Kota Ambon, Kota Tual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut;</li> <li>2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara;</li> <li>3. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas;</li> <li>4. Program Pengembangan Perumahan;</li> <li>5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;</li> <li>6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenhub;</li> <li>2. Pemda,;</li> <li>3. Badan Usaha;</li> <li>4. BUMN;</li> <li>5. Kemennaker;</li> <li>6. Kemen PUPR;</li> <li>7. KPBU, APBD,</li> </ol>

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri			
	Jumlah Daerah Tertinggal (kabupaten)	Prov. Maluku: Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN			
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	Kab. Maluku Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi</li> <li>2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li> <li>3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa PDTT</li> <li>2. Kementerian ATR/BPN</li> </ol>

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara;</li> <li>2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut;</li> <li>3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat;</li> <li>4. Program Penyelenggaraan Jalan;</li> <li>5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>6. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;</li> <li>7. Program Pengembangan Daerah Tertentu;</li> <li>8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;</li> <li>9. Program Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>10. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaa Mikro;</li> <li>11. Program Pengelolaan Ruang Laut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perhubungan;</li> <li>2. Kementerian PUPR;</li> <li>3. Kementerian Desa PDTT;</li> <li>4. Kementerian Sosial;</li> <li>5. Kementerian KUKM;</li> <li>6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>7. Pemda</li> </ol>
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>2. Bina Pemerintahan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa PDTT</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan</li> <li>2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan</li> <li>3. Program Ketenagalistrikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pertanian</li> <li>2. Kemendesa PDTT</li> <li>3. Kementerian ESDM;</li> </ol>
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi</li> <li>2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li> <li>3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa PDTT</li> <li>2. Kementerian ATR/BPN</li> </ol>
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)			
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
	elektronik			
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)			
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik			
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik		1. Program Bina Administrasi Kewilayahan; 2. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial; 3. Program Bina Otonomi Daerah;	1. Kemendagri; 2. BIG
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	Pusat	1. Program Bina Administrasi Kewilayahan; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kemendagri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	Pusat		
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi	Pusat	1. Program Penelitian dan Pengembangan;	Kemendagri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
	tinggi (%)		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	Pusat	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	Pusat		
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.		Program Bina Otonomi Daerah; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	Maluku	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

## BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Provinsi Maluku tahun 2024 telah menggunakan pendekatan money follow program dan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

#### 6.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Pendanaan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pagu indikatif pada masing-masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan dan program Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Pagu Indikatif berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah**  
**Tahun 2024**

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	437,771,376,000
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	555,416,463,459
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	323,439,649,298
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	104,440,393,709
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31,029,908,280
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	48,402,172,037
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	272,149,901,121
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10,274,723,000
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	16,091,318,449
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13,087,790,688
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15,374,963,138
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16,232,926,000
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,085,193,750
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36,674,464,156
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41,188,079,921
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19,560,322,883
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18,560,795,659
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31,674,992,000
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	940,999,007
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1,078,514,136

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	PERSANDIAN	
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12,185,885,000
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14,723,360,000
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	955,000,000
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	135,273,238,347
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	36,907,703,111
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	73,841,469,266
03.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	148,664,526,520
03.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	18,879,080,947
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8,950,000,000
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	41,350,000,000
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	899,000,000
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	332,627,449,265
04.02	SEKRETARIAT DPRD	272,619,589,954
05.01	PERENCANAAN	36,009,199,172
05.02	KEUANGAN	391,516,089,036
05.03	KEPEGAWAIAN	17,832,369,392
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	54,603,103,349
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13,440,763,158
05.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	3,399,664,197
05.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	15,980,778,648
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	47,347,000,000
08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20,304,000,000

Bidang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pagu indikatif pada bidang urusan keuangan didalamnya terdapat beberapa belanja yang cukup besar diantaranya Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dan pada Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi terdapat belanja wajib mengikat pada seluruh Perangkat Daerah.

## 6.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju

Bidang Urusan Pemerintah Daerah dijabarkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2010 dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Rancangan Awal RKPD 2024 dapat disajikan Pagu Indikatif berdasarkan program yang berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) 2019 – 2024.

**TABEL 6.2**

**PAGU INDIKATIF BERSASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.523.792.000
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	87.523.792.000
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	87.523.792.000
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	241.884.025.684
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	56.656.559.171
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	33.177.538.992
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.052.601.300
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	67.622.898.839
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	40.098.492.257
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3,100,000,000
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300,000,000
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	3,668,500,000

KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	15.160.750.000
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	53.603.000.000
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	37.285.596.160
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	57.258.854.326
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4,830,500,000
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,224,999,692
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11.963.064.960
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	36.517.679.874
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	38.413.793.797
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.743.647.403
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	391,960,800
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4,242,500,000
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4,414,200,000
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200,000,000
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9,203,370,056
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.972.720.000
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1,875,000,000
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	350,000,000
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	136,290,000
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,312,500,000
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	226,800,000
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	383,850,000
02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1,500,000,000
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	514,000,000
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	565,864,000
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	445,922,000
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	358,050,000
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1,061,500,000
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS	945,250,000

KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
	anak	
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	16,422,420
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,949,470,215
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	123,086,460
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	120,050,000
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2,250,000,000
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	788,048,900
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	192,854,700
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH	747,438,900
02.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	322,500,900
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	384,623,200
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150,986,000
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,188,200,020
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1,393,156,238
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1,642,541,625
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	448,375,000
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	260,000,000
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	625,000,000
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2,745,000,000
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4,793,000,000
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	724,068,750
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,071,125,000
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,290,000,000
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	19.138.181.763

KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
	LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,089,238,010
02.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	555,948,800
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11.828.743.854
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.123.518.232
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	193,000,000
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10,000,000
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2,798,087,870
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1,875,000,000
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	975,000,000
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	210,000,000
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1,629,851,300
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6,856,300,000
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1,225,049,749
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	904,892,955
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	189,750,000
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5,615,000,000
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.550.000.000
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500,000,000
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	940,999,007
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1,078,514,136
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.185.885.000
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2,840,000,000
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	800,000,000
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	820,000,000
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	100,000,000
02.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	35,000,000
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	10.604.779.900
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	46.485.758.000
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	14.904.088.600

KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
	BUDIDAYA	
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,260,677,400
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5,221,064,200
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6,640,313,361
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7,334,346,707
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1,710,271,752
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,714,083,328
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.839.660.000
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9,895,000,000
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	452,017,266
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	350,000,000
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	225,000,000
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,000,000,000
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	68.547.408.000
03.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1,927,828,000
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	8,367,038,000
03.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	21.775.927.000
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	494,996,700
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1,151,634,000
03.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	2,480,514,900
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	4,580,235,000
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	150,000,000
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	6,400,000,000
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1,000,000,000
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1,250,000,000
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	150,000,000
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN	21.000.000.000

KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMBANGUNAN INDUSTRI	
03.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRAS	500,000,000
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	189,000,000
03.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	210,000,000
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3,713,003,520
04.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	43.122.228.177
04.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	132.354.741.596
04.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3,129,898,443
04.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,221,339,412
04.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2,496,291,000
04.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2,818,393,000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	131.833.886.514
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	9,851,275,118
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9,806,477,216
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAA KEUANGAN DAERAH	310,233,773,688
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,525,507,062
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.582.987.742
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7,905,262,500
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	31.186.547.547
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.440.763.158
05.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	596,282,785
05.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3,038,765,625
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	20.070.000.000
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	8,050,000,000
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,225,000,000
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6,150,000,000
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1,200,000,000
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN	1,500,000,000

KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
	PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	600,000,000